

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	2
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa	4
1.2.1. Kondisi Geografis	4
1.2.1.1. Batas Administratif Daerah	4
1.2.1.2. Luas Wilayah	5
1.2.1.3. Topografi	6
1.2.1.4. Iklim dan Curah Hujan	6
1.2.2. Demografis	7
1.2.2.1. Penduduk	7
1.2.2.2. Ketenagakerjaan.....	9
1.2.2.3. Penduduk Miskin.....	11
1.2.2.4. Tingkat Pendidikan	12
1.2.3. Kondisi Ekonomi	12
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah	12
1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/PDRB.....	22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	26
2.1. Visi dan Misi	26
2.1.1. Visi	27
2.1.2. Misi	27
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD (2011-2015)	28
2.3. Prioritas Pembangunan.....	34
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	36
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	36
3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	36
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	40

3.1.3. Permasalahan dan Solusi	41
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah	48
3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	48
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja	56
3.2.3. Permasalahan dan Solusi	56
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59
4.1. Urusan Wajib	59
4.1.1. Program dan Kegiatan	59
4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program pada Urusan Wajib	67
4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan	67
4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan	77
4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup	84
4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum	86
4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang	89
4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	91
4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan	94
4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah raga	95
4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal	97
4.1.2.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM.....	98
4.1.2.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	100
4.1.2.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan	101
4.1.2.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan	105
4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	108
4.1.2.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	110
4.1.2.16. Urusan Wajib Perhubungan	112
4.1.2.17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	114
4.1.2.18. Urusan Wajib Pertanahan	115
4.1.2.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	116
4.1.2.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah, dan Persandian	119
4.1.2.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136

4.1.2.22. Urusan Wajib Sosial	139
4.1.2.23. Urusan Wajib Kebudayaan	142
4.1.2.24. Urusan Wajib Statistik	145
4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan	145
4.1.2.26. Urusan Wajib Perpustakaan	146
4.1.3. Permasalahan	147
4.2. Urusan Pilihan	149
4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	149
4.2.2. Realisasi Program pada Urusan Pilihan	151
4.2.2.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	151
4.2.2.2. Urusan Pilihan Pertanian	155
4.2.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan	162
4.2.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	166
4.2.2.5. Urusan Pilihan Pariwisata	170
4.2.2.6. Urusan Pilihan Industri	171
4.2.2.7. Urusan Pilihan Perdagangan	172
4.2.2.8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian	173
4.2.3. Permasalahan dan Solusi	174
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	176
5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima	176
5.1.1. Dasar Hukum.....	176
5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	177
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan	178
5.1.4. Program dan Kegiatan yang Diterima	178
5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran	199
5.1.6. Permasalahan dan Solusi	202
5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan	203
5.2.1. Dasar Hukum.....	203
5.2.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugasperbantukan Kepada Desa	204
5.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran	205
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN	206
6.1. Kerjasama Antar Daerah	206
6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan	206

6.1.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	207
6.1.3. Permasalahan dan Solusi	208
6.2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	209
6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan	210
6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	210
6.2.3. Permasalahan dan Solusi	212
6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	212
6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan	212
6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	213
6.3.3. Permasalahan dan Solusi	215
6.4. Pembinaan Batas Wilayah	216
6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan	216
6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	216
6.4.3. Permasalahan dan Solusi	216
6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	217
6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	217
6.5.2. Status Bencana	218
6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran	218
6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Bencana	218
6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	219
6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	219
6.7.1. Gangguan yang Terjadi	219
6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani	220
6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..... .	220
6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran	220
6.7.5. Penanggulangan	221
6.7.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan	221
BAB VII PENUTUP	222
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.....	5
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2007-2012	7
Tabel 1.3.	Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013	10
Tabel 1.4.	Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2013.....	20
Tabel 1.5.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2012	23
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013	40
Tabel 4.1.	Program Pembangunan pada Penyelenggaraan Urusan wajib di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013	60
Tabel 4.2.	Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013	70
Tabel 4.3.	Jumlah Sekolah, Siswa, Guru dan Ruang Kelas.....	72
Tabel 4.4.	Siswa Paket A, B dan C di kabupaten Sumbawa (2011-2013)	75
Tabel 4.5.	Jumlah Pengunjung Rawat Inap dengan Jamkesmas/Jamkesda menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa (2013).....	83
Tabel 4.6.	Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013.....	90
Tabel 4.7.	Kondisi Perumahan Penduduk di kabupaten Sumbawa Tahun 2013.	94
Tabel 4.8	Jumlah koperasi, Koperasi RAT dan Hasil pemeringkatan Koperasi Tahun 2011-2013	98
Tabel 4.9.	Jumlah KSP/USP dan Hasil penilaian Kesehatan KSP/USP tahun 2011-2013 di Kabupaten Sumbawa	99
Tabel 4.10.	Kegiatan Inspeksi Kontrol dan Kunjungan Tahun 2013.....	104
Tabel 4.11.	PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Rincian Golongan....	126
Tabel 4.12.	PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan.....	127
Tabel 4.13.	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2013.....	128
Tabel 4.14.	Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Tanda-tanda Jasa lainnya, Tahun 2013	128
Tabel 4.15.	Pemberian izin pada Kantor Pelayanan Izin terpadu Tahun 2012-2013.....	129

Tabel 4.16.	Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	139
Tabel 4.17.	Jumlah PMKS dan yang sudah tertangani di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	142
Tabel 4.18.	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa 2013.....	143
Tabel 4.19.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Sumbawa Pada Urusan Pilihan Tahun 2013.....	150
Tabel 4.20	Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kab. Sumbawa 2013.....	152
Tabel 4.21.	Inseminasi Buatan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013.....	158
Tabel 4.22.	Luas Hutan di Kabupaten Sumbawa	165
Tabel 4.23.	Daftar Perusahaan Tambang Mineral Bukan Logam.....	168
Tabel 4.24.	Potensi Sumberdaya Energi Angin.....	169
Tabel 4.25.	Potensi Sumberdaya Energi Air.....	169
Tabel 4.26.	Potensi Sumberdaya Energi Air.....	169
Tabel 4.27.	Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah.....	171
Tabel 4.28.	Perkembangan Jumlah pelaku usaha Perdagangan.....	172
Tabel 5.1.	Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.....	179
Tabel 5.2.	Realisasi Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	181
Tabel 5.3.	Realisasi Anggaran Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	182
Tabel 5.4.	Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	183
Tabel 5.5.	Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	184
Tabel 5.6.	Realisasi Anggaran Program Penempatan dan Perluasan kesempatan Kerja di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	186
Tabel 5.7.	Realisasi Anggaran Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	187
Tabel 5.8.	Realisasi Anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	189

Tabel 5.9.	Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	192
Tabel 5.10.	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	195
Tabel 5.11.	Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	196
Tabel 5.12.	Realisasi Anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	198
Tabel 5.13.	Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	199
Tabel 6.1.	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD Yang Menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	220
Tabel 6.2.	Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kantibmas Kabupaten Sumbawa Tahun 2013.....	220

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Porsentase Komposisi Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2000-2012.....	9
Gambar 1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2009-2013.....	10
Gambar 1.3.	Porsentase Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Tahun 2005-2012.	11
Gambar 1.4.	Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013.	14
Gambar 1.5.	Perkembangan Populasi Ternak Kecil di Kab. Sumbawa 2011-2013.....	15
Gambar 1.5	Perkembangan Populasi Unggas di Kab. Sumbawa 2011-2013.....	24
Gambar 1.7.	Kontribusi Sektor-sektor Primer, Sekunder dan Tersier Terhadap PDRB Kab. Sumbawa Tahun 2011.....	24
Gambar 4.1.	Perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013.....	68
Gambar 4.2.	Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013.....	70
Gambar 4.3	Rasio Siswa dan Rombongan Belajar Pada Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2013.....	75
Gambar 4.4	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013...	79
Gambar 4.5.	Penyebab Kematian Neonatal di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013.....	80
Gambar 4.6.	Penyebab Kematian Post Neonatal di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013.....	80
Gambar 4.7.	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2013.....	80
Gambar 4.8.	Penyebab Kematian Maternal di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013..	81
Gambar 4.9.	Persentase Penderita Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Lebih dan Gizi Baik Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2013.....	82
Gambar 4.10	Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif 2011-2013.....	111
Gambar 4.11	Penyaluran Benih dan luas Benih Unggul Bersertifikat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	153
Gambar 4.12	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013.	170



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah sesungguhnya memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan LKPJ juga sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga antar kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini LKPJ merupakan sarana sinergitas baik pihak eksekutif dan legislatif dalam



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa akhir tahun anggaran 2013 dilaksanakan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan perkembangan (*progress report*) sekaligus gambaran pembangunan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2013 yang penyusunannya didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 577);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 18).

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

1.2.1. Kondisi Geografis

1.2.1.1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Sumbawa terletak diantara 116°42'–118°22' Bujur Timur, 8°8'–9°7' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;

1.2.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 11.556,44 km², terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah perairan laut 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dengan posisi geostrategis pada jalur lalu lintas perdagangan Surabaya-Waingapu dan berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada pembangunan pariwisata dan Ketahanan Pangan Nasional. Secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 wilayah kecamatan, 157 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan
Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa / Kelurahan	Persentase Dataran
1.	Lunyuk	513,74	7	7,73
2.	Orong Telu	465,97	4	7,01
3.	Alas	123,04	8	2,64
4.	Alas Barat	168,88	8	1,16
5.	Buer	137,01	6	2,66
6.	Utan	155,42	9	2,8
7.	Rhee	230,82	4	3,01
8.	Batulanleh	391,40	6	5,89
9.	Sumbawa	44,83	8*	0,66
10.	Labuhan Badas	435,89	7	6,69
11.	Unter Iwes	82,38	8	1,13
12.	Moyohilir	186,79	10	2,81
13.	Moyo Utara	90,80	6	1,37
14.	Moyohulu	311,96	12	4,7
15.	Ropang	444,48	5	6,69
16.	Lenangguar	504,32	4	7,59
17.	Lantung	167,45	4	2,52
18.	Lape	204,43	4	3,07
19.	Lopok	155,59	7	2,34
20.	Plampang	418,69	11	7,11
21.	Labangka	243,08	5	2,52



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa / Kelurahan	Persentase Dataran
22.	Maronge	274,75	4	4,46
23.	Empang	558,55	10	8,41
24.	Tarano	333,71	8	5,02
Jumlah		6.643,98	165	100

(*) kelurahan

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa (*Sumbawa Dalam Angka 2012*)

1.2.1.3. Topografi.

Topografi daratan di Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 m dpal. Ketinggian 0-100 m dpal mencapai luas 26,51%; 100-500 m dpal seluas 42,31%; 500-1.000 m dpal seluas 27,69% dan > 1.000 m dpal seluas 3,49%, sementara untuk ketinggian kota-kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 m dpal. Ibu Kota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan Ibu Kota Kecamatan yang terendah.

1.2.1.4. Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau, dengan temperatur maksimum yang terjadi pada bulan Oktober mencapai 37,1 °C dan temperatur minimum pada bulan Agustus sebesar 18,6 °C. Untuk kelembaban udara tertinggi selama tahun 2013 terjadi pada bulan Januari mencapai 89%, sedangkan kelembaban udara terendah pada bulan September sebesar 67%. Adapun Tekanan Udara Maksimum sebesar 1.012,6 mb yang terjadi pada bulan Agustus dan minimum 1.008,3 mb pada bulan Pebruari. Adanya gejala alam seperti El Nino yang melanda sebagian wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, berpengaruh terhadap banyaknya hari hujan dan curah hujan. Hal ini terlihat dari banyaknya hari hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2013. Untuk curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 446 mm dan hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 3 mm.



1.2.2. Demografi

1.2.2.1. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 sebesar 423.029 jiwa, terdiri dari laki-laki 216.066 jiwa (51,08%) dan perempuan 206.963 jiwa (48,92%), dengan sex rasio sebesar 104, hal ini mengisyaratkan bahwa jenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada jenis perempuan. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemenuhan berbagai ragam aspek pelayanan, dengan jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan rentang waktu dari tahun 2007-2012, penduduk Kabupaten Sumbawa terus mengalami pertumbuhan, yakni dari jumlah penduduk sebesar 405.270 jiwa pada tahun 2007 menjadi 423.029 jiwa pada tahun 2012, dengan laju pertumbuhannya mencapai 0,86%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2007-2012

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepada tan (Jiwa/ Km ²)
			Laki	Perem.	Jumlah		
1.	Lunyuk	513,74	9.496	8.928	18.424	106	36
2.	Orong Telu	465,97	2.444	2.220	4.664	110	10
3.	Alas	123,04	14.478	14.133	28.611	102	233
4.	Alas Barat	168,88	9.535	9.167	18.702	104	111
5.	Buer	137,01	6.946	6.912	13.858	100	101
6.	Utan	155,42	14.786	14.459	29.245	102	188
7.	Rhee	230,82	3.658	3.361	7.019	109	30
8.	Batulantereh	391,40	5.399	4.934	10.333	109	26
9.	Sumbawa	44,83	29.070	28.248	57.318	103	1.279
10.	Lab. Badas	435,89	14.911	14.687	29.598	102	68
11.	Unter Iwes	82,38	9.503	8.963	18.466	106	224
12.	Moyohilir	186,79	11.423	11.061	22.484	103	120
13.	Moyo Utara	90,80	4.728	4.560	9.288	104	102
14.	Moyohulu	311,96	10.442	9.816	20.258	106	65
15.	Ropang	444,48	2.692	2.409	5.101	112	11
16.	Lenangguar	504,32	3.378	3.052	6.430	111	13
17.	Lantung	167,45	1.434	1.382	2.816	104	17
18.	Lape	204,43	8.433	7.968	16.401	106	80
19.	Lopok	155,59	9.031	8.839	17.870	102	115



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepada tan (Jiwa/ Km ²)
			Laki	Perem.	Jumlah		
20.	Plampang	418,69	14.530	13.789	28.319	105	68
21	Labangka	243,08	5.368	5.022	10.390	107	43
22.	Maronge	274,75	5.169	4.772	9.941	108	36
23.	Empang	558,55	11.335	10.697	22.032	106	39
24	Tarano	333,71	7.877	7.584	15.461	104	46
Jumlah		6.643,98	216.066	206.963	423.029	104	64
Th. 2011		6.643,98	214.387	205.602	419.989	104	63
Th. 2010		6.643,98	212.185	203.604	415.789	104	63
Th. 2009		6.643,98	210.487	202.008	412.495	104	62
Th. 2008		6.643,98	212.331	196.558	408.889	108	62
Th. 2007		6.643,98	210.458	194.812	405.270	108	61

Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2013 belum tersedia.

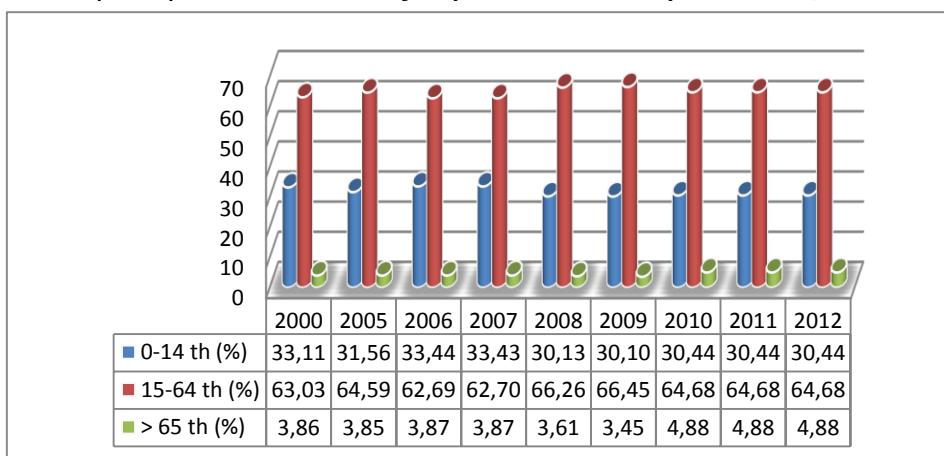
Berdasarkan tabel diatas, luas masing-masing wilayah Kecamatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, memperlihatkan bahwa Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan terpadat dibandingkan 23 kecamatan lainnya dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 1.279 jiwa/km². Sedangkan untuk Kecamatan yang terjarang penduduknya masih terdapat pada Kecamatan Orong Telu dengan jumlah penduduk sebesar 10 jiwa/km². Untuk penduduk Kabupaten Sumbawa bila diakumulasi sejumlah 423.029 jiwa terhadap luas wilayah 6.643,98 km², maka pada setiap km² dihuni oleh 64 jiwa. Hal ini menggambarkan Kabupaten Sumbawa masih jarang penduduknya, sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan suatu daerah menjadi daerah tujuan transmigrasi, akan tetapi kondisi ini harus tetap diwaspadai agar besaran penduduk dapat dipertahankan pada tingkatan tertentu, sehingga kondisi daerah dapat terjaga dari segi estetika, kenyamanan dan kesehatan penduduk, karena dari kondisi tersebut diharapkan penduduk tidak menjadi beban bagi pembangunan, akan tetapi dapat menjadi modal dalam pembangunan. Untuk itu peran serta semua lini terus ditingkatkan agar penduduk tersebut baik dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan dan pendapatannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun guna menghasilkan penduduk yang produktif, serta dapat berperan optimal dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan. Adapun struktur penduduk



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok umur, menggambarkan pada kelompok usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa/tua, hal ini terlihat dari rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 54,61%. Rasio ketergantungan ini menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (penduduk usia antara 15-64 tahun) terhadap kelompok tidak produktif (penduduk usia muda 0-14 tahun dan usia tua di atas 65 tahun) sebagai berikut.

- Proporsi penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) sebesar 30,44%
- Proporsi penduduk muda/produktif (15-64 tahun) sebesar 64,68%
- Proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sebesar 4,88%



Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2013 belum tersedia.

Gambar 1.1
Persentase Komposisi Penduduk Kab. Sumbawa Tahun 2000-2012

1.2.2.2. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan, karena angkatan kerja yang terserap dapat dijadikan sebagai modal pembangunan, sebaliknya akan berpeluang menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial bila tidak diarahkan secara bijak. Adapun kondisi Angkatan kerja dan pengangguran di Kabupaten Sumbawa, seperti terlihat pada tabel berikut.



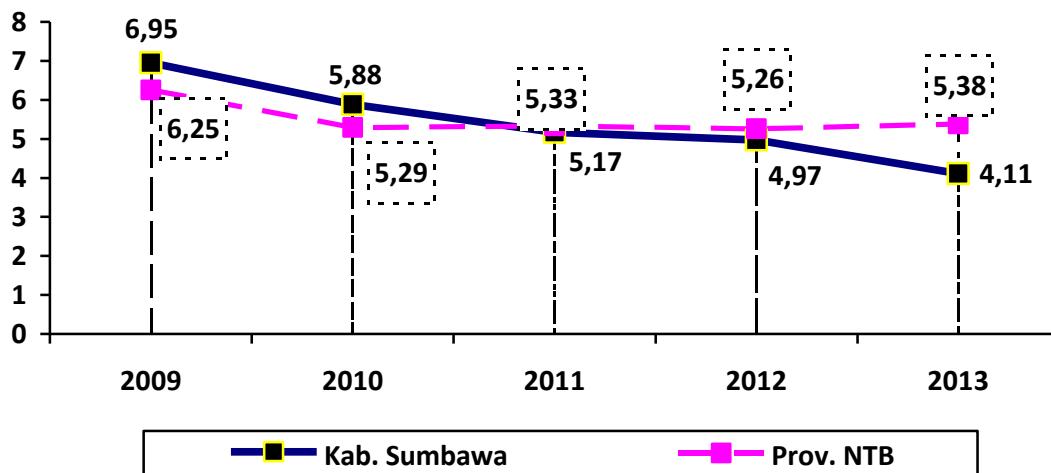
Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Tabel 1.3
Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kab. Sumbawa
Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Penduduk Usia Kerja	294.522	296.398	296.378
2	Penduduk Yang Bekerja	190.941	203.667	203.525
3	Pengangguran	10.412	10.644	8.729
4	Total Angkatan Kerja	201.353	214.311	212.254
5	Bukan Angkatan Kerja	93.169	82.087	84.124
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	68,37	72,31	71,62
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,17	4,97	4,11

Sumber data : BPS Kabupaten Sumbawa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 mencapai 71,62%, berada diatas rata-rata TPAK Provinsi NTB sebesar 65,44%. Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,11%, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata capaian provinsi NTB sebesar 5,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama dengan dunia usaha serta masyarakat ikut berperan aktif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa. Hal ini tergambar sebagai berikut.

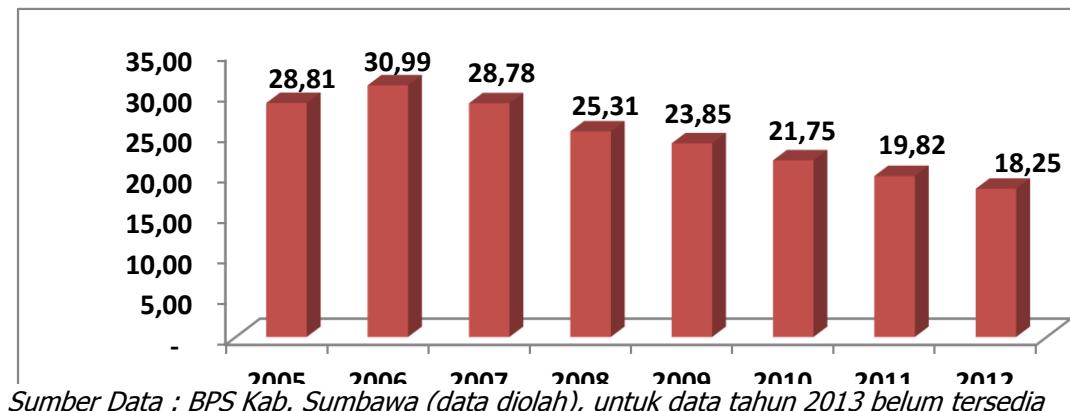


Gambar 1.2
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2009-2013



1.2.2.3. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pemahaman dan solusi yang tepat dalam penanganannya. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data BPS bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2005 berjumlah 112.409 jiwa (28,81% dari jumlah penduduk), pada tahun 2006 meningkat sebesar 125.045 jiwa (30,99% dari jumlah penduduk). Terjadinya peningkatan penduduk miskin pada tahun 2006 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM (mengurangi subsidi), karena dampak dari kebijakan tersebut harga kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup membebani masyarakat, sementara itu pendapatan yang diperoleh masyarakat tetap sama sehingga daya beli masyarakat menurun. Sedangkan pada tahun 2007 berjumlah 116.637 jiwa (28,78% dari jumlah penduduk), pada tahun 2008 menurun menjadi 103.490 jiwa (25,31% dari jumlah penduduk), di tahun 2009 menjadi 98.380 jiwa (23,85% dari jumlah penduduk), pada tahun 2010 turun menjadi 90.434 jiwa (21,75% dari jumlah penduduk). Demikian pula pada tahun 2011 penurunan kemiskinan sebesar 83.241 jiwa (19,82% dari jumlah penduduk) dan pada tahun 2012 tingkat kemiskinan sebesar 77.203 jiwa (18,25% dari jumlah Penduduk). Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk miskin mampu keluar dari kemiskinannya, hal ini ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kecendrungan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



Gambar 1.3
Persentase Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Tahun 2005-2012



Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumbawa memerlukan upaya dan langkah taktis yang terpadu, dilakukan secara bertahap, terencana, menyeluruh, terukur dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah dan DPRD), dunia usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin itu sendiri agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun rencana aksi penanggulangan kemiskinan antara lain difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan secara signifikan melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.

1.2.2.4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat guna mencetak SDM yang berkualitas, yakni dengan merubah pola pikir masyarakat dari statis tradisional menjadi dinamis rasional, oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa terus dipacu dan ditingkatkan, sehingga Angka Melek Huruf dan Lama sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari persentase penduduk, khususnya pada usia 15 – 24 tahun angka melek huruf sudah mencapai 100%. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 dengan rata-rata sebesar 7,64 tahun dari 7,21 tahun pada tahun 2011. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi, bila dibandingkan pencapaian Provinsi NTB sebesar 7,19 tahun. Untuk tingkat kelulusan ujian nasional SD/SMP Tahun 2012/2013 adalah pada jenjang SD sebesar 100%, SMP sebesar 98,68%. Sementara pada jenjang SMA/MA sebesar 99,74% dan SMK sebesar 100%.

1.2.3. Kondisi Ekonomi

1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah

Dengan keanekaragaman potensi sumberdaya dimiliki, Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang diminati oleh para investor untuk dapat berinvestasi. Untuk itu Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya dalam



peningkatan pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga dapat menjadi produk unggulan daerah, karena melalui produk unggulan daerah dapat tergambaran kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya serta memiliki daya saing yang tinggi.

Potensi komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa yang dapat dikembangkan antara lain adalah :

a. Potensi Peternakan

Kabupaten Sumbawa dengan kondisi wilayah dan potensi lahannya, yang sebagian besar berupa pegunungan, ditandai dengan topografi yang berbukit-bukit serta iklim yang agak kering dengan padang pengembalaan yang cukup luas, memberi peluang pengembangan ternak potong terutama sapi, kerbau dan kambing, sehingga telah dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan peternakan dengan menitikberatkan pada pengembangan komoditi unggulan spesifik lokalita dengan pola ekstensifikasi dan semi intensif pada upaya eksplorasi, pemuliabiakan dan pengembangan ternak serta pola Intensifikasi ternak untuk tujuan agribisnis.

Sejak Tahun 2011 berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 2909; 2910 dan 2017/kpts/OT.140/6/2011 telah ditetapkan rumpun sapi Sumbawa, kerbau Sumbawa dan kuda Sumbawa sebagai sumber daya genetik hewani unggul asal Kabupaten Sumbawa, sehingga dengan adanya penetapan rumpun ternak tersebut Kabupaten Sumbawa berkewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh ternak tersebut.

Berdasarkan potensi tersebut, terlihat pertumbuhan ternak besar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terutama pada populasi sapi bali dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar **12,08%** dan Sapi Sumbawa sebesar **19,69%**. Sementara untuk populasi Kuda Sumbawa dan Kerbau Sumbawa rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan yakni masing-masing sebesar **0,24%** dan **4,44%**. Penurunan ini antara lain disebabkan karena pada kedua ternak tersebut terjadi pengalihan fungsi, seperti pada ternak kuda yang sebelumnya dominan sebagai salah satu alat transportasi, akan tetapi peran tersebut bergeser karena alternative transportasi lainnya. Sedangkan untuk populasi kerbau yang selama ini digunakan sebagai alat untuk membajak sawah

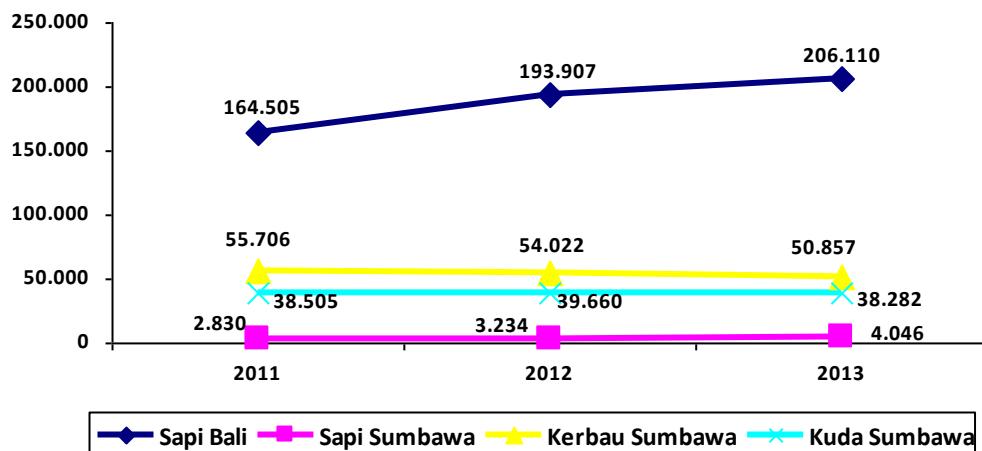


Pemerintah Kabupaten Sumbawa

mengalami pergeseran, karena derasnya sistem mekanisasi yang digunakan oleh masyarakat seperti Hand Traktor, sehingga mereduksi peran dan dominasi kerbau sebagai alat pembajakan. Kerbau dalam perkembangannya lebih banyak digunakan pada acara-acara bersifat budaya seperti barapan kerbau. Selain itu menurunnya populasi kerbau juga disebabkan masih maraknya pencurian ternak, kematian akibat serangan penyakit, pemotongan betina produktif, daya dukung lingkungan, reproduksi, penataan kuota pengiriman antar pulau, sehingga Pemerintah Daerah memformulasikan strategi melalui pembentukan Tim Pengkajian Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Kerbau dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah :

- 1). Melakukan survey terhadap kelayakan calon lokasi UPT perbibitan Kerbau Sumbawa;
- 2). Mengkaji model struktur kelembagaan dan dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- 3). Menganalisis sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4). Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengkajian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.

Adapun populasi ternak besar tergambar pada tabel berikut.

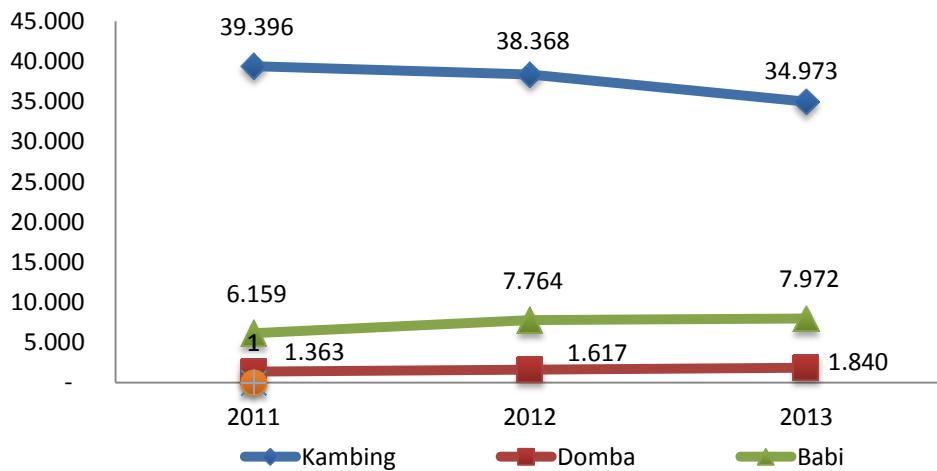


**Gambar 1.4
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013**

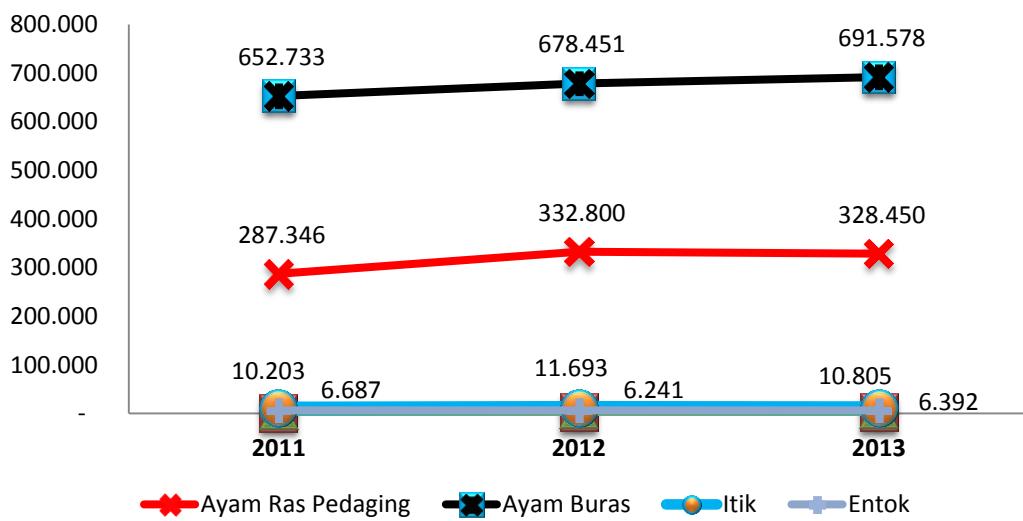


Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk perkembangan ternak kecil dan unggas di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.



Gambar 1.5
Perkembangan Populasi Ternak Kecil
di Kab. Sumbawa 2011-2013



Gambar 1.6
Perkembangan Populasi Unggas di Kab. Sumbawa 2011-2013

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil dan unggas pada periode 2011–2013, maka populasi domba mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 16,21%, babi sebesar 14,37%, ayam ras pedaging sebesar 7,26%, Ayam buras 2,94%, dan itik sebesar 3,50%, sedangkan untuk populasi kambing dan



entok mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,73% dan 2,13%.

Selain populasi ternak, keberadaan padang pengembalaan (LAR) yang merupakan padang pengembalaan umum milik bersama masyarakat sekitar seluas 26.470 Ha yang tersebar di 60 lokasi, ditambah dengan potensi padangan lainnya merupakan daya dukung bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Sumbawa. Selain itu Pemerintah Daerah juga telah membangun infrastruktur pendukung antara lain : Pembangunan Embung, Pembangunan Koda, irigasi tanah dangkal, jalan usaha tani, pengadaan bak air minum dll.

b. Potensi Kelautan dan Perikanan

Pemanfaatan luas sumber daya lahan perikanan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 seluas 1.210.000 Ha, dengan jumlah produksi perikanan mencapai 360.825,65 ton (106,65%) dari target sebesar 338.326,74 ton. Jumlah produksi perikanan ini dihasilkan dari perikanan tangkap dengan realisasi sebesar 48.649,00 Ton dan perikanan budidaya sebesar 312.176,65 Ton. Bila dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2012 sebesar 241.779,20 Ton, maka terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan sebesar 49,24% dibanding tahun sebelumnya.

Pengembangan penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan konsep pengembangan wilayah, meliputi 4 wilayah pengembangan, yaitu :

- a). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Kecamatan Alas Barat. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Alas, Buer dan Utan.
- b). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Kecamatan Labuhan Badas. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Rhee, Moyo Utara dan Moyo Hilir.
- c). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Timur dengan pusat pengembangan Kecamatan Plampang (Teluk Santong). Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Tarano, Plampang, Maronge dan Lape.



d). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Lunyuk. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Labangka dan Ropang.

Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum banyak dilakukan di bendungan-bendungan besar seperti Bendungan Batu Bulan (volume air 56 Juta m³), Bendungan Mamak (32,5 juta m³), Bendungan Tiu Kulit (10,8 juta m³), dan Bendungan Gapit (10,3 juta m³). Sistem budidaya yang dianggap memungkinkan untuk dilakukan adalah sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas budidaya berupa ikan mas (*Cyprinus carpio L.*), nila gift (*Oreochromis niloticus*) dan nila merah (*Tilapia nilotica*).

Kabupaten Sumbawa dalam pembangunan kelautan dan perikanan di dasarkan pada konsep pengembangan kawasan minapolitan yang dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan dengan 2 (dua) komoditas unggulan yaitu rumput laut dan udang. Adapun kawasan minapolitan tersebut meliputi :

1. Kawasan Minapolitan Bagian Timur, dengan pusat pertumbuhan (minapolis) di Empang dan hinterland meliputi Kecamatan Tarano, Plampang, Maronge dan Lape. Adapun arahan pengembangan wilayah berdasarkan komoditas unggulan adalah rumput laut dan udang. Pertimbangan ditetapkannya Kecamatan Empang sebagai minapolis, karena :

- Kota Empang telah berkembang menjadi kota perdagangan di tingkat kecamatan.
- Adanya terminal angkutan yang melayani trayek menuju ke kecamatan hinterland, sehingga akses transportasi menuju kecamatan hinterland berjalan lancar.
- Adanya perbankan seperti BRI dan BSK.
- Adanya pasar tradisional sebagai daerah pemasaran komoditi perikanan.

2. Kawasan Minapolitan Bagian Tengah, dengan pusat pertumbuhan (minapolis) di Kecamatan Labuhan Badas, dengan hinterland Kecamatan Moyo Hilir sebagai sentra produksi rumput laut, Kecamatan Labuhan Badas sebagai sentra produksi Rumput Laut dan Kecamatan Moyo Utara sebagai sentra produksi Udang. Pertimbangan ditetapkannya Kecamatan Labuhan Badas sebagai pusat pertumbuhan, karena :



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Labuhan Badas telah tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga Kota Sumbawa.
- Adanya terminal kabupaten yang melayani trayek menuju ke daerah hinterland.
- Adanya pelabuhan barang dan pangkalan pendaratan ikan.
- Adanya pasar tradisional dan kawasan wisata kuliner pantai goa sebagai daerah pemasaran hasil perikanan.
- Adanya perbankan seperti BRI dan BPR Sumbawa.

3. Kawasan Minapolitan Bagian Barat, dengan pusat pertumbuhan (Minapolis) di Kecamatan Alas, dengan hinterland Kecamatan Alas Barat sebagai sentra produksi rumput laut, Kecamatan Buer sebagai sentra produksi rumput laut, dan Kecamatan Utan sebagai sentra produksi udang dan rumput laut. Pertimbangan ditetapkannya Kecamatan Alas sebagai pusat pertumbuhan, karena :

- Kota Alas telah tumbuh sebagai pusat perdagangan di Sumbawa bagian barat.
- Adanya terminal yang melayani trayek menuju ke daerah hinterland.
- Adanya pelabuhan barang labuhan Alas.
- Adanya pasar tradisional sebagai daerah pemasaran hasil perikanan.
- Adanya perbankan seperti BRI dan Bank NTB.

Selain memiliki potensi hayati yang berlimpah dari sektor kelautan dan perikanan, terdapat juga potensi non hayati yaitu pengembangan garam rakyat diwilayah pesisir. Adapun potensi yang dapat dikembangkan untuk usaha garam sebesar 3.500 Ha yang tersebar dari Kecamatan Alas sampai Tarano. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan salah satu program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam.

Untuk pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, masih didominasi usaha skala mikro dan kecil, yang memiliki beberapa keterbatasan baik menyangkut kualitas sumberdaya manusia, permodalan, akses pasar dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan produktivitas usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada umumnya masih rendah. Adapun sentra pengolahan yang ada di Kabupaten Sumbawa adalah:



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- a. Sentra pengolah terasi dan masin di wilayah Kec. Tarano meliputi Lab. Bontong dan Lab. Aji.
- b. Sentra pengolahan rumput laut di Ngeru dan Lab. Terata.
- c. Sentra pengolahan bandeng presto di Penyaring, Lab. Kuris dan Lab. Mapin.
- d. Sentra wisata kuliner ikan bakar pantai Goa Desa Karang Dima.
- e. Sentra ikan kering dan pindang di Lab. Sumbawa, Sangoro, Jontal, Teluk Santong, Lab. Jambu, P.Kaung, Bungin, Lab. Bajo, dan Lab. Mapin.

Sebagian besar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih menerapkan teknologi sederhana yang menghasilkan produksi primer, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh rendah. Hal ini mendorong terjadinya pemborosan sumberdaya perikanan, karena untuk mendapatkan margin yang besar dalam usaha pengolahan diperlukan tingkat eksloitasi yang besar juga. Untuk keberadaan prasarana pengolahan berupa cold storage dan pabrik es berjumlah 4 (empat) buah dengan kapasitas produksi masing-masing 5-10 ton per hari yang berlokasi di Sumbawa Besar, Karang Dima, Teluk Santong dan Alas. Produksi tersebut masih rendah dibandingkan dengan produksi ikan yang dihasilkan masyarakat nelayan. Sarana pengolahan lainnya yaitu adanya unit pengeringan ikan tenaga surya sebanyak 3 unit yang berada di Labuhan Ijuk, Teluk Santong, dan Labuhan Jambu.

Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 Kecamatan, 18 Kecamatan diantaranya adalah kecamatan pesisir yang berada di pesisir utara dan selatan. Dari 18 Kecamatan pesisir tersebut terdapat 63 desa yang tergolong desa pesisir atau 38,2% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sumbawa. Demikian pula dengan potensi lainnya adalah dengan keberadaan 62 buah pulau-pulau kecil, 6 diantaranya berpenghuni : Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Pulau Medang, Pulau Ngali dan Pulau Tapan (Gili Tapan) serta tidak berpenghuni 56 buah. Pulau-pulau kecil tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.



c. Potensi Pertanian

1. Komoditi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan khususnya padi memiliki peranan pokok dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perluasan areal dan manajemen lahan serta penyempurnaan manajemen, sehingga pembangunan pertanian yang dicita-citakan dapat terwujud.

Adapun komoditi tanaman pangan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 1.4
Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2013**

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Padi	90.886	460.849	50,71
2	Jagung	38.139	195.024	51,14
3	Kedelai	4.796	7.304	15,23
4	Kacang Hijau	14.399	15.475	10,75
5	Kacang Tanah	3.670	4.528	12,34

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa (Angka Sementara)

1). Padi

Tanaman padi sebagai komoditi pangan pokok merupakan komoditi yang dominan, karena padi menjadi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumbawa, hal ini tergambar dari **luas panen** yang meningkat seluas 4.862 ha (5,65%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 seluas 90.886 ha dan pada tahun 2012 seluas 86.024 ha. Demikian juga dengan **produksi** meningkat sebesar 42.360 ton (10,12%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total produksi pada tahun 2013 sebesar 460.849 ton dan pada tahun 2012 sebesar 418.489 ton, dengan Peningkatan **produktivitas** sebesar 2,06 kw/ha (4,23%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana produktivitas pada tahun 2013 sebesar 50,71 kw/ha dan pada tahun 2012 sebesar 48,65 kw/ha.



2). Jagung

Jagung merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Sumbawa karena memiliki keunggulan kompetitif yaitu berupa kecerahan biji yang sempurna serta produktivitas tinggi. Adapun **Luas panen** mengalami peningkatan seluas 2.905 ha (8,24%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 seluas 38.139 ha dan pada tahun 2012 seluas 35.234 ha. Demikian pula dengan **produksi** meningkat sebesar 2.633 ton (1,37%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 195.024 ton dan pada tahun 2012 sebesar 192.391 ton. Sedangkan untuk **produktivitas** jagung mengalami penurunan sebesar 3,47 kw/ha (6,35%), dimana pada tahun 2013 sebesar 51,14 kw/ha dan pada tahun 2012 sebesar 54,60 kw/ha.

3). Kedelai

Komoditi kedelai di Kabupaten Sumbawa baik dari segi luas panen maupun produksinya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2013 komoditi kedelai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari **luas panen** kedelai di Kabupaten Sumbawa yang mengalami peningkatan seluas 1.668 ha (53,32%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana luas panen pada tahun 2013 sebesar 4.796 ha dan pada tahun 2012 seluas 3.128 ha. Demikian pula dengan **produksi** kedelai meningkat sebesar 4.176 ton (133,50%), dimana produksi pada tahun 2013 sebesar 7.304 ton dan pada tahun 2012 sebesar 3.128 ton. Untuk **produktivitasnya** meningkat sebesar 5,23 kw/ha (52,29%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana produktivitas pada tahun 2013 sebesar 15,23 kw/ha dan pada tahun 2012 sebesar 10,00 kw/ha. Terhadap peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan produksi kedelai antara lain dengan mengoptimalkan penyaluran benih-benih berkualitas serta peningkatan pengetahuan petani tentang tata cara pembudidayaan kedelai dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

4). Kacang Hijau

Kacang hijau merupakan salah satu komoditi yang banyak dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, seperti varietas Kacang Hijau Sampeong. Varietas ini



merupakan varietas lokal unggulan yang memiliki rasa dan aroma kacang hijau yang kuat serta daya simpan yang lebih lama. Kondisi kacang hijau baik luas panen maupun produksinya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari **luas panen** yang menurun sebesar 2.912 ha (16,82%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 14.399 ha dan pada tahun 2012 seluas 17.311 ha. Hal ini terjadi karena adanya peralihan tanam dari kacang hijau ke jagung dan kedelai. Demikian pula dari sisi **produksi** yang mengalami penurunan sebesar 5.537 ton (26,35%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 15.475 ton dan pada tahun 2012 sebesar 21.012 ton. Untuk **produktivitas** juga mengalami penurunan sebesar 1,39 kw/ha (11,46%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 10,75 kw/ha dan pada tahun 2012 sebesar 12,14 kw/ha.

5). Kacang Tanah

Kacang tanah di Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kacang tanah dari daerah lain karena jumlah biji perpolongnya berjumlah tiga bahkan lebih dengan kondisi fisik polong yang besar dan berisi. Adapun perkembangan kacang tanah dari **luas panen** mengalami peningkatan sebesar 2.736 ha (292,93%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana luas panen kacang tanah pada tahun 2013 sebesar 3.670 ha dan pada tahun 2012 sebesar 934 ha. Demikian pula dengan **produksi** meningkat sebesar 3.545 ton (360,63%) dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 4.528 ton dan pada tahun 2012 sebesar 983 ton. Untuk **produktivitas** mengalami peningkatan sebesar 1,81 kw/ha (17,23%), dimana pada tahun 2013 sebesar 12,34 kw/ha dan pada tahun 2012 sebesar 10,52 kw/ha.

1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/PDRB

PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah. Dari nilai PDRB ini akan menggambarkan kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah. Adapun nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Sumbawa rentang tahun



2010 – 2012 mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2010 – 2012

Tahun	PDRB ADH (Juta Rp.)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan (2000)	Berlaku	Konstan (2000)
2010	3.967.121	1.832.932	14,87	5,92
2011	4.640.545	1.959.389	16,98	6,90
2012	5.204.850	2.092.657	12,16	6,80

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2012)

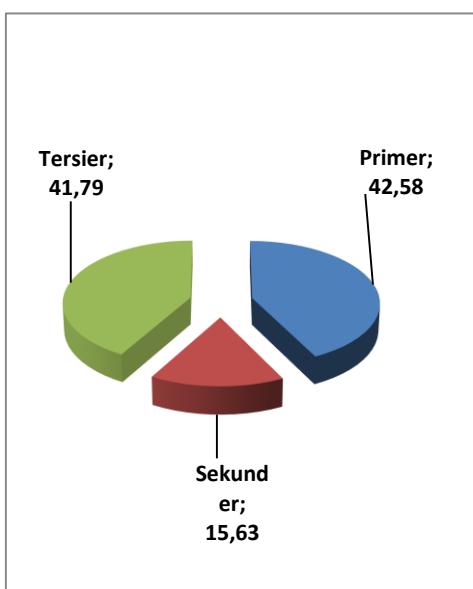
PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 mencapai Rp. 5,204 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,16 % dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai Rp. 4,640 triliun. Sedangkan untuk kinerja perekonomian daerah tergambar dalam PDRB ADH Konstan. Perekonomian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012, tumbuh sebesar 6,80 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan total PDRB meliputi sektor bangunan sebesar 8,62%, diikuti sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 8,37%, sektor listrik, gas & air bersih sebesar 8,30% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,08% serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,98%, sedangkan sektor lainnya berada dibawah laju pertumbuhan total PDRB dengan laju pertumbuhan terendah disektor jasa-jasa sebesar 4,11%.

Perekonomian Kabupaten Sumbawa masih didominasi oleh **sektor primer** (*sektor pertanian* dan *sektor pertambangan & penggalian*). Pada tahun 2011 sektor primer mendominasi dengan nilai kontribusi sebesar 42,58%, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan kontribusi menjadi 42,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian walaupun merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa, akan tetapi sektor ini tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang, mengingat lahan pertanian yang semakin berkurang, sehingga perlu dilirik sektor lainnya sebagai penopang sektor pertanian. Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang besar adalah **sektor tersier** (*sektor perdagangan & restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Bank, usaha persewaan & jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa*). Pada tahun 2011 sektor tersier ini memberikan

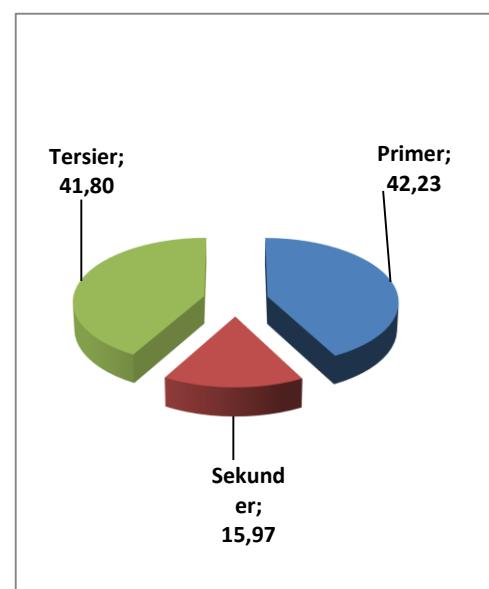


Pemerintah Kabupaten Sumbawa

kontribusi sebesar 41,79%, dan mengalami peningkatan nilai kontribusi pada tahun 2012 sebesar 41,80%. Adapun sumbangannya terbesar dari sektor tersier ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang selama 3 tahun berturut-turut memberikan kontribusi yang meningkat yakni dari tahun 2010 sebesar 19,59%, tahun 2011 sebesar 19,62% dan pada tahun 2012 sebesar 19,96%, sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan kontribusi selama 3 tahun berturut-turut, seperti sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 14,08%, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan & komunikasi dan sektor Bank, usaha persewaan dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 5,31% dan 2,45%. Sektor terakhir adalah **sektor sekunder** (*sektor industri; listrik, gas & air bersih, dan sektor bangunan*) yang pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 15,63% dan pada tahun 2012 sebesar 15,97%. Diantara ketiga sektor pembentuk sektor sekunder, yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor bangunan sebanyak 12,49%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 2,96% dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,52%.



Gambar 1.7.
Kontribusi Sektor-sektor Primer, Sekunder dan
Tersier Terhadap PDRB Kab. Sumbawa
Tahun 2011



Gambar 1.8.
Kontribusi Sektor-sektor Primer, Sekunder dan
Tersier Terhadap PDRB Kab. Sumbawa
Tahun 2012



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Sebagai indikator tingkat kemakmuran penduduk biasanya digunakan PDRB Per Kapita yang memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. Informasi ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRBnya. Terhadap PDRB per kapita ADH Berlaku di Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan sebesar 11,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 11.049.207,- menjadi Rp. 12.303.766,- pada tahun 2012. Demikian pula dengan PDRB perkapita ADH Konstan meningkat sebesar 6,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada pada tahun 2011 sebesar Rp 4.665.333,- menjadi Rp. 4.946.839,- pada tahun 2012.



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa periode tahun 2011 – 2015 adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Berdayasaing Dalam Memantapkan Samawa Mampis Rungan"**.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Sumbawa :

Kumpulan orang per orang dengan beragam latar belakang suku, ras dan agama yang bertempat tinggal pada wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.

2. Berdaya Saing :

- kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.
- kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
- masyarakat berdaya saing merupakan kondisi masyarakat Sumbawa yang mampu bersaing secara sehat yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumbawa.

3. Memantapkan Samawa Mampis Rungan.

- Secara harfiah **Samawa Mampis Rungan** berarti Sumbawa yang menebarkan kabar baik. **Samawa Mampis Rungan** merupakan bagian dari syiar masyarakat Sumbawa yang berkehendak tenteram secara spiritual religius (**senap semu**), rukun damai secara sosial (**riam remo**) dan makmur secara material-ekonomis (**nyaman nyawe**).
- Memantapkan kondisi Kabupaten Sumbawa yang Makmur Aman Mandiri, Partisipatif, Inovatif dan Sehat yang bersendikan Semangat Religius, Ulet dan uNggul, Gotong royong, Akuntabel dan transparaN, mengandung pengertian mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya sekaligus



memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai.

- Memantapkan terwujudnya Samawa Mampis Rungan dilakukan dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pengembangan potensi agribisnis wilayah yang didukung oleh infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari.

2.1.2. Misi

Sebagai pencerminkan dari upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa, dijabarkan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Makna misi pertama ini dimaksudkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan didukung oleh semangat yang religius serta terciptanya suasana yang mendukung untuk peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat. Melalui misi pertama juga dilakukan optimalisasi sumberdaya manusia yang semakin mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam keberagaman, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan tetap mengedepankan kesadaran dan penegakan hukum.

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Makna misi kedua ini dimaksudkan untuk pengembangan budaya inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, serta misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Melalui misi kedua juga memberikan perhatian pada persoalan-persoalan sosial masyarakat terutama dalam mengantisipasi pengaruh era global yang cenderung memberi pengaruh besar kehidupan sosial tersebut.



Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Makna misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, "mara tali ontar telu", antara *pemerintah - dunia usaha - masyarakat* dalam mengisi pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu kata kunci dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sumbawa, serta misi menciptakan rasa aman dan mandiri. Terciptanya rasa aman akan menjadi jaminan bagi berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Kemandirian masyarakat diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subjek yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat.

Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Makna misi keempat ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia. Dalam periode tahun 2011-2015 diupayakan pemantapan dan peningkatan daya dukung baik infrastruktur maupun suprastruktur sehingga perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Makna misi kelima ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, "mara tali ontar telu", antara *pemerintah - dunia usaha - masyarakat* dalam mengisi pembangunan. Misi memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, juga merupakan langkah untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa mendatang terutama terkait dengan kelestarian alam lingkungan hidup.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD (2011-2015)

Agenda pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD 2011-2015 merupakan keberlanjutan dari RPJMD tahun 2006–2010 dengan mengedepankan tahapan identifikasi terhadap berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi terbaik akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Penguatan partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan.	1	Memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam kegiatan keagamaan.
2	Penguatan partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.	2	Memperkuat partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.
3	Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan situs-situs benda cagar budaya		
4	Peningkatan prasarana pengembangan seni budaya daerah		
5	Membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat yang menghargai pluralitas.	3	Mengembangkan wawasan kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang menghargai pluralitas.
6	Meningkatkan intensitas komunikasi forum antaragarama/antarbudaya		
7	Mengsinergikan aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.	4	Meningkatkan sinergitas aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.
8	Sinergitas kegiatan sosialisasi, penyadaran dan penegakan hukum antara institusi penegak hukum dan elemen masyarakat.	5	Menurunkan tingkat pelanggaran hukum dan peningkatan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Strategi		Arah Kebijakan	
9	Sinkronisasi pendanaan pendidikan.	6	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan masyarakat mulai dari jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi.
10	Optimalisasi sarana prasarana pendidikan.		
11	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran pendidikan.	7	Meningkatkan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.
12	Mengembangkan wawasan SDM kependidikan		
13	Meningkatkan sarana dan prasarana	8	Meningkatkan budaya baca



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Strategi		Arah Kebijakan	
	perpustakaan.		masyarakat.
14	Sinkronisasi pendanaan kesehatan .	9	Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
15	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran kesehatan.	10	Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
16	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBS		
17	Optimalisasi sarana parsarana kesehatan.	11	Meningkatkan mutu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
18	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
19	Revitalisasi program Keluarga Berencana.	12	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesadaran keluarga berencana.
20	Peningkatan partisipasi publik dalam perlindungan anak.		
21	Sinkronisasi pendanaan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber.	13	Meningkatkan pelayanan, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial.
22	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran kesejahteraan sosial.		
23	Optimalisasi sarana parsarana kesejahteraan sosial.		
24	Penajaman program kesejahteraan sosial.		
25	Menciptakan ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan	14	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
26	Meningkatkan even olahraga edukasi dan olahraga prestasi	15	Meningkatkan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi
27	Meningkatkan rasio prasarana olahraga prestasi		

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Strategi		Arah Kebijakan	
28	Artikulasi dan sosialisasi komitmen pimpinan unit kerja terhadap agenda reformasi birokrasi.	16	Menerapkan Standar Operasional dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
29	Implementasi Pelayanan Prima		



Strategi		Arah Kebijakan	
30	Membangun kesadaran anti korupsi.	17	Melaksanakan agenda reformasi birokrasi, pakta anti korupsi, dan peningkatan akuntabilitas organisasi pemerintah daerah. serta akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan penerimaan daerah.
31	Penerapan SIMPEG terpadu dalam pengurusan administrasi kepegawaian.	18	Meningkatkan pelayanan admnitrasи kepegawaian dan kualitas SDM aparatur
32	Meningkatkan petugas pelayanan adminisitrasi publik.	19	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
33	Meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat.	20	Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
34	Memantapkan sistem internal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan daerah.
35	Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	22	Meningkatkan sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
36	Mengembangkan layanan gerak dalam pelayanan KTP dan akta kependudukan	23	Meningkatkan pelayanan adminitrasи publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil serta kearsipan.
37	Meningkatkan percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan batas wilayah		
38	Meningkatkan SDM arsiparis		
39	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip		
40	Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan administrasi perkantoran.	24	Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan manajemen teknis SKPD
41	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.		
42	Meningkatkan dukungan anggaran bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan.		

Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agribisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.



Strategi		Arah Kebijakan	
43	Pendanaan tahun jamak dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.	25	Meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka kelancaran aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan agribisnis.
44	Meningkatkan ketersediaan prasarana wilayah terutama untuk membuka akses wilayah potensial terisolir		
45	Meningkatkan kondisi prasarana wilayah		
46	Kerjasama dengan asosiasi dalam rangka pembinaan kualitas pekerjaan rekanan.	26	Meningkatkan kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
47	Pemberian subsidi dalam pengembangan rumah layak huni.	27	Meningkatkan kualitas dan kuantitas permukiman layak huni yang didukung oleh utilitas yang memadai.
48	Meningkatkan penataan lingkungan permukiman		
49	Pengembangan kerjasama dengan PT. Pos dan PT. Telkom.	28	Meningkatkan pemanfaatan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.
50	Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur.		
51	Meningkatkan ketersediaan terminal dan shelter, prasarana perhubungan laut pembuka akses pulau-pulau kecil potensial		
52	Sinergi dan Optimalisasi prasarana dan sarana transportasi antarmoda.	29	Meningkatkan pengembangan industri kreatif dan kelancaran perdagangan serta perlindungan konsumen.
53	Pengembangan kerjasama dengan maskapai penerbangan.		
54	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak konsumen.		
55	Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi.	30	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi.
56	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perizinan		
57	Pemantapan zonasi kawasan strategis dan sinergi program lintas sektor pada kawasan strategis.	31	Mengembangkan kawasan strategis, wilayah transmigrasi dan wilayah pedesaan.
58	Sinergi program PT. PLN dan PT. Pertamina.	32	Meningkatkan pelayanan kelistrikan dan pengawasan perdagangan migas.



Strategi		Arah Kebijakan	
59	Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan		
60	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis.	33	Meningkatkan keberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis.
61	Sinergi program dengan lembaga keuangan bank dan non bank dalam penciptaan wirausahawan baru dan penguatan kelembagaan koperasi, BUMDes dan UMKM.		
62	Pemberian insentif dalam pengembangan Koperasi, BUMDes dan UMKM berbasis agribisnis.		
63	Revitalisasi manajemen usaha Koperasi, BUMDes dan UMKM.		
64	Peningkatan populasi dan produktivitas petani	34	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani tanaman pangan.
65	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.		
66	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.	35	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani peternak.
67	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan.	36	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
68	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan.	37	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani perkebunan.
		38	Mengintensifkan kegiatan penyuluhan.
69	Sinergi program nasional, provinsi dibidang kepariwisataan.	39	Meningkatkan daya tarik dan kemitraan kepariwisataan.
70	Meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi wisata.		
71	Meningkatkan promosi wisata dan destinasi wisata		

Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Strategi		Arah Kebijakan	
72	Melengkapi regulasi penataan ruang dan konsistensi dalam penegakan hukum tata ruang.	40	Meningkatkan kualitas penataan ruang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya.
73	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian persampahan dan pencemaran lingkungan	41	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan



Strategi		Arah Kebijakan	
			hidup.
74	Mengembangkan kerjasama dengan BMG dan Pusat Penelitian Kegeologian.	42	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.
75	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus ilegal logging, illegal mining and illegal fishing.		
76	Sosialisasi mitigasi bencana.	43	Meningkatkan mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana.
77	Optimalisasi potensi sumberdaya hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terutama melalui pengelolaan kawasan eks Perum Perhutani dan peluang memanfaatkan <i>carbon trade</i> (perdagangan karbon)	44	Menurunkan tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
78	Sinergi rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan.		

2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

Prioritas pembangunan daerah tahun 2013, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2011-2015. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi;
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi;
3. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun);
4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
5. Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik;
7. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa;



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

8. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
9. Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
10. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga;
11. Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimanya. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah tahun 2013 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tidak menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari skim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada SKPD atau unit kerja pada SKPD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.



- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

2. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), baik DBH-Pajak maupun DBH-Sumber Daya Alam berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2013.
2. Penganggaran DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-CHT. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Gubernur belum ditetapkan, maka penganggaran DBH-CHT didasarkan pada alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2011. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DBH-CHT tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
3. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak/gas/pertambangan lainnya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH minyak/gas/pertambangan lainnya didasarkan pada alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasi perkembangan harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun 2013



dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun 2013, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

4. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2012 ditambah besarnya kenaikan gaji dan tunjangan serta acres gaji sebesar 2,5% dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2011, Apabila Peraturan Presiden tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
5. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh pagu alokasi DAK Tahun Anggaran 2013 setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh DAK Tahun Anggaran 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam peraturan



daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

3. Lain-Lain Pendapan Daerah Yang sah

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA jika pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
2. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2013 mendahului APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2011, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampaunan target Tahun Anggaran 2012, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
3. Bila terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah daerah.

4. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013 disahkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2013 kemudian mengalami perubahan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, menyebutkan bahwa target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar **Rp. 974.265.950.877,84,-** terealisasi sebesar **Rp. 955.210.212.910,97,-** atau mencapai 98,04%. Sementara pada tahun 2012 dari target sebesar **Rp. 856.858.021.196,19,-** terealisasi sebesar **Rp. 848.097.391.056,64,-** atau mencapai 98,98%. Rincian atas jumlah pendapatan dan realisasinya pada tahun 2013, disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2013

No	Uraian	Target Pendapatan Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN	974.265.950.877,84	955.210.212.910,97	98,04
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.069.462.997,66	67.729.734.821,30	92,69
1.1.	Pajak Daerah	12.522.961.000,00	14.203.436.160,00	113,42
1.2.	Retribusi Daerah	31.490.621.100,00	28.842.949.088,00	91,59
1.3	Pengelolaan Kekayaan	18.987.199.771,00	13.630.990.071,00	71,79



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

		Daerah yang Dipisahkan			
	1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.068.681.126,66	11.052.359.502,30	109,77
2.	DANA PERIMBANGAN	773.377.009.935,00	770.932.327.333,00	99,68	
	2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	45.899.716.935,00	43.455.034.333,00	94,67
	2.2.	Dana Alokasi Umum	647.640.513.000,00	647.640.513.000,00	100,00
	2.3.	Dana Alokasi Khusus	79.836.780.000,00	79.836.780.000,00	100,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	127.819.477.945,18	116.548.150.756,67	91,18	
	3.1.	Pendapatan Hibah	1.516.789.900,00	1.441.664.994,00	95,05
	3.2.	Dana BHPajak dari provinsi & pemerintah daerah lainnya	28.860.427.045,18	18.664.224.762,67	64,67
	3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	96.342.261.000,00	96.342.261.000,00	100,00
	3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	1.100.000.000,00	100.000.000,00	9,09

Sumber Data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan pada tahun 2013, bila dilihat dari sisi nominal mengalami peningkatan sebesar 12,63%, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp. 848.097.391.056,64,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 955.210.212.910,97,-, akan tetapi bila dilihat dari sisi pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,95%, dibandingkan tahun 2012. Penurunan capaian ini terjadi pada Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 0,28% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 10,78%. Sedangkan pendapatan dari PAD mengalami peningkatan sebesar 8,60%, dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara lebih lengkap mengenai target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2013 disampaikan melalui laporan tersendiri.

3.1.3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun Anggaran 2013 mencapai 98,04%, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 92,62%, Dana Perimbangan sebesar 99,68% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 98,18%. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target tersebut adalah sebagai berikut.



1. Pajak Hiburan

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui pajak hiburan (16,53%), disebabkan karena, dari beberapa komponen pajak hiburan tidak mencapai target, seperti pajak hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana (43,51%), komponen pajak hiburan pacuan kuda, pertandingan olahraga dan kendaraan bermotor masing-masing (0,00%). Rendahnya setoran komponen pajak hiburan tersebut antara lain disebabkan karena pada beberapa event/pagelaran kesenian /musik/tari/busana dalam penyelenggarannya sebagian besar tanpa penjualan karcis/tanda masuk, dan cenderung bersifat hiburan umum/hiburan rakyat dan bersifat insidentil.

2. Pajak Air tanah

Pendapatan yang dihasilkan melalui pajak Air Bawah Tanah (72,59%) tidak mencapai target disebabkan karena masih terbatasnya pemanfaatan air tanah oleh pihak ketiga.

3. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui komponen Pajak Batu Hias dan Pajak Batu Tiang masing-masing (0,00%) disebabkan karena permintaan batu hias dari Bali dan Surabaya sangat rendah. Demikian pula dengan pendapatan yang dihasilkan melalui pajak pasir Urug (31,43%) disebabkan karena karena permintaan masyarakat untuk pembangunan/kontruksi masih rendah, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Terhadap pendapatan yang dihasilkan melalui pajak tanah liat yang belum mencapai target dengan realisasi sebesar 97,71%, disebabkan karena terjadi karena terjadi pergeseran trend penggunaan atap rumah dari genteng dengan bahan dasar tanah liat yang beralih ke Genteng Metal, sehingga permintaan masyarakat untuk keperluan pembangunan/konstruksi mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari komponen pajak pasir urug pada tahun 2012 sebesar 75,34%, maka terjadi peningkatan sebesar 29,69%.

Realisasi pendapatan dari sektor **Hasil Retribusi Daerah (91,59%)**, disebabkan karena beberapa komponen retribusi daerah tersebut tidak mencapai target, seperti :



1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum dengan capaian yang rendah (87,26%) disebabkan antara lain, karena dari beberapa komponen retribusi masih rendah, terdiri dari :

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Rendahnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan (89,44%), disebabkan diantaranya:

- a) Pada pelayanan poli jiwa, poli kulit kelamin, Askes tidak ada realisasi (0%) dan pada poli/ ruangan lainnya yang tidak mencapai target disebabkan karena pasien yang berobat merupakan pasien jaminan sehingga pendapatan yang diterima menjadi pendapatan pasien jaminan (Askes, Jamkesmas, Jamkesmas NTB), sedangkan tidak terealisasinya retribusi melalui Askes (15 persen dari 60 persen jasa sarana) karena belum adanya payung hukum yang mengatur tentang persentase pendapatan yang bersumber dari Askes.
- b) Terhadap target pendapatan jamkesmas pusat, jamkesmas NTB dan Askes, bahwa target yang diperhitungkan berdasarkan estimasi rata-rata jumlah klaim, sedangkan realisasi diperhitungkan berdasarkan klaim tahun berjalan sehingga target pendapatan tidak dapat terealisasi seluruhnya.
- c) Tingkat kesehatan masyarakat meningkat atau tingkat morbiditasnya (tingkat kesakitannya) menurun sehingga berkurangnya jumlah masyarakat yang datang berobat/ berkunjung ke Puskesmas

- **Retribusi Pelayanan Persampahan**

Rendahnya realisasi retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 66,64%, yang terdiri dari sampah kelurahan (BPMLH) sebesar 91,89% dan sampah pasar sebesar (Diskoperindag) sebesar 62,69%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena adanya beberapa bagian pasar yang direhab pada tahun 2013, sehingga sebagian wajib pajak tidak membayar retribusi sampah tersebut.

- **Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil**

Rendahnya realisasi retribusi Penggantian biaya KTP dan Akta Catatan Sipil (86,20%), disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, sementara dalam pengurusan akta catatan sipil



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

lainnya sesuai ketentuan dan persyaratan harus dilengkapi dengan akta kelahiran. Kondisi ini karena adanya regulasi berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 27 ayat (1) dimana setiap kelahiran dilaporkan dan dicatat ditempat terjadinya peristiwa kelahiran, sementara pemohon sebagian besar lahir diluar Kabupaten Sumbawa. Selain itu rendahnya pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) Konvensional, karena disaat yang bersamaan masyarakat yang wajib Kartu Tanda Penduduk mendapat pelayanan KTP elektronik di tiap-tiap kecamatan, sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai.

- **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Realisasi retribusi parkir ditepi jalan umum (39,63%) tidak mencapai target, disebabkan karena adanya perubahan sistem pemungutan, dimana pada tahun 2012 menggunakan sistem kerjasama dengan pihak ketiga melalui mekanisme setor dimuka, akan tetapi pada tahun 2013, pihak ketiga selaku pemungut belum dapat mencapai *Break Even Point* yang diharapkan pada 6 (enam) bulan masa kerjasama, sehingga pihak ketiga meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumbawa agar dapat memberikan masa tenggang/perpanjangan masa pemungutan. Hal ini tidak dapat disepakati karena bertentangan dengan kesepakatan awal, sehingga pemungutan kembali ke metode semula, dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumbawa menunjuk beberapa rekanan yang bersedia melaksanakan pemungutan di titik-titik parkir yang telah ditetapkan dengan sistem bagi hasil.

- **Retribusi Pelayanan Pasar**

Rendahnya realisasi retribusi pelayanan pasar (64,63%), apabila dibandingkan dengan tahun 2012 dengan realisasi sebesar 70,92%, terjadi penurunan sebesar 8,87% disebabkan karena keterbatasan daya dukung sumberdaya penagihan di pasar serta lemahnya pengawasan ditingkat lapangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Selain hal tersebut juga terjadi rehabilitasi terhadap beberapa bagian bangunan pasar sehingga hilangnya sebagian penerimaan retribusi pelayanan pasar.



2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar **111,94%**, meskipun telah mencapai target, akan tetapi terdapat komponen retribusi yang tidak mencapai target, antara lain :

- **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Rendahnya realisasi pasar Grosir (79,36%), disebabkan karena terjadi rehabilitasi terhadap beberapa bagian bangunan pasar sehingga hilangnya sebagian penerimaan retribusi pelayanan pasar.

- **Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Rendahnya realisasi retribusi tempat pelelangan (64,22%), disebabkan karena fasilitas pelabuhan yang belum memadai sehingga fungsi pelabuhan pendaratan ikan tidak optimal yang mengakibatkan kegiatan bongkar muat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

- **Retribusi Terminal**

Rendahnya realisasi retribusi terminal (62,19%), disebabkan karena banyaknya aktifitas bongkar muat penumpang/barang tidak dilakukan didalam terminal, sehingga retribusi terminal tidak dapat mencapai target.

- **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Rendahnya realisasi retribusi tempat rekreasi (55,34%), disebabkan antara lain karena sarana dan prasana pendukung yang belum optimal, sehingga jumlah kunjungan relatif masih rendah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar 131,71%, meskipun telah mencapai target, akan tetapi terdapat komponen retribusi yang tidak mencapai target, seperti:

1. Retribusi Izin Trayek

Rendahnya retribusi izin Trayek (76,33%), disebabkan jumlah kendaraan angkutan penumpang umum (angkutan kota dan angkutan perdesaan) yang menjadi kewenangan kabupaten mengalami penurunan tiap tahun. Peningkatan jumlah kendaraan di kabupaten sumbawa sebagian besar adalah kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang.



Realisasi **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (71,79%)**, disebabkan karena beberapa komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut tidak mencapai target, seperti rendahnya realisasi dari pendapatan PT. DMB, disebabkan karena tidak adanya setoran yang diterima dari PT. DMB pada tahun 2013.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan solusi terbaik sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, seperti :

1. Terhadap belum tercapainya target penerimaan **pajak hiburan** dapat dilakukan antara lain dengan memperbanyak even-even penyelenggaraan pagelaran kesenian yang disertai dengan syarat tanda masuk (karcis) dan dilakukan porporasi (stempel) karcis ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sehingga terdata jumlah penghasilan dari karcis yang terjual.
2. Terhadap upaya peningkatan realisasi pajak **Air tanah** perlu sosialisasi secara intensif, sehingga wajib pajak punya pemahaman akan kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada komponen **batu hias** dapat ditingkatkan dengan cara mengintensifkan akses pasar lainnya, sehingga permintaan pasar dapat diperluas. Demikian pula dengan realisasi pada komponen **pasir urug** dapat ditingkatkan dengan cara pemantauan dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu.
4. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa umum dapat tertangani antara lain melalui upaya pemberian terhadap masing-masing komponen yang ada seperti :
 1. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**
 - a) Untuk Pendapatan Askes PAD dibuatkan dasar hukum dalam bentuk SK tentang pendapatan 15% dari 60 jasa sarana;
 - b) Pelayanan pada poli jiwa, poli kulit kelamin dan poli penunjang lainnya, ditugaskan dokter spesialis penunjang sehingga pasien yang dirujuk akan berkurang, selama ini banyak pasien pada poli yang tidak memiliki dokter spesialis tidak dapat melakukan tindakan dikarenakan tidak adanya dokter spesialis yang menangani. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

dokter spesialis penunjang dengan cara bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk menugaskan dokter spesialis residen;

- c) Terkait dengan pelayanan Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Askes, dikarenakan realisasi pendapatan berdasarkan klaim, maka perlu adanya peningkatan sarana prasarana seperti penambahan ruang kelas III beserta sarana penunjang lainnya. Secara umum, pendapatan dapat meningkat apabila sarana prasarana terpenuhi diantaranya: tersedianya sistem informasi manajemen, perbaikan infrastruktur dan penugasan dokter spesialis penunjang.

2. **Retribusi Pelayanan Persampahan**

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana persampahan secara bertahap, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

3. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Upaya yang dilakukan adalah melalui penyetoran tepat waktu, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

4. **Retribusi Pelayanan Pasar**

Perlu ditingkatkan sistem penagihan yang intensif sesuai dengan Perda yakni setiap hari dengan penambahan tenaga penagih.

5. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa usaha dapat tertangani antara lain melalui upaya pemberian terhadap masing-masing komponen yang ada seperti :

1. **Retribusi Terminal**

Peningkatan retribusi terminal dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap semua AKDP, AKAP dan Angdes yang melewati terminal harus masuk kedalam terminal sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

2. **Retribusi Tempat Rekreasi**

Peningkatan capaian target retribusi tempat rekreasi antara lain seperti Saliper Ate akan diupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaannya, sehingga kedepan dapat lebih tertata dengan harapan jumlah pengunjung dapat meningkat, yang berdampak terhadap



meningkatnya retribusi daerah.

6. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi Perizinan Tertentu dapat tertangani antara lain melalui upaya pemberahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti : Retribusi Izin Trayek, yakni dengan peningkatan kenyamanan dan keamanan penumpang menggunakan angkutan umum.
7. Terhadap rendahnya pendapatan dari PT. DMB, sesuai hasil rapat pemegang saham, maka pembayaran deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa baru terealisasi pada tahun 2015 Sesuai dengan surat Direktur Utama PT.DMB No.06/DMB/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014.

Untuk optimalisasi capaian target pendapatan tahun yang akan datang, maka diharapkan semua SKPD pengelola pendapatan membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) disertai dengan penetapan target yang rasional.

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Terkait Total Perkiraan Belanja

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perencanaan belanja daerah disusun dengan pendekatan surplus/defisit yang terkendali. Artinya bisa jadi perencanaan belanja lebih besar dibandingkan perencanaan pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran, maka defisit anggaran tersebut harus dapat tertutupi dengan pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Agar pembiayaan netto dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, maka perencanaan pembiayaan dirancang dengan kondisi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran maka surplus anggaran tersebut akan digunakan pada pengeluaran pembiayaan. Sehingga pada kondisi akhir pos anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun



Berjalan (SILPA) dalam posisi nol.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara teknis penganggaran, kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Belanja Tidak langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013.

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiu serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 2) Belanja Bunga
- Apabila terdapat kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, maka dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2013.
- 3) Belanja Subsidi
- Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau pendapatan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan bagi hasil pemerintah desa dari kabupaten dalam APBD kabupaten harus diuraikan kedalam daftar nama desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c) Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan melakukan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan, sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

2) Belanja Pegawai

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitung-kan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.
- b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

- e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggarannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

4) Belanja Modal

- a) Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

- b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013

Belanja Daerah dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bahwa target belanja daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah sebesar **Rp. 1.030.824.626.109,47,-** atau meningkat dibandingkan target tahun anggaran 2012 yaitu sebesar **Rp. 929.427.076.837,05,-**. Dari rencana belanja tersebut, hingga akhir bulan Desember 2013 terealisasi sebesar **Rp. 944.630.633.597,41,-** atau **91,64%** dari target dalam APBD Tahun 2013, nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang terealisasi sebesar **91,61%** dari target APBD Tahun 2012.

3.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih terjadi pada belanja daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Proporsi Belanja Daerah

Masih lebih besarnya proporsi belanja tidak langsung (60,63%) dibandingkan dengan belanja langsung (39,37%), hal ini terjadi karena kebutuhan belanja pegawai yang masih besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas.

2. Realisasi Belanja



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Realisasi belanja daerah pada tahun 2013 sebagai gambaran serapan APBD Tahun 2013 hanya mencapai 91,64%. Tidak terealisasinya seluruh APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2013, disebabkan karena beberapa faktor, seperti adanya efisiensi belanja, pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sehingga realisasi pembayaran yang tidak 100% dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sehingga pembayarannya tidak terealisasi. Secara rinci gambarannya sebagai berikut.

1. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, berupa pekerjaan pembangunan tambatan perahu Labuhan Sangoro dengan realisasi keuangan 50%.
2. Pada Sekretariat Daerah, berupa :
 - Pengadaan mobil ambulance dengan realisasi 0%.
 - Pembangunan Aula Gedung Kantor Camat Lunyuk dengan realisasi keuangan 65%.
 - Pembangunan Pagar Keliling Kantor Camat Batu Lanteh dengan realisasi keuangan 0%.
 - Pembangunan Pagar Keliling Kantor Camat Unter Iwes dengan realisasi keuangan 0%.
 - Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Camat Moyo Hulu dengan realisasi keuangan mencapai 90,66%, akan tetapi pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya tidak selesai, sehingga dilakukan pemutusan kontrak.
 - Rehab Total Gedung Kantor Camat Alas Barat dengan realisasi 29,98%.
 - Pengadaan Tanah Balai Pembibitan Ternak Kerbau dengan realisasi keuangan 0%).
3. Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pengjerjaannya pada tahun 2013, seperti :
 - Pembangunan RKB SDN Pelita Kec. Orong Telu dengan realisasi keuangan 67,47%, kondisi disebabkan karena jembatan penghubung di kec.orong telu terputus akibat bencana banjir, sehingga mengalami kesulitan dalam droping bahan.
 - Pengadaan Peralatan Lab. Biologi SMA dengan realisasi keuangan 95,59%.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Pengadaan Peralatan Lab. Biologi SMK dengan realisasi keuangan 94,68%
 - Pengadaan Peralatan Lab. Fisika SMK dengan realisasi keuangan 79,76 %)
 - Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia SMK dengan realisasi keuangan 62,04%.
 - Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia SMA dengan realisasi keuangan 59,84%.
4. Pada Dinas Peternakan, berupa :
- Pengadaan Ternak Sapi dari target 494 ekor, terealisasi 171 ekor (realisasi 34,62%) putus kontrak.
 - Pengadaan Ternak Kambing dari target 1.170 ekor, terealisasi 394 ekor (realisasi 33,68%) putus kontrak.
 - Pembangunan Poskeswan Lantung (realisasi 90,24%) putus kontrak.
5. Pada Dinas Pekerjaan Umum, berupa :
- Pekerjaan Jembatan Nanga Talo dengan realisasi keuangan 0%.
 - Pekerjaan Air Bersih Sebasang dengan realisasi keuangan 0%.

Terhadap seluruh paket tersebut telah diusulkan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2014

Solusi dari permasalahan tersebut diupayakan antara lain dengan terus dilakukan peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta melakukan rasionalisasi dan efisiensi pada belanja-belanja tidak langsung. Terhadap keterlambatan penyerapan anggaran diperlukan langkah-langkah percepatan dimasa yang akan datang dengan upaya pelaksanaan jadwal secara ketat.



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka negara kesatuan RI dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam penjabarannya diatur tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan, dimana prinsip dari amanat tersebut menjadi pijakan sekaligus kerangka umum penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah yang dirangkum dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun rincian masing-masing urusan dimaksud serta program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

4.1. Urusan Wajib

4.1.1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) urusan dan 85 (delapan puluh lima) program nasional yang dilaksanakan oleh kabupaten menjadi urusan wajib dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi. Pelaksanaannya di Kabupaten Sumbawa sebagaimana diamanatkan UU tersebut disajikan sebagai berikut.



**Tabel 4.1
Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013**

No.	Urusan Wajib	Program
1	2	3
1.	Urusan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.	Urusan Kesehatan	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.



No.	Urusan Wajib	Program
3.	Urusan Lingkungan Hidup	18. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 7. Program Pembangunan /Penataan Taman dan Penerangan Jalan
4.	Urusan Pekerjaan Umum	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Darainase/Gorong-gorong 3. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 12. Program Pengawasan JasaKonstruksi 13. Program Pembinan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 14. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5.	Urusan Penataan Ruang	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang



No.	Urusan Wajib	Program
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan	3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 4. Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota Besar dan Menengah 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
7.	Urusan Perumahan	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
8.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 3. Program Pembinaan dan Permasarakatan Olahraga 4. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
9.	Urusan Penanaman Modal	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invenstasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
10.	Urusan Koperasi dan UKM	1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil



No.	Urusan Wajib	Program
		<ul style="list-style-type: none">3. Menengah3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi5. Program Pengembangan KSP/USP Koperasi dan LKM6. Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD
11.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none">1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
12.	Urusan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
13.	Urusan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
14.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">1. Program Keluarga Berencana2. Program Pelayanan Kontrasepsi3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak



No.	Urusan Wajib	Program
16	Urusan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas6. Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos dan Telekomunikasi7. Program Peningkatan Akses Informasi dan Keselamatan Penerbangan
17.	Urusan Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa4. Program Pegembangan Teknologi Informatika5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
18.	Urusan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none">1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah2. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
19.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)5. Program Pendidikan Politik Masyarakat6. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum7. Program Pencegahan Dini dan



No.	Urusan Wajib	Program
20.	Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah dan Persandian	<p>8. Penangulangan Korban Bencana Alam</p> <p>9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>11. Program Sarana dan Prasarana Logistik Bencana</p> <p>12. Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal</p> <p>1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</p> <p>2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>4. Program Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM</p> <p>7. Program Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah</p> <p>8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>9. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama</p> <p>10. Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</p> <p>11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p> <p>13. Program Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi</p> <p>14. Program Analisis Jabatan</p> <p>15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembangunan</p> <p>16. Program Pengembangan dan Penataan Kecamatan</p> <p>17. Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah</p> <p>18. Program Pengembangan Kelompok Drumband</p> <p>19. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian</p>



No.	Urusan Wajib	Program
21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>20. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 21. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 22. Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 23. Program Peningkatan Kapasitas UPT 24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Program Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan Daerah 28. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 29. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian 33. Program Fasilitas Purna Tugas /Wafat CPNS, PNS dan Honorer Daerah 34. Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha 35. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 36. Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan 37. Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan 38. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan</p> <p>1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Program Pengembangan dan Penataan</p>



No.	Urusan Wajib	Program
22.	Urusan Sosial	<p>Desa dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya)6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23.	Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
24.	Urusan Statistik	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Data dan Informasi
25.	Urusan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan3. Program Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan4. Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan
26.	Urusan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Uraian kegiatan masing-masing program disajikan pada lampiran

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program Pada Urusan Wajib

4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, telah ditempuh diantaranya kegiatan peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sebagai implementasi dari kebijakan inisiasi Wajar 12



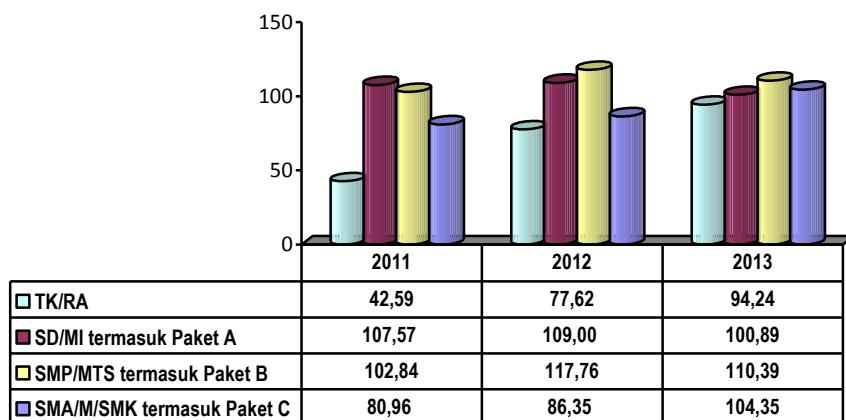
Pemerintah Kabupaten Sumbawa

tahun, kemudian pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, hingga pemerataan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dalam bentuk kejar paket A, B dan C. Capaian akhir (*outcome*) dari penyelenggaraan berbagai urusan wajib bidang pendidikan dapat dilihat dari cakupan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah dengan ditunjukkan oleh perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berikut disajikan APK dan APM masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Secara umum perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013 disajikan sebagai berikut



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 4.1
Perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM
di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Gambar 4.1 memperlihatkan salah satu capaian penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan dari tahun 2011-2013. Pada indikator APK jenjang TK/RA, mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 51,83%, hal ini menunjukkan keberhasilan dari penyelenggaraan program PAUD di Kabupaten Sumbawa, yakni dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun non formal yang telah dibangun, serta semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang SD/MI.

Untuk APK pada jenjang SD/MI mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 3,06%. Penurunan ini, tidak berarti penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tersebut capaiannya rendah, sepanjang capaiannya tidak di bawah 100, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi internal, dimana idealnya APK sama dengan APM mengarah pada angka 100%.

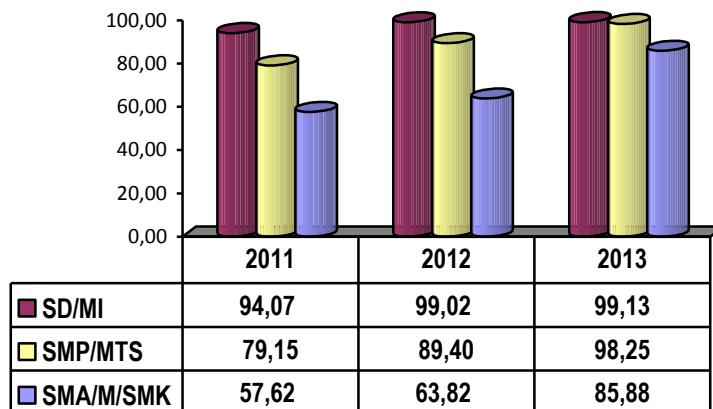
Terhadap APK pada jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 4,12%. Demikian pula dengan APK pada jenjang SM meningkat rata-rata pertahun sebesar 13,75%. Pesatnya peningkatan pertumbuhan APK pada jenjang pendidikan PAUD dan SM, serta pelambatan pertumbuhan APK SD/MI menunjukkan trend yang benar pada upaya mewujudkan pemerataan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2011-2013

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa APM dari tahun 2011-2013 pada semua jenjang, baik pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini ditandai oleh peningkatan rata-rata pertahun seperti APM SD/MI sebesar 2,69%, APM SMP/MTs sebesar 11,42% dan APM SM meningkat sebesar 22,32%.

c. Lembaga Pendidikan

Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah selain kesadaran masyarakat (orang tua dan anak didik), juga akses masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan (sekolah) baik pendidikan dasar maupun menengah. Adapun sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kab. Sumbawa Tahun 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN			
			TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SM/SMK/MA
1	Lunyuk	7	15	20	7	4
2	Orong Telu	4	2	12	3	1
3	Alas	8	12	20	8	3
4	Alas Barat	8	8	15	4	3
5	Buer	6	9	12	5	1



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN			
			TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SM/SMK/MA
6	Utan	9	8	20	6	3
7	Rhee	4	6	8	2	1
8	Batulan teh	6	9	16	6	3
9	Sumbawa	8	19	27	9	12
10	Labuhan Badas	7	9	24	9	5
11	Unter Iwes	8	10	18	6	2
12	Moyo Hilir	10	23	21	8	2
13	Moyo Utara	6	5	10	3	1
14	Moyo Hulu	12	18	22	8	2
15	Ropang	5	2	18	3	1
16	Lenangguar	4	2	7	3	1
17	Lantung	4	2	8	2	0
18	Lape	4	13	15	5	1
19	Lopok	7	15	17	4	1
20	Plampang	11	13	25	11	3
21	Labangka	5	2	10	4	1
22	Maronge	4	7	9	3	1
23	Empang	10	13	21	6	3
24	Tarano	8	8	20	6	1
Jumlah		165	230	395	131	56

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas seperti di Kecamatan Lantung, hal ini disebabkan karena masih minimnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tersebut, sehingga untuk saat ini masih belum menjadi prioritas dalam pembangunannya. sedangkan keberadaan SD/MI, dan SMP/MTs sudah tersedia merata di seluruh kecamatan.

d. Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, Rombel dan Ruang Kelas

Ketersediaan fasilitas gedung sekolah, guru dan ruang kelas yang memadai akan menentukan tumbuhnya minat belajar siswa, hal ini tergambar pada tabel berikut.



Tabel 4.3
Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, Rombel dan Ruang Kelas

No	Uraian	TK/RA		SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
		12/13	13/14	12/13	13/14	12/13	13/14	12/13	13/14
1.	Jumlah Sekolah	185	230	391	395	122	131	55	56
2.	Jumlah Siswa	7.571	8.048	52.765	53.883	26.352	27.735	17.145	21.196
3.	Jumlah Guru	728	744	5.356	5.453	2.151	2.181	1.575	1.687
4.	Jumlah Rombel	364	458	2.912	3.394	817	1.013	486	499
5.	Jumlah Ruang Kelas	368	485	2.330	2.503	715	932	403	418

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. TK/RA

Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan TK/RA di tahun 2013 terdapat sebanyak 230 unit, dan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 185 gedung sekolah, maka terjadi peningkatan gedung sekolah sebanyak 45 unit atau 24,32%. Jumlah gedung sekolah TK/RA tersebut, bila dibandingkan dengan jumlah anak pada usia 4-6 tahun sebanyak 24.901 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 92,37 sekolah untuk menampung per 10.000 anak usia 4-6 tahun. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 744 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 8.048 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 924,45 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 murid. Hal ini mengindikasikan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa.

2. SD/MI

Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di tahun 2013 terdapat sebanyak 395 unit, dan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 391 gedung sekolah, maka terjadi peningkatan gedung sekolah sebanyak 4 unit atau 1,02%. Jumlah gedung sekolah SD/MI tersebut, bila



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 54.355 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 72,67 sekolah untuk menampung per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 2.151 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 53.883 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 1.012,01 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa.

3. SMP/MTs

Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di tahun 2013 terdapat sebanyak 131 unit, dan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 122 gedung sekolah, maka terjadi peningkatan gedung sekolah sebanyak 9 unit atau 7,38%. Jumlah gedung sekolah tersebut, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 24.131 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 54,29 sekolah untuk menampung per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 2.181 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 27.735 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 786,37 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa.

4. SMA/SMK/MA

Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di tahun 2013 terdapat sebanyak 56 unit, dan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 55 gedung sekolah, maka terjadi peningkatan gedung sekolah sebanyak 1 unit atau 1,82%. Jumlah gedung sekolah tersebut, bila dibandingkan dengan penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 21.759 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 25,74 sekolah untuk menampung per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Demikian pula dengan keberadaan guru sebanyak 1.687 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 21.196 orang, maka dihasilkan rasio sebesar 795,90 guru yang tersedia untuk melayani per 10.000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru masih besar dalam melayani siswa.



Demikian pula dengan gambaran rasio rombongan belajar dan ruang kelas serta rasio siswa dan ruang kelas, disajikan sebagai berikut.

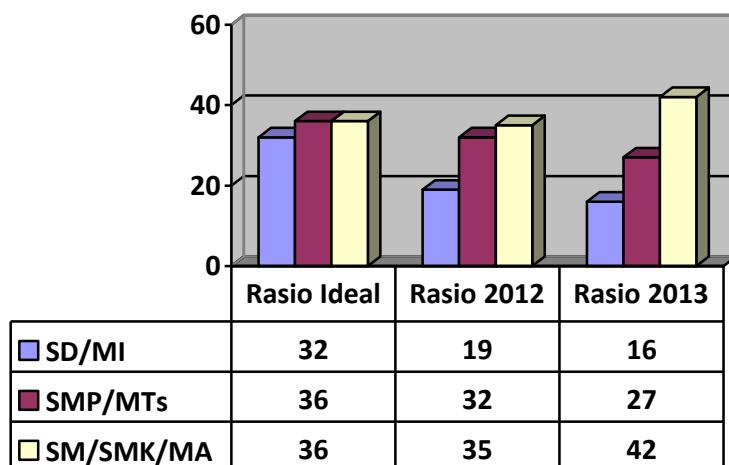
Rasio Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

Rasio rombongan belajar dan ruang kelas menggambarkan perbandingan antara jumlah kelas (rombongan belajar) dengan jumlah ruang kelas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Rasio terbaik dicapai bila jumlah rombongan belajar sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (100%). Bila rasio menunjukkan angka di atas 100% berarti masih terjadinya *double shift* penggunaan ruang kelas, sebaliknya bila di bawah 100% berarti adanya ruang kelas yang tidak dipergunakan sebagai ruang belajar.

Pada tahun 2013 di semua jenjang pendidikan telah terjadi peningkatan pada jumlah ruang kelas dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi penambahannya masih dibawah peningkatan jumlah rombongan belajar. Untuk jenjang pendidikan **SD/MI** terjadi kekurangan sebanyak 891 ruang kelas, dan pada jenjang **SMP/MTs** serta jenjang **SM** masing-masing terjadi kekurangan sebesar 81 ruang kelas. Hal ini menggambarkan bahwa pada semua jenjang pendidikan rasio rombel dan ruang kelas masih berada diatas 100%, sehingga masih terjadi *double shift* penggunaan ruang kelas.

Rasio Siswa dan Rombongan Belajar

Rasio siswa per rombel menunjukkan jumlah siswa yang ditampung pada setiap rombongan belajar/kelas. Pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa rata-rata siswa per rombel/kelas pada masing-masing jenjang pendidikan.



**Gambar 4.3
Rasio Siswa dan Rombongan Belajar Pada Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2013**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan, setiap rombongan belajar pada jenjang SD/MI paling banyak 32 siswa, SMP 36 siswa dan SMA/SMK 36 siswa. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2012 di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan jenjang SMA telah mendekati SPM, sedangkan pada tahun 2013 terjadi pengurangan jumlah siswa di setiap rombongan belajar pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sementara pada jenjang SM/SMK/MA melebihi rasio ideal SPM.

e. Pendidikan Non Formal dan Informal

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, maka telah diprogramkan pendidikan non formal dan informal (PNFI), diantaranya melalui jalur pendidikan paket A, B dan C.

**Tabel 4.4
Siswa Paket A, B dan C di Kab. Sumbawa (2011-2013)**

No	Tahun	Paket A		Paket B		Paket C	
		Siswa	Siswa 7-12	Siswa	Siswa 13-15	Siswa	Siswa 16-18
1.	2011/2012	221	24	1.666	314	716	120
2.	2012/2013	80	12	1.405	204	1.170	158
3.	2013/2014	0	0	1.050	80	1.080	97

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa



f. Angka Melek Huruf

Pendidikan yang dilaksanakan selama ini khususnya melalui jalur non formal lewat program Keaksaraan Fungsional (KF) telah berdampak positif dan signifikan pada pencapaian Kabupaten Sumbawa menurunnya angka buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf. Ukuran yang sangat mendasar dari angka melek huruf dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk umur 15 tahun keatas. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 99,89%.

Adapun keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2013 dalam bidang pendidikan diantaranya :

1. Penghargaan Tingkat Nasional, pada Olimpiade Sains SD sebagai Juara Harapan pada mata pelajaran Matematika an. Lauhul Afiat Kahfi dan Irsan Triadi, serta lomba dengan kategori Passing Grade Nasional pada mata pelajaran IPS an. Fathinah Ulfa. Selain itu, prestasi nasional juga diraih oleh siswa an. Yori Sujarta Utama dari SMAN 1 Sumbawa Besar yang terpilih sebagai Paskibraka Nasional. Demikian pula dengan Lembaga Paud yang masuk sebagai Nominasi 12 Lembaga Paud Terbaik Tingkat Nasional.
2. Untuk penghargaan ditingkat Provinsi, Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi, diantaranya :
 - a). Juara I Lomba Gugus TK.
 - b). Lomba Olimpiade Sains SMA, sebagai Juara I an. Ahmad Suyoko pada mata pelajaran Biologi, Wira Ardiansyah pada mata pelajaran Astronomi, Nathania Islamay Endah Cahyaning pada mata pelajaran Kebumian, Rade Christiawati Sitorus pada mata pelajaran Ekonomi, Sainul Ikhsan pada mata pelajaran IPA (Fisika, Biologi, Kimia) Iklusi dan Urnia Hasanah pada mata pelajaran Karya Ilmiah Iklusi.
 - c). Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), berhasil meraih Juara I pada Lomba Catur an. Mifta Hurrizki dan Ogi Septian Syahputra. Pada cabang Atletik untuk Putra dan Putri meraih Juara I an. Muhammad Amin, Syamsul Amri dan Perti Armis Sorika Sopyanti. Untuk Lomba Senam Putra dan Putri berhasil



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

meraih Juara I an. M. Fauzan dan Septia Yuana Zantia. Demikian pula pada Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA, berhasil meraih Juara I kategori Pencak Silat di kelas F Putri an. Anggi Karisma Putri. Pada cabang Atletik lari 60 meter putri juga berhasil meraih Juara I an. Sri Astuti. Untuk mata lomba Lompat Jauh Putra dan Lari 100 meter keluar sebagai Juara I dan II Putra an. Rainer Aris To Tandi.

- d). Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi, berhasil meraih juara I pada kategori Industrial Control an. Deri Sudarta, Sirajuddin pada kategori Nautika Kapal penangkap Ikan dan Diyat Effendi pada kategori Feshery mata lomba Agribisnis Perikanan.
- e). Lomba Paskibraka Tingkat Provinsi an.Yori Sujarta Utama, Putri Deanti Rizki M, dan Sri Windayani, serta Andes Priambodo. demikian juga untuk kategori lainnya berhasil meraih juara II dan juara III.

Berdasarkan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2013 yang ditetapkan dalam penetapan kinerja SKPD, maka tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 92,37% dari total belanja yang dianggarkan Dinas Pendidikan Nasional tahun 2013 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara rinci realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.

4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga arah kebijakan dilaksanakan melalui upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat serta menurunkan angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS serta Malaria. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai upaya antara lain melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Kecamatan maupun desa, sehingga akses layanan kesehatan yang



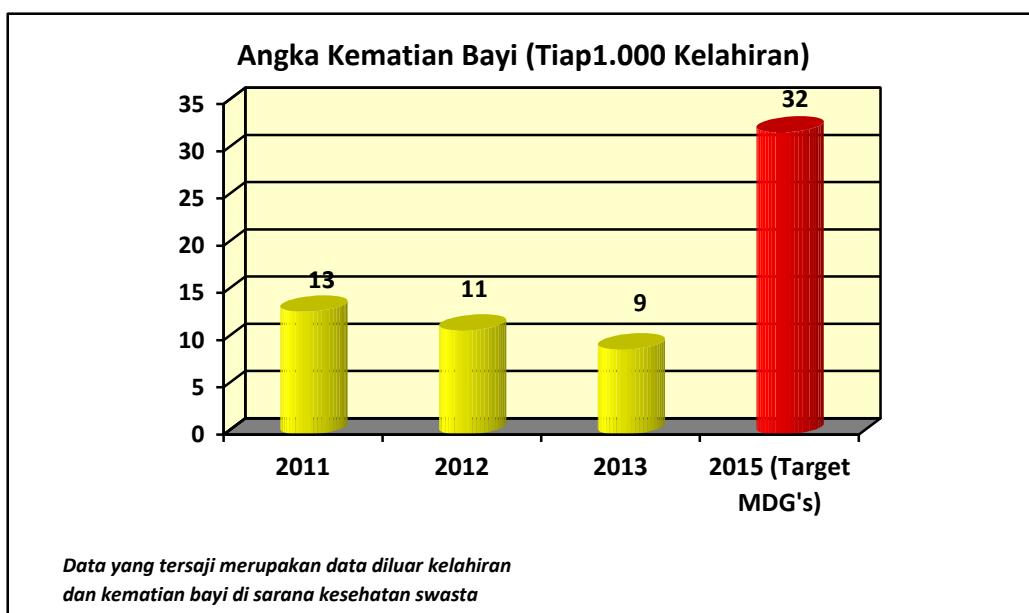
Pemerintah Kabupaten Sumbawa

bermutu bagi masyarakat melalui pemerataan dan keterjangkauan dapat terwujud, hal ini ditandai dengan terbangunnya 25 puskesmas (10 unit berstatus UPT. Puskesmas Perawatan dan 15 UPT Puskesmas Non Perawatan), 42 polindes, dan 93 Puskesmas Pembantu. Untuk puskesmas pembantu dalam mendukung pelayanan kesehatan diwilayah kecamatan keberadaannya sangat penting yakni, minimal rasio 1 : 3 artinya setiap 1 puskesmas didukung oleh 2-3 puskesmas pembantu. Demikian pula dengan ketersediaan posyandu, pada tahun 2012 dan 2013 terdapat sebanyak 647 posyandu (109 posyandu Pratama, 306 posyandu Madya, 203 posyandu Purnama, dan 30 posyandu Mandiri), bila dibandingkan dengan jumlah posyandu pada tahun 2011 sejumlah 624 posyandu, maka terjadi peningkatan sebesar 23 posyandu (3,69%), hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya posyandu menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan jumlah posyandu yang ada, bila dibandingkan dengan jumlah balita di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sebesar 91.649 balita, maka rasio posyandu terhadap balita sebesar 7,06 artinya dalam setiap 1.000 balita mampu dilayani oleh 7 posyandu.

Untuk keberadaan jumlah tenaga dokter di Kabupaten Sumbawa, baik dokter PNS dan PTT berjumlah 89 orang (53 di Dinas Kesehatan dan 36 di RSUD) dengan rasio 0,21, artinya setiap 1.000 penduduk hanya mampu terlayani oleh 2 dokter, sehingga ketersediaan tenaga dokter masih kurang atau belum mencapai jumlah ideal dibandingkan jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa, akan tetapi dari tahun ke tahun terus dilakukan peningkatan terhadap jumlah tenaga dokter tersebut. Disamping itu keberadaan tenaga paramedis juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Untuk jumlah paramedis di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sebanyak 812 orang (539 di Dinas Kesehatan dan 273 di RSUD).

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.



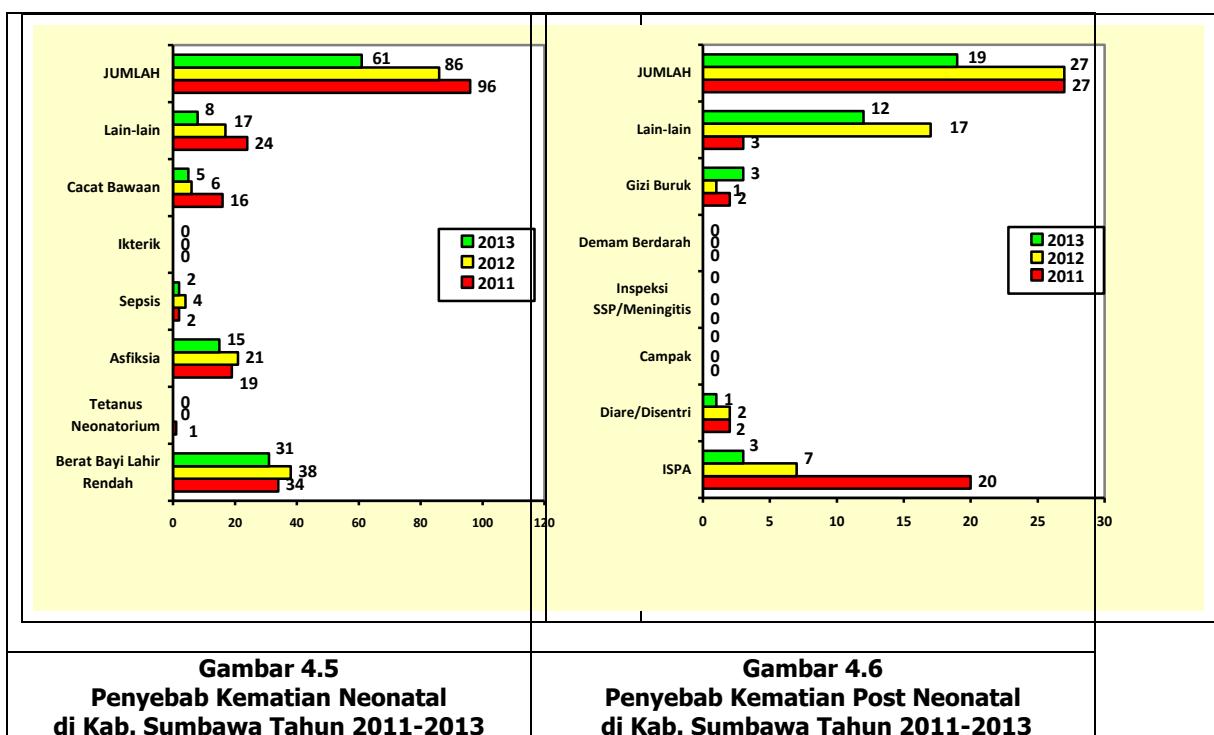
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

**Gambar 4.4
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013**

Angka kematian bayi di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011-2013 terus mengalami penurunan dengan rata-rata pertahun sebesar 19,11%. Adapun penurunan angka kematian bayi ini terjadi penurunan pada **kematian Neonatal** (kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah melahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan) dengan penurunan rata-rata pertahun sebesar 19,74%. Penurunan ini berkaitan dengan pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu hamil yang terus dilaksanakan setiap tahun, diantaranya melalui pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus dll. Demikian pula dengan **kematian Post Neonatal** (kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar) bayi baru lahir terjadi penurunan rata-rata pertahun sebesar 14,81%. Penurunan ini berkaitan dengan pelaksanaan program imunisasi serta pencegahan terhadap penyakit menular, dll. Hal ini terlihat sebagaimana pada gambar berikut.

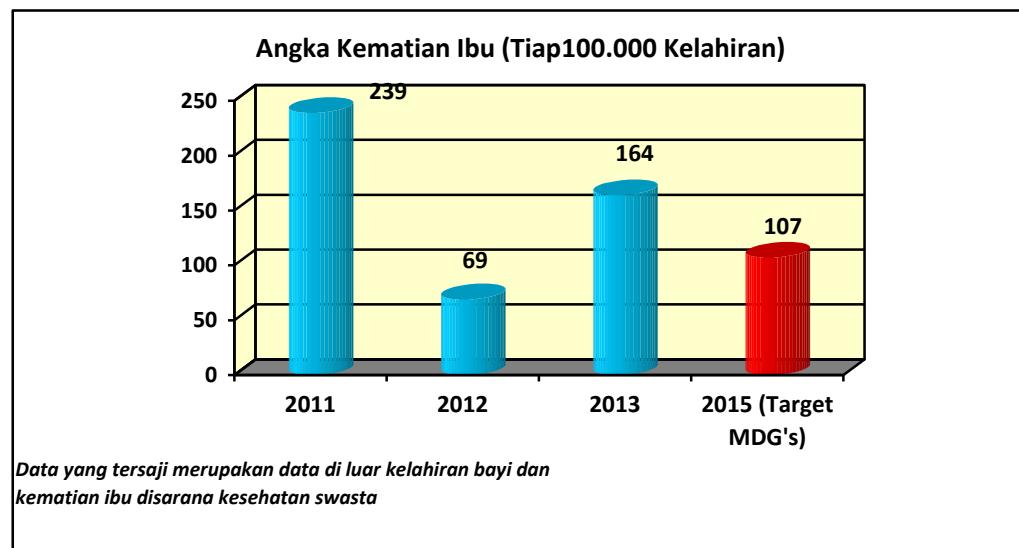


Pemerintah Kabupaten Sumbawa



b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.

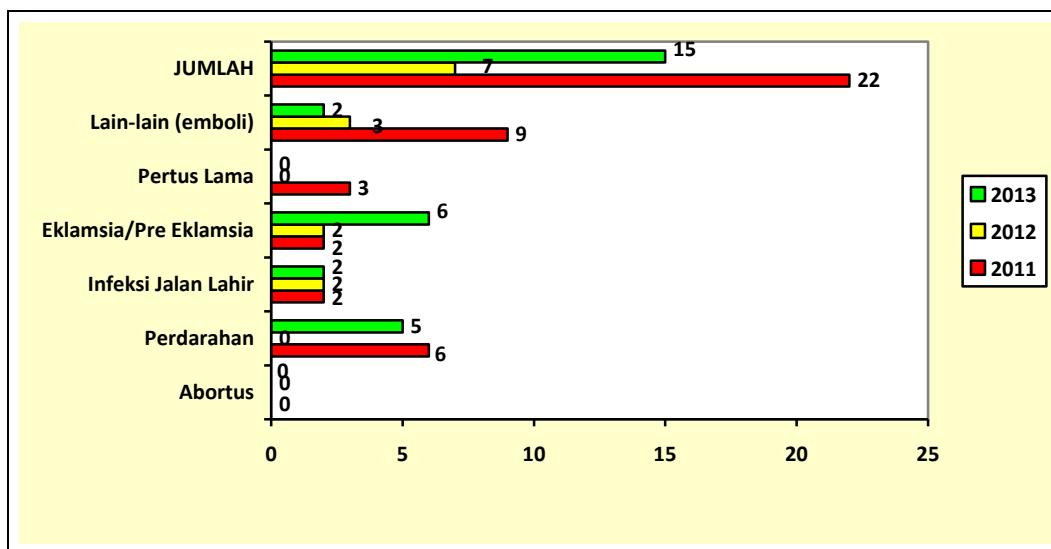


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 4.7
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2013



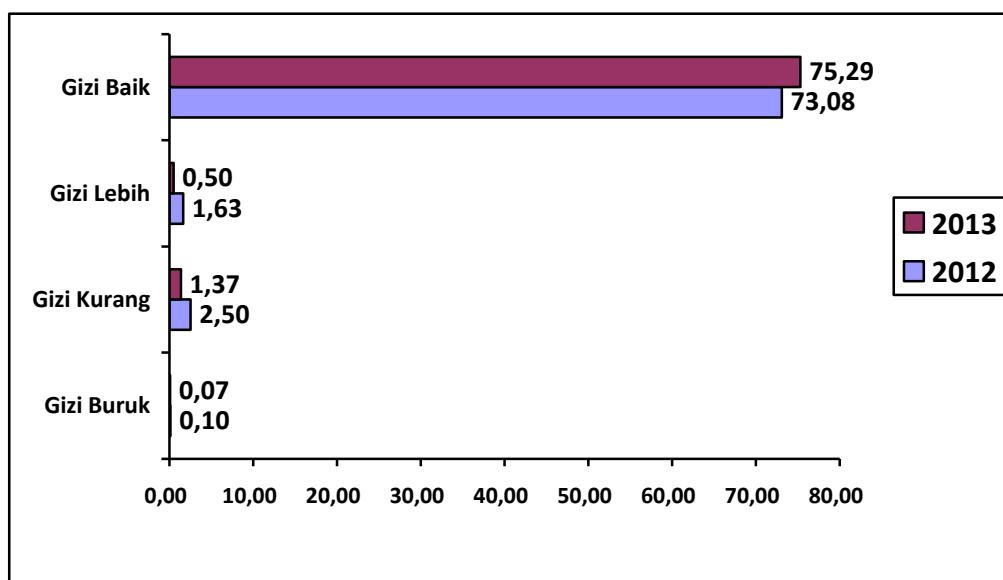
Angka kematian Ibu yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 32,95%. Peningkatan ini terjadi pada kondisi ibu hamil dan nifas, yang antara lain disebabkan karena terjadinya pendarahan dan Eklamsia/Pre Eklamsia. Hal ini terlihat sebagaimana pada gambar berikut.



**Gambar 4.8
Penyebab Kematian Maternal di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013**

c. Gizi Buruk

Berdasarkan hasil pekan penimbangan Balita yang dilaksanakan secara kontinyu setiap tahunnya, terlihat penurunan pada kasus gizi buruk dari 0,1% di tahun 2012 menjadi 0,07% pada tahun 2013. Demikian pula dengan persentase gizi kurang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 2,5% pada tahun 2012 menjadi sebesar 1,37% pada tahun 2013. Terhadap gizi lebih juga mengalami penurunan dari 1,63% pada tahun 2012 menurun menjadi 0,5% pada tahun 2013. Sedangkan untuk gizi baik terjadi peningkatan dari 73,08% pada tahun 2012 meningkat menjadi 75,29% pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan perbaikan gizi masyarakat yang semakin membaik dari tahun ke tahun, hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

**Gambar 4.9
Persentase Penderita Gizi Buruk, Gizi Kurang,
Gizi Lebih dan Gizi Baik Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2013**

Status gizi balita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menunjukkan kualitas fisik penduduk. Terkait dengan upaya perbaikan gizi masyarakat, setiap tahun dilaksanakan kegiatan-kegiatan layanan baik dalam bentuk pemberian makanan tambahan pemulih dari kondisi gizi buruk ke gizi kurang, dari gizi kurang ke gizi baik, serta penanganan dalam rangka mempertahankan kondisi tetap gizi baik. Pada tahun 2013 dilakukan penanggulangan kurang energi protein (KEP) sebesar 1,44% dari total balita serta penanggulangan Anemia gizi besi berupa distribusi Fe 1 sebesar 79,26% dan Fe 3 sebesar 70,37% untuk ibu hamil.

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sudah menjangkau keseluruhan masyarakat miskin yang termasuk dalam Askeskin. Sehingga setiap masyarakat yang tergolong dalam pengguna Askeskin, diberikan pelayanan kesehatan. Adapun gambaran pengunjung rawat inap dengan menggunakan Jamkesmas/Jamkesda pada RSUD Sumbawa dalam tahun 2013, sebagai berikut.



**Tabel 4.5
Jumlah Pengunjung Rawat Inap Dengan Jamkesmas/Jamkesda
menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa 2013**

NO	RUANG PERAWATAN	ASKES	JKM	JKMNTB	SKTM	UMUM	JAMPERSAL	JUMLAH
1	Dalam	486	769	188	1.009	441	0	2.893
2	Anak	301	559	25	719	642	1.416	3.662
3	Absgyn	171	541	80	109	266	1.765	2.932
4	Bedah	194	546	48	752	275	0	1.815
5	ICU	-	75	20	171	-	0	266
Jumlah		1.152	2.490	361	2.760	1.624	3.181	11.568
%		9,96	21,52	3,12	23,86	14,04	27,50	100,00

Sumber Data : RSUD Sumbawa

Tabel 4.5, menunjukkan bahwa pengunjung rawat inap pada RSUD Sumbawa dengan Jamkesmas/Jamkesda pada tahun 2013 keseluruhan sebanyak 11.568 pengunjung, yang menggunakan Jamkesmas mencapai 21,52%, sedangkan yang menggunakan Jamkesmas NTB 3,12%, selebihnya yaitu sebanyak 23,86% menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari yang berwenang, dan 9,96% menggunakan Askes. Secara umum pengunjung rawat inap di RSUD berada pada ruang perawatan anak, diikuti ruang perawatan dalam, absbyn, bedah dan ICU.

Berbagai upaya bidang kesehatan tersebut telah memberikan dampak positif pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin membaiknya pelayanan kesehatan dan meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.

Berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun 2013 sebagai bagian dari pelaksanaan *urusan kesehatan*. Adapun tingkat keterserapan input (dana) yang diukur dari tingkat realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan mencapai **97,03%** dari total belanja yang dianggarkan tahun 2013 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Demikian pula pada kinerja RSUD Kabupaten Sumbawa tahun 2013, tingkat realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.



4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan wajib lingkungan hidup yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, diantaranya melalui peningkatan intensitas koordinasi baik terhadap pengelolaan maupun pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui akses informasi akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehingga masyarakat selalu berupaya untuk turutserta menjaga lingkungannya.

Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tercermin dari upaya yang telah dilakukan diantaranya dalam hal pengelolaan persampahan. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan lokasi TPA baru yang berlokasi di Langam, sehingga jumlah TPA pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari TPA yang telah ada sebelumnya yakni TPA Raberas dan TPA Alas. Terhadap pengelolaan manajemen persampahan seperti pengelolaan sampah di TPA Raberas, yang sudah 2 tahun menggunakan sistem *Sanitary Landfill* (pembuangan secara sehat), yakni sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Proses *sanitasi landfill* ini merupakan pembuangan sampah yang didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah. Sistem ini lebih baik bila dibandingkan dengan pengelolaan sampah sistem *Open Damping* (sistem urug terbuka) yang masih digunakan di TPA Desa Lekong Kecamatan Alas Barat dan di TPA Langam. Sistem *Open Damping* ini merupakan sistem pembuangan sampah dilahan tanah lapang tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, sistem ini tidak ramah lingkungan dan tidak efektif menangani volume sampah yang menggunung dari hari ke hari. Disamping itu. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyediakan fasilitas dan sarana persampahan seperti keberadaan armada sampah sebanyak 23 unit yang terdiri dari Arm roll truck 6 unit, Dump truck 15 unit dan sepeda motor roda 3 sebanyak 2 unit. Untuk jumlah container dan TPS mini dalam kondisi baik terdapat masing-masing sejumlah 16 unit dan 27 unit, sedangkan untuk mesin composting terdapat 2 unit yang dioperasikan di TPA Raberas sebanyak 2 unit dan tersebar pada



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

sekolah-sekolah dan masyarakat sebanyak 26 unit serta keberadaan bak sampah 3 warna sebanyak 220 unit. Kondisi ini diharapkan agar kualitas lingkungan dapat terus terjaga, sehingga sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan, agar masyarakat ikut bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan diharapkan dapat mengelola persampahan secara mandiri dan terpadu.

Demikian pula dengan upaya meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang menunjukkan masih terjadinya kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah lahan kritis, pencemaran lingkungan dan berkurangnya sumber air sebagai akibat dari pembuangan limbah oleh pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan, adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan, serta belum maksimalnya pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan. Untuk itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terus memenuhi kelengkapan tenaga teknis di bidang pengendalian lingkungan dengan keberadaan 11 tenaga teknis yang terdiri dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebanyak 2 orang, petugas Laboran 2 orang, penilai Amdal 2 orang dan Surveyor sebanyak 2 orang serta dilengkapi oleh petugas administrasi sebanyak 1 orang. Sementara untuk instrument guna mendukung pengendalian Dampak Lingkungan tersebut telah dilengkapi dengan keberadaan Mobil Laboratorium, Laboratorium Lingkungan, Pos Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Daerah (P3SLHD) dan Komisi Penilai Amdal.

Terkait dengan izin lingkungan bagi perusahaan yang ada di kabupaten Sumbawa, terdata bahwa dari 273 usaha/kegiatan yang ada, baru 99 perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan (wajib Amdal/UKL-UPL), sementara dari 761 usaha/kegiatan yang wajib SPPL sebanyak 680 usaha/kegiatan yang telah memiliki SPPL.

Demikian pula dengan penataan taman kota dan hutan kota sebanyak 39 buah serta pengelolaan lampu penerangan jalan dan lingkungan dengan jumlah titik lampu di kota Sumbawa besar sebanyak 1.662 titik dan 2.55 titik lampu di kecamatan.

Terhadap perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa pada



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

lingkungan hidup, maka selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2013 berhasil mendapatkan Tropy Raksaniyata sebagai kabupaten yang mampu mempertahankan tutupan vegetasi lahan.

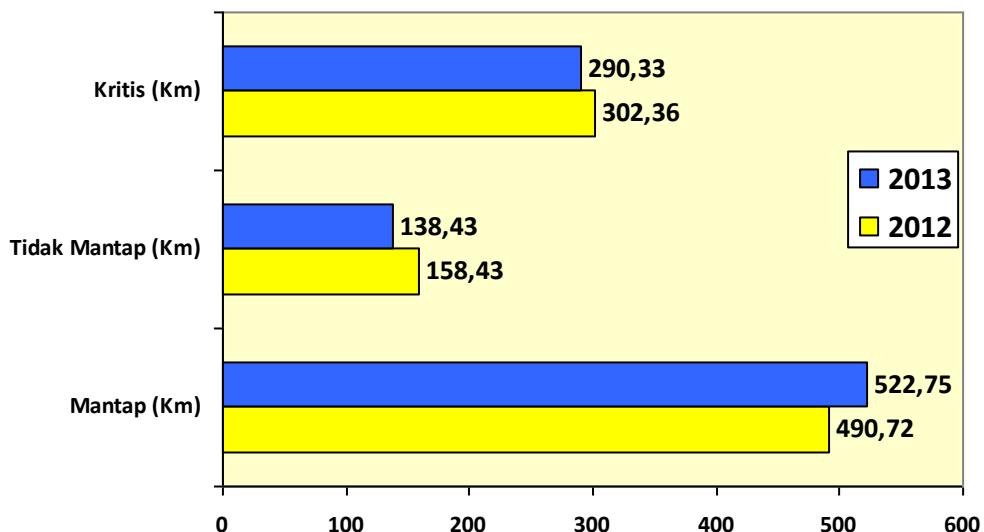
Terkait dengan realisasi dari rencana kinerja yang ditetapkan, hingga akhir tahun anggaran 2013 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **96,10%** dari pagu total anggaran belanja BPM-LH tahun 2013 baik dari belanja langsung maupun dari belanja tidak langsung. Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan pada urusan wajib lingkungan hidup disajikan pada lampiran.

4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan *urusan wajib pekerjaan umum* pada tahun 2013 tingkat realisasinya mencapai **96,15%** dari total pagu anggaran belanja Dinas PU tahun 2013 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pada urusan wajib pekerjaan umum di Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2013 dilaksanakan beberapa kegiatan pokok, yaitu meliputi bidang kebinamargaan berupa pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan; bidang keciptakaryaan berupa pembangunan infrastruktur air bersih dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong; bidang Sumber Daya Air berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai serta pengendalian banjir.

Dalam rangka pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang sasarannya adalah untuk membuka akses antarwilayah dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang masih terisolir yang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan, dimana total panjang jalan Kabupaten di Sumbawa adalah sepanjang 951,51 km dengan kondisi sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa

**Gambar 4.10
Kondisi Jalan Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2013**

Hal ini menunjukkan peningkatan terhadap kondisi infrastruktur jalan kabupaten dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sepanjang 32,03 km (6,53%), hal ini ditandai dari kondisi jalan mantap pada tahun 2012 sepanjang 490,72 km (51,57%) meningkat menjadi 522,75 km (54,94%) di tahun 2013. Demikian pula dengan kondisi jalan tidak mantap yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sepanjang 20 km (12,62%), yakni dari kondisi jalan tidak mantap pada tahun 2012 sepanjang 158,43 km (16,65%) menurun pada tahun 2013 menjadi 138,43 km (14,55%). Untuk jalan kabupaten dalam kondisi kritis, juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sepanjang 12,03 km (3,98%), yakni dari 302,36 km (31,78%) pada tahun 2012 menjadi 290,33 km (30,51%) pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah yang selalu focus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah yang masih terisolir melalui peningkatan kemantapan jalan, sehingga akselerasi pembangunan menjadi lebih merata. Berdasarkan data Sumbawa Dalam Angka, bahwa sampai dengan tahun 2012 keberadaan jembatan di Kabupaten Sumbawa terdapat sebanyak 465 buah dengan bentangan sepanjang 6.067,60 meter, dimana jembatan \leq 6 m sebanyak



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

156 buah dengan bentangan sepanjang 702,15 meter, sedangkan untuk jembatan sepanjang ≥ 6 m sebanyak 309 buah dengan bentangan sepanjang 5.365,45 meter.

Dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan talud/bronjong dan saluran drainase/gorong-gorong, yang diarahkan pada upaya untuk mengamankan wilayah pemukiman di sekitar sungai dari gerusan air sungai terutama saat banjir serta untuk terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dan tertata, maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan talud/bronjong pengaman tebing sungai yang tersebar di seluruh wilayah pemukiman yang rawan dari gerusan air sungai diantaranya perkuatan tebing di sungai Bangkong dan sungai Brang Biji masing-masing sepanjang 50 meter, sungai Brang Bara sepanjang 60 meter, sungai Bale Brang Kecamatan Utan sepanjang 140 meter, sungai Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes sepanjang 140 meter, dan sungai di Dusun Unter Gedong Desa Uma Beringin sepanjang 47 meter. Demikian pula dengan pembangunan bronjong seperti di desa Selante Kecamatan Plampang sepanjang 90 meter, di Orong Bako dan Orong Bawa Kecamatan Utan masing-masing sepanjang 63 meter dan 47 meter, di Tebing sungai Tiu Kulit Desa Simu sepanjang 25 meter.

Sedangkan untuk program pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ditujukan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencukupi serta melayani kebutuhan air bagi seluruh areal pertanian di Kabupaten Sumbawa, untuk mendukung hal tersebut, maka ketersediaan irigasi teknis sangat dibutuhkan. Adapun jumlah daerah irigasi teknis sampai dengan tahun 2013 sebanyak 25 daerah irigasi dengan luas baku mencapai 11.228 Ha, dan luas irigasi sebesar 8.362 Ha, dengan panjang saluran induk 31.639,5 meter dan saluran sekunder sepanjang 180.237 meter. Untuk mengoptimalkan hasil dari pembangunan / peningkatan serta rehabilitasi saluran irigasi diiringi dengan penyediaan sarana pengelolaan dan organisasi pengelolaan air agar distribusi air dapat merata ke seluruh areal pertanian.

Terkait kebutuhan pembangunan wilayah strategis dan tumbuh cepat yang dengan indikator sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan prasarana pendukung lainnya maka sasaran program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai



termasuk prasarana pendukung untuk mendukung pembangunan wilayah strategis dan tumbuh cepat, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang yang memadai maka arus barang dan jasa berjalan lancar dan dampaknya adalah terjadi akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat wilayah yang strategis dan tumbuh cepat. Wilayah-wilayah yang menjadi rumpun wilayah strategis dan cepat tumbuh ini adalah kawasan agropolitan Alas-Utan, Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan Kawasan Agropolitan Brang Pelat serta Kawasan Agropolitan Emparano. Kawasan ini menjadi kawasan pengembangan produktif sesuai dengan potensi komparatif yang dimiliki. Penumbuhan kawasan ini diletakkan dalam kerangka penciptaan stimulus ekonomi untuk produktivitas komoditas sebagai komoditas unggulan wilayah untuk percepatan akselerasi ekonomi.

4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2011 – 2031 menandai lahirnya payung hukum penataan ruang sebagai pedoman umum dalam rangka regulasi pengaturan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya payung hukum ini diharapkan keluhan dan gejolak di tengah masyarakat berkaitan dengan pelanggaran penataan ruang sedikit banyak dapat diurai dan ditertibkan secara bertahap yang tentunya dilaksanakan secara simultan dengan sosialisasi dari keberadaan peraturan daerah tentang tata ruang itu sendiri.

Selain dari itu, PERDA RTRW Kabupaten Sumbawa akan menjadi panduan bagi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah beserta Kelompok-Kelompok Kerjanya dalam rangka menindaklanjuti penataan ruang baik dari sisi perencanaan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan keseimbangan peningkatan jumlah penduduk, yang diikuti dengan peningkatan eksloitasi terhadap ruang yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa melakukan langkah antisipasi dengan penambahan keberadaan ruang terbuka hijau, dimana ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi, yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural serta nilai estetika yang berguna meningkatkan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan biotik pada wilayah tersebut serta menjadi nilai kebanggaan atau identitas wilayah tersebut. Adapun ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 seluas 76.147,82 m² dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 117.147,82 m² dari penambahan Taman Lapangan Kerato seluas 41.000 m², demikian pula dengan luas RTH pada tahun 2013 mengalami peningkatan dengan adanya penambahan pada RTH Taman Unter ketimis seluas 6.348 m², sehingga dihasilkan total luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa sebesar 123.495,82 m² yang tersebar di 39 lokasi. Berdasarkan standar lingkungan hidup tentang pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, sehingga ketersediaan RTH masih perlu ditingkatkan keberadaannya pada tahun-tahun mendatang sebagai langkah penataan kota serta menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Rincian RTH terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013**

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m ²)		
		2011	2012	2013
1	Hutan Kota Olat Rarang	11.413,00	11.413,00	11.413,00
2	Hutan Kota Pungka	9.545,00	9.545,00	9.545,00
3	Hutan Kota Simpang Moyo	1.572,86	1.572,86	1.572,86
4	Hutan Kota Wisma Daerah	10.150,00	10.150,00	10.150,00
5	Hutan Kota Kebayan	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande I	1.034,00	1.034,00	1.034,00
7	Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande II	320,00	320,00	320,00
8	Taman Kota Bugis	2.228,00	2.228,00	2.228,00
9	Taman Kota Depan Asrama Lama	660,00	660,00	660,00
10	Taman Kota Depan PLN I	135,00	135,00	135,00
11	Taman Kota Depan PLN II	36,00	36,00	36,00
12	Taman Kota Jam Gadang	28,00	28,00	28,00
13	Taman Kota Jembatan Lempeh	362,20	362,20	362,20
14	Taman Kota Labuhan Sumbawa I	570,00	570,00	570,00
15	Taman Kota Labuhan Sumbawa II	586,25	586,25	586,25
16	Taman Kota Labuhan Sumbawa III	1.551,00	1.551,00	1.551,00
17	Taman Kota Lapangan Kerato	4.370,00	4.370,00	4.370,00
18	Taman Kota Lapangan Pahlawan	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	Taman Kota Lawang Desa	665,00	665,00	665,00
20	Taman Kota Median Jalan Depan Kantor Bupati	525,00	525,00	525,00
21	Taman Kota Patung Keraci	359,40	359,40	359,40
22	Taman Kota Patung Kerbau	40,00	40,00	40,00
23	Taman Kota Patung Kuda	17,70	17,70	17,70
24	Taman Kota Patung Menjangan	94,50	94,50	94,50



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m ²)		
		2011	2012	2013
25	Taman Kota Samping Kantor Bupati	322,44	322,44	322,44
26	Taman Kota Simpang Boak	461,20	461,20	461,20
27	Taman Kota Simpang Dam Aji	238,74	238,74	238,74
28	Taman Kota Simpang Moyo	206,87	206,87	206,87
29	Taman Kota Simpang Nijang	93,38	93,38	93,38
30	Taman Kota Simpang Sering	448,06	448,06	448,06
31	Taman Kota Simpang Sernu	90,57	90,57	90,57
32	Taman Kota Simpang Tano	48,00	48,00	48,00
33	Taman Kota Tugu Adipura	112,74	112,74	112,74
34	Taman Kota Tugu Lilin	719,60	719,60	719,60
35	Taman Kota Ujung Jembatan Brang Biji	123,50	123,50	123,50
36	Taman Simpang Seroja	7,07	7,07	7,07
37	Taman Terusan Kamboja	112,74	112,74	112,74
38	Taman Lapangan Kerato	-	41.000	41.000
39	Taman Unter Ketimis	-	-	6.348
Jumlah		76.147,82	117.147,82	123.495,82

4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib perencanaan pembangunan pada tahun 2013 meliputi pengembangan sistem perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan pada setiap sektor pembangunan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan laporan evaluasi pembangunan, koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan serta beberapa program koordinasi perencanaan penunjang untuk penyelarasan dengan program dari pemerintah pusat.

Dokumen data dalam rangka perencanaan pembangunan yang disediakan meliputi profil daerah, statistik ekonomi, data spasial daerah. UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, mengamanatkan bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan. Data ini menjadi acuan sangat strategis dalam membuat perencanaan yang baik. Seiring dengan otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil). Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit



fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup: (a) penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (b) organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah; (c) kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS Daerah; (d) keuangan daerah; (e) potensi Sumberdaya Daerah; (f) produk Hukum daerah; (g) kependudukan; (h) informasi Dasar Wilayah; (i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta perencanaan daerah rawan bencana. Penguatan koordinasi ini, merupakan *basic need* perencanaan pada setiap bidang. Karena dengan koordinasi inilah diharapkan akan terbangun sinergisitas konsep implementasi pembangunan dan tersedianya bahan evaluasi perencanaan penanganan daerah. Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada tingkat desa pada tahun 2013 dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam beberapa bentuk untuk penyusunan RPJM Desa, implementasi pola perencanaan partisipatif dalam program PNPM, serta koordinasi perencanaan SKPD. Upaya tersebut dipandang penting, selain untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur di desa, kecamatan dan SKPD-SKPD juga dalam rangka memperkuat ketersediaan data-data empiris masing-masing wilayah, kesamaan persepsi dan pola pikir mengenai perencanaan pembangunan. Manfaat yang diraih dengan upaya tersebut telah mulai terlihat pada tahapan diskusi forum SKPD dan forum gabungan SKPD sebagai salah satu tahap dalam proses Musrenbang dan Pra Musrenbang di Kabupaten Sumbawa, meskipun masih tetap menyisakan beberapa kelemahan yang akan terus diperbaiki untuk tahapan berikutnya. Output dari proses Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

tahunan daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2013, selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam rangka menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, maka proses koordinasi perencanaan dilaksanakan baik dilakukan secara sektoral, spasial maupun secara terintegrasi pada berbagai bidang koordinasi perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang selain dilaksanakan dalam jajaran pemerintahan daerah serta *stakeholders* internal lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumbawa termasuk lembaga swadaya masyarakat juga dilakukan dengan pemerintah Provinsi dan pusat, terutama dalam memperlancar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, serta pengembangan lembaga ekonomi lokal di desa melalui pembinaan dan pengembangan BUMDes-LKM yang sudah mulai memberikan kontribusi bagi peningkatan *income* desa. Demikian pula dengan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya, selain melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan sejak tingkat desa hingga kabupaten, juga dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta masyarakat. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan segenap *stakeholder* dilaksanakan juga dalam rangka memantapkan pelaksanaan PNPM PISEW, program AMPL dan perencanaan pembangunan kesehatan, PPAUD, perencanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah serta KTM, selain koordinasi perencanaan bidang pemerintahan lainnya di lingkup pembangunan sosial budaya. Koordinasi perencanaan pembangunan fisik prasarana wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2013, selain mencakup perencanaan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, juga terkait dengan koordinasi perencanaan dengan pemerintah provinsi dan pusat termasuk Bakosurtanal, serta beberapa pihak lainnya sebagai *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pembinaan kelembagaan P3A dan koordinasi penetapan batas desa serta dengan batas Kabupaten yang berbatasan.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh akan selalu konsisten untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Intervensi program/kegiatan pada kawasan tersebut terus dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan, pasar agribisnis dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan KTM Labangka.

4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib perumahan, digambarkan dari Kondisi penanganan perumahan di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

**Tabel 4.7
Kondisi Perumahan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013**

No	Kecamatan	Rumah Penduduk	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Yang Telah Tertangani	Rumah Yang Belum Tertangani
1	Sumbawa	15.522	2.720	845	1.875
2	Lab. Badas	7.760	927	542	385
3	Utan	7.875	1.325	489	836
4	Alas	7.416	1.271	84	1.187
5	Alas Barat	5.044	828	144	684
6	Lape	4.272	606	10	596
7	Lopok	4.888	819	10	809
8	Plampang	7.160	1.134	10	1.124
9	Labangka	3.013	547	-	547
10	Empang	5.806	559	30	529
11	Lenangguar	1.748	162	27	135
12	Lantung	889	147	-	147
13	Orong Telu	1.133	191	-	191
14	Lunyuk	4.968	866	-	866
15	Batulanteh	2.919	520	20	500
16	Rhee	1.837	462	148	314
17	Buer	3.714	533	30	503
18	Unter Iwes	5.015	770	30	740
19	Moyo Hilir	6.019	638	60	578
20	Moyo Utara	2.477	325	10	315
21	Moyo Hulu	5.878	891	143	748
22	Ropang	1.414	242	-	242
23	Maronge	2.616	371	-	371
24	Tarano	4.024	706	20	686
Jumlah		113.407	17.560	2.652	14.928

Sumber Data : BPMPD Kab. Sumbawa

Rumah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 terdata sejumlah 113.407 rumah, dengan kategori tidak layak huni sebanyak 17.560 rumah, dan yang tertangani dari rumah tidak layak huni tersebut pada tahun ini



sebanyak 2.652 rumah, sehingga masih tersisa rumah yang belum tertangani sebanyak 14.928 unit rumah.

Kegiatan penanganan perumahan tidak layak huni ini merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun secara bertahap, yang dihajatkan kepada masyarakat untuk dapat menikmati perumahan yang layak. Adapun sumber pendanaan bantuan stimulan tersebut berasal dari dana : 1). APBD Provinsi sebesar Rp. 2.250.000.000,- untuk rehabilitasi 450 unit rumah tidak layak huni; 2). APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 400.000.000,- untuk rehabilitasi dan pembangunan baru 70 unit rumah kumuh; 3). dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp. 16.095.000.000,- berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat korban kerusuhan sumbawa sebanyak 74 unit rumah, BSPS Tuntas Desa Dampak Kerusuhan sebanyak 1.582 unit rumah, dan BSPS regular sebanyak 466 unit rumah.

4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa merupakan implementasi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan tingkat keterserapan input (dana) yang diukur dari realisasi anggaran mencapai **97,09%** dari totalitas pagu anggaran belanja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dalam APBD tahun 2013 meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terkait dengan urusan wajib kepemudaan dan olahraga sepanjang tahun 2013 adalah dengan berperan sertaanya pemuda dalam memanfaatkan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2013 telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti pelaksanaan berbagai lomba kepemudaan yang berhasil menorehkan prestasi, diantaranya :

- Pemuda Pelopor dibidang Kewirausahaan an. Nurmini Angraini, meraih juara II Tingkat Nasional.
- Pemuda Pelopor dibidang Budaya dan Pariwisata an. M. Iqbal, S.Sos sebagai



juara Harapan Tingkat Nasional.

- Juara III Nasional Sepak Bola Tingkat SMP di Semarang.

Prestasi-prestasi yang telah diraih tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemuda-pemuda lainnya dalam meraih prestasi berikutnya, sehingga dengan lahirnya pemuda-pemuda berprestasi tersebut dapat meminimalisir lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan yang sehat, hal ini akan berdampak terhadap salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikelangan pemuda, yang penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAFZA) atau yang populer diistilahkan dengan narkoba menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan dan seperti tidak dibatasi lagi oleh ruang. Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan sosialisasi kegiatan bahaya narkoba dengan sasaran para pelajar, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbawa.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana olahraga sangat menentukan pengembangan kemampuan prestasi pemuda dibidang olah raga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan prasarana dibidang olahraga yakni dengan keberadaan klub olahraga yang hingga saat ini berjumlah 871 klub dari 827 pada tahun 2012, sehingga terjadi peningkatan jumlah klub olahraga sebanyak 44 klub atau tumbuh sebesar 5,32%. Selain itu gedung olah raga juga mengalami peningkatan sebanyak 4 buah atau tumbuh sebesar 30,77% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 terdapat sebanyak 13 buah gedung dan pada tahun 2013 sebanyak 17 gedung olah raga. Demikian pula dengan jumlah lapangan olah raga terjadi peningkatan sebanyak 17 buah atau tumbuh sebesar 8,76% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 terdapat sebanyak 194 buah dan pada tahun 2013 sebanyak 211 buah.

Iklim keolahragaan ini juga didukung dengan berbagai upaya pembinaan dalam rangka meningkatkan minat yang ditandai dengan berkembangnya intensitas olahraga dan persepsi masyarakat terhadap olahraga menjadi frame yang sangat mendasar. Inisiasi-inisiasi untuk pelaksanaan even-even olahraga merupakan salah satu indikator capaian sasaran ini selain semakin kapabelnya



organisasi cabang-cabang olahraga. Even-even yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa beberapa cabang olahraga sudah menjadi agenda rutin tahunan seperti sepak bola antarpelajar, Suratin Cup, Pertandingan sepak bola Cenderawasih Cup, pertandingan seleksi Persisum, pertandingan bulu tangkis, pertandingan, perlombaan olahraga antarpelajar, dan lain-lain. Optimasi organisasi cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa relatif sudah mencapai ke tingkat desa.

4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal merupakan urusan yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi termasuk penghapusan penyebab ekonomi biaya tinggi serta penyiapan sumberdaya dalam mendukung investasi, merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib penanaman modal di tahun 2013.

Pemerintah daerah telah menempuh upaya penyebaran informasi potensi unggulan melalui kegiatan promosi investasi yang telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta melalui media-media cetak.

Keberadaan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang bergerak di Penanaman Modal Asing (PMA) yakni dari 6 perusahaan yang berinvestasi pada tahun 2011, meningkat menjadi 8 perusahaan pada tahun 2013, dengan nilai investasi sebesar US\$. 19.865.518,-. Sementara untuk investor dibidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan saat ini terdapat sejumlah 16.023 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 902.954.614.272,-, meningkat bila dibandingkan dengan jumlah investasi dari tahun 2011 sebesar Rp. 784.685.331.456,- dengan jumlah perusahaan sebanyak 10.724 buah.

Secara rinci mengenai rencana dan realisasi program dan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal disajikan pada lampiran.



4.1.2.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Berdasarkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **93,96%** dari total belanja yang dianggarkan melalui Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2013 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara garis besar pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan wajib koperasi dan UKM diuraikan sebagai berikut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dapat diketahui berdasarkan indikator – indikator :

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi menurut hasil pemeringkatan koperasi yang ditandai dengan bertambahnya koperasi yang dikategorikan sangat berkualitas, berkualitas atau kurang berkualitas;
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dikategorikan sehat, sedang atau kurang sehat.
- 4) Pertumbuhan wirausaha baru.

Jumlah koperasi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 terdapat sebanyak 362 unit dengan jumlah anggota 52.502 orang. Dari jumlah koperasi tersebut yang aktif sejumlah 152 koperasi dan yang telah melaksanakan RAT sebanyak 93 koperasi. Berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi, terdapat 52 koperasi dengan peringkat berkualitas, sedangkan 73 unit merupakan koperasi dengan peringkat cukup berkualitas atau mengalami peningkatan sebesar 19,05% dari tahun sebelumnya). Sebagai gambaran koperasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif, Koperasi RAT Dan Hasil Pemeringkatan Koperasi di Kab. Sumbawa
Tahun 2011 - 2013

No	Tahun	Jumlah koperasi	Jumlah Anggota	Koperasi Aktif		Koperasi RAT		Hasil pemeringkatan			
				Jumlah	%	Jumlah	%	Sangat ber kualitas	Berkualitas	Cukup berkualitas	Jumlah
1.	2011	353	49.505	150	42,49	98	27,76	-	41	64	105
2.	2012	355	53.246	165	46,48	93	26,20	-	41	73	114
3.	2013	362	52.502	152	41,99	93	25,69	-	52	73	125
Perkembangan		9	2.997	2	-0,50	-5	-2,07	-	11	9	20
% /		2,55	6,05	1,33	-1,19	-5,10	7,46	-	26,83	14,06	19,05

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) menurut hasil penilaian kesehatan KSP/USP di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Jumlah KSP / USP dan Hasil Penilaian Kesehatan
KSP/USP di Kab. Sumbawa Tahun 2011 - 2013

No.	Tahun	Jumlah KSP / USP Aktif	Hasil penilaian kesehatan			KSP / USP sehat	
			Sehat	Cukup sehat	Kurang sehat	Jumlah	%
1.	2011	127	8	60	1	69	54,33
2.	2012	127	16	39	5	60	47,24
3.	2013	163	12	48	5	65	39,88
Perkembangan		36	4	-12	4	-4	-14,45
% %		28,35	50,00	-20,00	400,00	-5,80	-26,60

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Selain koperasi, urusan wajib ini dihajatkan untuk membina usaha daerah melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UKM, untuk itu perlu dikembangkan strategi pengembangan kewirausahaan dimasa mendatang. Pengembangan wirausaha baru diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan gerakan memasyarakat dan membudayakan kewirausahaan.

Usaha kecil dan menengah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yakni : 1). UKM Sektor Industri Pertanian, 2). UKM Sektor Industri Non Pertanian, 3). UKM Sektor Perdagangan dan Aneka Jasa.

Dalam rangka menumbuhkembangkan koperasi dan UKM yang berkualitas dapat ditempuh melalui ; (1) Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan mayarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (2) Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif; (3) Peningkatan daya saing hasil produksi UKM di pasar daerah, regional maupun nasional melalui pola promosi industri daerah.



4.1.2.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan penetapan kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana *urusan kependudukan dan catatan sipil* tahun 2013, tingkat realisasi anggaran belanja mencapai **92,69%** dari total anggaran belanja yang ditargetkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang telah diimplementasikan secara operasional melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah/datang serta dokumen catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Pelayanan administrasi kependudukan ini dilaksanakan, agar dapat terwujudnya : 1). Tertibnya database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan terlayaninya masyarakat dengan cepat, mudah, murah dan benar dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 2). terwujudnya pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk; 3). Tersedianya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 4). Tersedianya pranata hukum daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya; 5). Tertibnya proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan SPO yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Berdasarkan data administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2012 telah diterbitkan KTP sejumlah 334.375 buah yang terdiri dari KTP manual sejumlah 78.070 buah dan KTP Elektronik sejumlah 256.305 buah, sementara pada tahun 2013 jumlah KTP yang terbit sejumlah 25.375 buah yang terdiri dari KTP manual sebanyak 10.262 buah dan KTP elektronik sebanyak 15.113 buah, sehingga terakumulasi jumlah KTP yang telah diterbitkan sampai dengan tahun



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

2013 sebanyak 359.750 buah KTP. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 375.681 orang, maka terdapat sekitar 15.931 orang yang belum diterbitkan KTPnya. Demikian pula dengan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan pada tahun 2013 sebanyak 81 buah, Akta Kelahiran sebanyak 11.860 buah, Akta Kematian sebanyak 35 buah dan Akta Perceraian sebanyak 1 buah. Terhadap penduduk yang masih belum memiliki Kartu keluarga dan KTP terkendala antara lain karena tidak terdaftar dalam database kependudukan/belum memiliki NIK, tidak mempunyai surat pindah dari daerah asalnya, kondisi tempat tinggal yang jauh dari instansi pelaksana, kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan masih kurang, terdapat beberapa persyaratan untuk mendaftar akta kelahiran belum terpenuhi karena tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga serta tidak memiliki akta nikah/akta perkawinan. Untuk itu Pemerintah Daerah terus melakukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendidikan/diklat untuk SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya. hal ini dimaksudkan agar pelayanan langsung kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka dan tepat, baik tepat dalam hal biaya maupun sistem serta prosedurnya, sehingga akan terwujud pelayanan prima menuju birokrasi yang bersih dan berwibawa.

4.1.2.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Urusan Wajib Ketenagakerjaan merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dimana pada tahun 2013 tingkat keterserapan input (dana), realisasinya mencapai **91,46%** dari total belanja yang dianggarkan tahun 2013.

Implementasi secara operasional terhadap penyelenggaraan urusan wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa, antara lain dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, baik melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Hal ini peranannya sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

persyaratan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pemerintah daerah terus melakukan peningkatan terhadap pelatihan-pelatihan yang bersifat kejuruan guna meningkatkan produktivitas, daya saing yang selanjutnya akan menuju pada penciptaan lapangan kerja baru. Adapun pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya :

- Pelatihan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan dengan pelatihan dibidang kejuruan las listrik telah menghasilkan produk-produk kreatif berupa terop, rak/lemari buku, rak piring, tempat jemuran dan tempat gantungan pakaian. Sementara untuk pelatihan dibidang kejuruan tukang kayu yang berlokasi di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang telah menghasilkan produk berupa meja prasmanan/sidang, meja setengah biro, meja tamu, almari buku, almari gantung, rak sepatu dan bangku kerja. Untuk pelatihan dibidang kejuruan mengemudi yang dilaksanakan di Kecamatan Sumbawa dihasilkan 16 buah SIM A yang diberikan kepada siswa pelatihan. Selain itu pelatihan bidang kejuruan Instalasi Listrik juga telah dilaksanakan di Desa Kelungkung Kecamatan Batu Lanteh.
- Pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD KLK berupa pelatihan las listrik, kejuruan menjahit, kejuruan gulung dinamo dan kejuruan teknisi computer.

Disamping itu upaya pembinaan terhadap 38 Lembaga Latihan Swasta (LLS). Dari 38 LLS tersebut terdapat 14 LLS tidak aktif dan 24 LLS masih aktif.

Peningkatan koordinasi terhadap pelayanan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terus dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dibidang hubungan industrial yaitu penyuluhan tata cara penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta kegiatan revitalisasi lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja ditekankan pada pemberian hak-hak dasar tenaga kerja baik perlindungan di bidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum serta norma keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan, jaminan sosial, perluasan perjanjian kerja bersama dan pembinaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan terus dilanjutkan dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Penyuluhan dan perlunya perlindungan tenaga kerja, untuk



itu ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang terus disempurnakan setiap tahunnya.

Kasus ketenagakerjaan yang mengemuka adalah kasus-kasus perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar SP/BP. Adapun jumlah kasus PHK dan tuntutan hak ketenagakerjaan didalam negeri pada tahun 2013 terdapat sebanyak 25 kasus dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 54 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4 orang. Terhadap 25 kasus tersebut yang telah tertangani sebanyak 23 kasus, sedangkan untuk 5 kasus masih dalam proses penyelesaian oleh pihak PHI (Perselisihan Hubungan Industrial). Bila dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2012 terdapat sebanyak 29 kasus dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 111 orang dan perempuan sebanyak 5 orang, kondisi ini mengindikasikan terjadinya penurunan jumlah kasus yang terjadi, dengan meningkatnya kasus yang dapat diselesaikan pada saat ini. Terhadap kasus tenaga kerja yang terjadi di Luar Negeri pada tahun sebelumnya seperti Kasus Fatma Binti A. Asum yang terancam hukuman pancung di Saudi Arabia, telah terselesaikan kasusnya dengan pengalihan hukuman menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara. Lambatnya penyelesaian kasus ini disebabkan karena lamanya proses hukum di negara penempatan, sehingga pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai upaya koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, BNP2TKI dan Perusahaan Pengirim Tenaga Kerja (PPTKIS), agar secepatnya dapat terselesaikan. Adapun kasus-kasus ketenagakerjaan tergambar sebagai berikut.

Pengaturan pengupahan bagi tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, hal ini dimaksudkan agar upah terendah dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini terus diusahakan agar upah dalam jabatan yang sama tidak jauh berbeda dan terdapat keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan. Untuk rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.075.000,- dari UMK pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 975.000,-.

Terhadap kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan kepada perlindungan tenaga kerja, maka usaha peningkatan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

pengawasan dari tahun 2011-2013 terlihat seperti pada tabel berikut.

**Tabel 4.10
Kegiatan Inspeksi Kontrol Dan Kunjungan Tahun 2011-2013**

No	Kegiatan	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Inspeksi	50	75	115
2.	Kontrol	200	275	280
3.	Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	8	8	9
4.	Pemeriksaan Kasus PHK	22	18	12
5.	Pemeriksaan Kasus Jam Kerja	29	29	2
Jumlah		309	405	418

Sumber Data : *Disnakertrans Kab. Sumbawa.*

Untuk mempermudah akses informasi ketenagakerjaan khususnya informasi bursa lapangan kerja, dilakukan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media-media baik cetak maupun elektronik dan penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan. Adapun pencari kerja yang terdaftar/terigestrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sejumlah 5.588 pencari kerja dengan komposisi laki-laki sebanyak 814 orang dan perempuan sebanyak 4.774 orang. Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar tersebut telah ditempatkan sejumlah 4.089 orang atau sebesar 73,17% dari tenaga kerja terdaftar, dengan komposisi laki-laki sebanyak 99 orang dan perempuan sebanyak 3.990 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2012 sejumlah 3.608 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 723 orang dan perempuan sebanyak 2.885 orang, dengan penempatan sejumlah 2.621 orang dengan komposisi laki-laki 28 orang dan perempuan sebanyak 2.593 orang, maka terjadi peningkatan baik dari jumlah pencari kerja sebesar 54,88% maupun dari tenaga kerja yang telah ditempatkan sebesar 56,01%. Hal ini disebabkan karena penyebarluasan informasi bursa kerja yang tersebar sampai ke tingkat desa, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Terkait realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 disajikan pada lampiran.



4.1.2.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada SKPD Kantor Ketahanan Pangan sebagai leading sektor yang didukung dengan beberapa program melalui SKPD lainnya seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Pada tahun 2013, khusus untuk Kantor Ketahanan Pangan sebagai SKPD pelaksana *urusan wajib ketahanan pangan*, tingkat serapan dananya mencapai 93,46%.

Ketahanan Pangan diartikan dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, dan terdistribusi dengan harga terjangkau. Adapun indikator untuk mengetahui ketahanan pangan penduduk/masyarakat di suatu wilayah melalui pola konsumsi pangan masyarakat. Jenis pangan yang beragam merupakan persyaratan utama untuk menghasilkan pola pangan yang bermutu gizi seimbang berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal.

Untuk mengukur upaya penganekaragaman dibidang penyediaan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Sumbawa, dibutuhkan suatu parameter berupa Pola Pangan Harapan (PPH), karena dengan pendekatan PPH maka skor mutu pangan yang dikonsumsi penduduk dapat dinilai, yakni semakin tinggi skor PPH maka menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Adapun target skor pola Pangan Harapan Nasional maupun regional sebesar 100,0 yang menggambarkan situasi pola konsumsi sudah beragam dan memenuhi angka kecukupan energi dan protein, sedangkan Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil survey mandiri Pola Pangan Harapan masih berada dibawah target nasional dengan Skor PPH sebesar 82,10, akan tetapi bila dibandingkan dengan skor PPH pada tahun 2012 sebesar 77,56 dan tahun 2011 sebesar 75,00, maka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hasil ini mengindikasikan bahwa situasi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 survey konsumsi pangan dilakukan pada 9 (Sembilan) kecamatan yaitu : Kecamatan Alas, Utan, Sumbawa, Batu Lanteh, Ropang, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lape dan Empang. Berdasarkan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

hasil survey yang telah dilakukan, relatif belum berimbang apabila dilihat dari prinsip gizi seimbang dan keragaman bahan makan seperti :

1. Padi-padian, yaitu beras, jagung, terigu dan olahannya menyumbangkan energi terbesar dengan skor PPH sebesar 25,0 (skor ideal 25,0).
2. Pangan hewani, yaitu ikan, daging, telur, susu dan hasil olahannya menempati posisi kedua dalam menyumbangkan energi sebanyak 222 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 22,2 (skor ideal 24,0).
3. Minyak dan lemak, yaitu minyak kelapa, minyak goreng/kelapa sawit dan margarin memberikan sumbangan energi sebanyak 146 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 3,6 (skor ideal 5,0).
4. Umbi-umbian, yaitu ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya menyumbangkan energi sebanyak 128 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 2,5 (skor ideal 2,5).
5. Sayur dan buah, yaitu semua jenis sayuran dan buah-buahan menyumbangkan energi sebanyak 88 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 22,0 (skor ideal 30,0).
6. Kacang-kacangan, yaitu kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya memberikan sumbangan energi sebanyak 59 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 5,9 (skor ideal 10,0).
7. Gula, yaitu gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup menyumbangkan energi sebanyak 30 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 0,7 (skor ideal 2,5).
8. Buah/Biji Berminyak, yaitu kelapa, kemiri, kenari, mete dan coklat memberikan sumbangan energi sebanyak 6 Kkal/hari dengan skor PPH sebesar 0,1 (skor ideal 1,0).

Berdasarkan 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 menunjukkan rata-rata konsumsi energi sebesar 1.914,3 Kkal/kap/hari atau sebesar 95,7 % dari angka kecukupan energi yaitu 2000 Kkal/kap/hari.

Kegiatan lainnya pada urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Adapun penambahan desa dari



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

tahun ke tahun, seperti pada tahun 2013 sebanyak 96 desa dari 72 desa pada tahun 2012 dan 48 desa pada tahun 2011. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa memiliki rasio ketersediaan pangan lebih dari 1 (satu) yang artinya daerah tersebut surplus pangan serealia, atau kebutuhan konsumsi normative dapat dipenuhi dari produksi bersih serealia serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Sedangkan untuk Kecamatan Sumbawa berada pada rasio 0,98, sehingga masuk dalam kategori waspada.

Terkait dengan program Desa Mandiri Pangan (MAPAN) yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangganya. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat di pedesaan. Adapun pelaksanaan program tersebut dari cakupan desa mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana pada tahun 2013 dilaksanakan di 18 desa, dari 15 desa pada tahun 2012 dan 12 desa pada tahun 2011. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di desa rawan pangan dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumberdaya modal terbatas, akses teknologi rendah dan infrastruktur pedesaan terbatas.

Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terkait dengan peningkatan ketahanan pangan, mendapatkan apresiasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berupa :

1. Penghargaan Adykarja Pangan Nusantara (APN) Tingkat Nasional dengan kategori :
 - Pelayan Ketahanan Pangan kepada Hasri, S.P. (PPL Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk).
 - Pemangku Ketahanan Pangan kepada Yani (Kepala Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano)
 - Pelopor Ketahanan Pangan kepada Busairi, S.P.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

2. Terpilih sebagai salah satu liputan Tingkat Nasional Program Desa Mandiri Pangan di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk dalam acara Suka Tani Kementerian Pertanian RI yang disiarkan di TV One dan TVRI.
3. Lomba Tingkat Provinsi, dengan berhasil meraih :
 - Juara I lomba Harinya PKK yang diberikan kepada kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Plampang Kecamatan Plampang.
 - Juara II lomba Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan yang diberikan kepada Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Simu.
 - Juara III lomba Cipta Menu yang diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa.

Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib ketahanan pangan pada tahun 2013 disajikan pada lampiran.

4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. Adapun sasaran penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan perempuan diantaranya adalah memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan politik dan pembangunan masyarakat baik melalui pemerintahan maupun kegiatan sosial.

Sebagai upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka telah dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan penyadaran serta pembentukan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga peduli pada perempuan dan anak yang diberikan kepada 120 orang dengan lokasi yang berbeda setiap tahun, dimana pada tahun 2013 dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu Plampang, Moyo Utara, Rhee dan Kecamatan Alas, hal ini ditujukan agar masyarakat mempunyai wawasan dan pemahaman tentang isi, penjelasan dan pendalaman terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*traffiking*), sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak korban pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga maupun seksual dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa, hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 89 kasus dan telah tertangani oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) 100%. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2012 sebanyak 134 kasus, maka terjadi penurunan kasus KDRT, sehingga dihasilkan rasio KDRT dari tahun 2012 sebesar 0,13% kasus menurun menjadi 0,08% kasus pada tahun 2013. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran dan fungsi keluarga harmonis dapat terwujud.

Adapun kegiatan lainnya seperti Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yakni dengan memperkuat jaringan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang tujuan umumnya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas Kecamatan Sayang Ibu dengan sasaran kegiatan adalah Satgas GSI tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta ibu hamil, ibu menyusui, kader posyandu, bayi, balita dan anak. Pada tahun 2013 dilaksanakan lomba Kecamatan Gerakan sayang ibu yang dipusatkan di Kecamatan Lenaguar. Selain itu, kegiatan pengembangan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang telah dilaksanakan pada 3 (tiga) Kecamatan yakni di desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas, Desa Nijang Kecamatan unter Iwes dan Desa Jorok kecamatan Utan yakni berupa pemberian bimbingan manajemen usaha dan bantuan modal kepada 90 orang, anggota kelompok usaha ekonomi perempuan.

Gambaran pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa, dapat diukur dari proporsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan, hal ini tercermin dari jumlah PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sebanyak 8.042 pegawai dengan proporsi pria sebesar 57,04% (4.587 orang) dan perempuan sebanyak 42,96% (3.455 orang), mengalami peningkatan proporsi dibandingkan dengan tahun 2012 dengan jumlah PNS sebanyak 8.196 orang, dengan proporsi pria 57,39 % (4.704 orang) dan perempuan 42,61% (3.492 orang). Untuk jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta lainnya terdapat sebanyak 4.939 orang, hal ini mencerminkan bahwa keikutsertaan perempuan cukup besar untuk



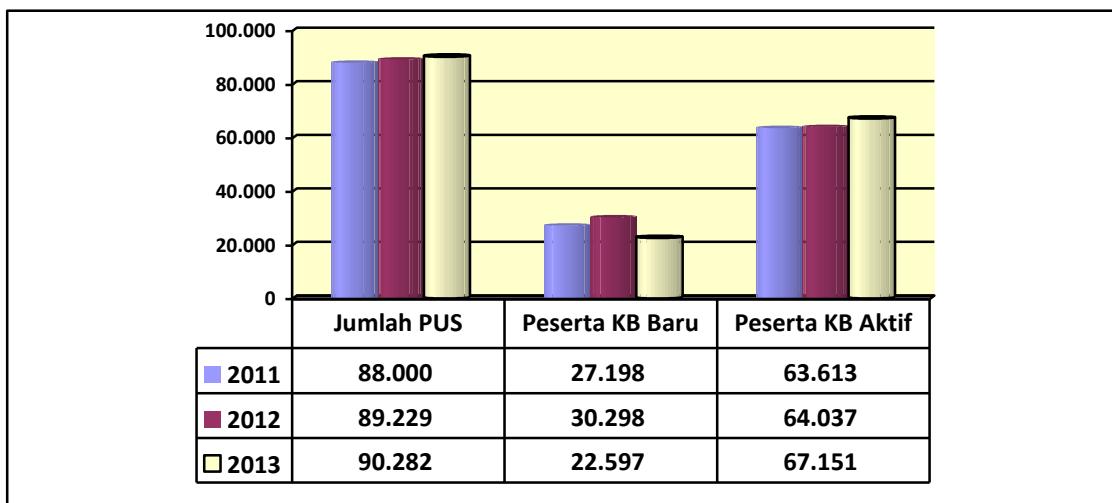
berperan aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam upaya pemenuhan terhadap hak anak, maka Pemerintah Daerah secara kontinyu setiap tahun merealisasikan penyaluran pendapat anak dalam bentuk aspirasi, pandangan dan merencanakan kegiatan serta membangun kerjasama dengan pihak lain (orang dewasa), sehingga pada tahun 2013 telah dilaksanakan Temu Anak Samawa dengan sasaran kegiatan adalah anak-anak dari usia 7 hingga 17 tahun untuk menjadi peserta Temu Anak Samawa, dari kegiatan Temu Anak Samawa yang diikuti oleh 50 peserta telah terpilih 10 orang anak perwakilan yang dikirim ke Mataram dan dari mereka dipilih 2 orang anak sebagai wakil NTB untuk mengikuti Duta Anak Nasional tahun 2013 di Provinsi Yogyakarta.

4.1.2.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Arah kebijakan pembangunan pada urusan wajib keluarga berencana dan urusan keluarga sejahtera adalah : 1). Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, antara lain melalui peran serta masyarakat dan pembantu pembina keluarga berencana desa; 2). Penataan kembali pengelolaan keluarga berencana dengan sistem informasi yang *up to date* dan jejaring kerja yang aktif berdasarkan kemitraan; 3). Penguatan Sumber Daya Manusia operasional program KB; 4). Pengadaan sarana operasional pelayanan komunikasi informasi dan edukasi program KB; 5). Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 6). Pemenuhan pembiayaan program KB.

Dalam rangka mewujudkan Keluarga Berencana diperlukan peran aktif masyarakat dalam upaya menurunkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk dapat ditekan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghasilkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sebagai wujud terciptanya keluarga yang berkualitas.



**Gambar 4.11
Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif 2011-2013**

Pada tahun 2013 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Sumbawa berjumlah 90.282 PUS, bila dibandingkan dengan PUS pada tahun 2011 dan 2012, maka terjadi peningkatan rata-rata PUS sejumlah 1,29%. Berdasarkan jumlah PUS tersebut terdapat 22.597 atau 25,03% peserta KB Baru dan 67.151 atau 74,38% peserta KB Aktif. Terlihat bahwa rata-rata peningkatan peserta KB Baru mengalami penurunan sebesar 7,01%, sementara untuk peserta KB Aktif meningkat rata-rata pertahun sebesar 2,76%, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ber-KB semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai wujud terciptanya keluarga yang berkualitas.

Pengendalian kelahiran merupakan bagian dari pengendalian pertumbuhan penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran serta masyarakat secara sukarela dalam mensukseskan program keluarga berencana terus ditumbuhkan, antara lain meningkatkan sosialisasi guna membuka kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti program keluarga berencana. Terhadap peserta KB tidak hanya ditujukan untuk kaum wanita saja namun kaum pria juga merupakan objek yang perlu mendapat perhatian untuk digarap. Pada tahun 2013 terdapat 990 peserta KB baru pria, sedangkan untuk peserta KB aktif pria yang terlayani sebanyak 1.862 akseptor.

Perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap keluarga berencana tercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang diraih baik ditingkat nasional



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

maupun tingkat provinsi, seperti :

1. Penghargaan dibidang kependudukan kaitannya dengan pemberian Akta Kelahiran Gratis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Bupati Sumbawa.
2. Penghargaan Manggala Karya Kencana untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa.
3. Kategori Favorit Satu Keterpaduan Program BKB (Bina Keluarga Balita) Tingkat Nasional dan Juara III Tingkat Nasional Lomba Pengelola Kelompok UPPKS.
4. Juara I Tingkat Provinsi pada :
 - Lomba RAP dari PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)
 - Lomba PIK-Remaja kategori "Tumbuh" atas nama PIK "Restar" dari Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes
 - Lomba Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Lomba Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)
 - Lomba Kelompok BKL (Bina Keluarga Lingkungan)
 - Lomba Pengelola BKB (Bina Keluarga Balita)
 - Lomba Kelestarian Ber-KB 15 Tahun
 - Lomba Kelestarian Ber-KB 10 Tahun
5. Juara II Tingkat Provinsi :
 - Lomba Kelestarian Ber-KB 20 Tahun
 - Lomba Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)
 - Lomba Keluarga Harmonis
 - Lomba PKB (Penyuluhan Keluarga Berencana)
 - Lomba PPKBD (Petugas Pembina Keluarga Berencana Desa)
 - Lomba Poster PUP

4.1.2.16. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan penetapan urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana *urusan perhubungan* dan *urusan*



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

komunikasi dan informatika tahun 2013 dengan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 87,62 %.

Dalam rangka meningkatkan daya dukung perhubungan melalui peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan sarana penunjang perhubungan darat berupa pembangunan Halte yang berlokasi di Kecamatan Utan dan Rhee sebanyak 3 unit, pengadaan pagar pengaman jalan sepanjang 132 meter yang berlokasi di Kecamatan Sumbawa, pengadaan marka jalan/zebra cross sepanjang 1.249 m², sedangkan terhadap fasilitas penunjang perhubungan laut berupa pembangunan tambatan perahu Labu Pade yang berlokasi di Kecamatan Utan.

Peningkatan layanan angkutan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketersediaan kendaraan yang layak jalan untuk menjamin keselamatan penumpang yang menjadi pengguna angkutan. Pada tahun 2013 telah dilakukan uji KIR angkutan umum sebanyak 2.898 unit kendaraan yang terdiri dari mobil bus sebanyak 639 unit dan mobil barang sebanyak 2.259 unit, dengan peningkatan rata-rata per tahun yakni dari tahun 2011-2013 sebesar 9,51% unit kendaraan yang telah melaksanakan uji KIR kendaraan, dimana pada tahun 2012 terdapat sebanyak 2.603 unit kendaraan dan tahun 2011 sebanyak 2.417 unit. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya guna tercipta rasa aman bagi pengguna angkutan, sehingga dalam pengoperasian angkutan umum di jalan raya telah memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan dengan tingkat disiplin yang tinggi sebagai pengguna jalan raya.

Perizinan dibidang perhubungan juga diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara memberikan ijin operasi dan ijin trayek kendaraan umum pada tahun 2013 sebanyak 219 izin dari 246 izin yang diberikan pada tahun 2012. Untuk jumlah sarana angkutan darat, terdiri dari Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 4 buah, Angkutan Kota sebanyak 84 buah, Angkutan Pedesaan sebanyak 135 buah, Angkutan Kota Dalam Provinsi sebanyak 66 buah dan Angkutan Tradisional sebanyak 875 buah.

Terhadap penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 kembali mendapatkan penghargaan **Wahana Tata Nugraha** dengan Piala Kategori kota tertib Lalu Lintas dari Menteri Perhubungan.



4.1.2.17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib komunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan informasi antar dinas dengan *e-goverment* dipandang sangat penting untuk efisiensi di dalam penggunaan sumberdaya, kecepatan waktu dan akurasi dalam proses tukar menukar informasi di lingkungan instansi. Pengembangan infrastruktur jaringan memiliki output terpeliharanya dan tersedianya komunikasi LAN/WAN di SKPD sehingga mudah dalam mengakses informasi. Untuk menghindari penggunaan Software yang ilegal, maka setiap tahun selalu dilaksanakan sosialisasi dan bintek open source software pada lingkup SKPD se-Kabupaten Sumbawa, yang muaranya akan menjamin ketersediaan software yang legal.

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui teknologi informasi telah menyediakan Website resmi pemerintah daerah yakni *sumbawa.go.id*, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu ketersediaan Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPD) dengan jangkauan siaran yang hampir menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa berdampak luas kepada penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Peningkatan siaran RPD juga dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama RPD dengan RRI yang menghasilkan informasi Kabupaten Sumbawa yang tersebar baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak lokal, regional dan nasional, serta memfasilitasi media lokal untuk berperan aktif dalam membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk mendukung penyebaran akses informasi serta pelayanan kehumasan, di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2013 telah tersedia media Surat kabar nasional/lokal sejumlah 11 buah, radio lokal 3 buah, TV lokal 1 buah dan Webside sebanyak 5 buah yakni *Sumbawakab.go.id*, *Dprd_Sumbawakab.go.id*, *Lpse.Sumbawakab.go.id*, *Distan_Sumbawakab.go.id* dan *Bappeda_Sumbawakab.go.id*.

Suksesnya pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sumbawa, karena adanya dayadukung masyarakat, oleh karenanya kebijakan pemerintah perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat luas baik melalui pameran



pembangunan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, keberadaan layanan hotspot kabupaten, situs sumbawakab.go.id dan pusat layanan internet kecamatan serta koordinasi program Kampung Media Digital. Terkait langkah serta upaya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Nasional dalam hal transparansi anggaran kepada masyarakat melalui Website.

4.1.2.18. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan wajib pertanahan sepanjang tahun 2013 ditujukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena selama ini masalah pertanahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang ada. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang intensif sebagai upaya peningkatan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masalah pertanahan yang timbul dapat teratasi.

Untuk ketertiban administrasi tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2013 telah dilakukan dokumentasi database tanah agar semua tanah yang dimiliki dapat terdata secara utuh dan lengkap. Kondisi terkini tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat sejumlah 400 objek tanah atau seluas 3.311.883 m², sementara tanah yang masih dalam proses sertifikasi sejumlah 58 objek tanah atau seluas 288.852 m². Sampai dengan saat ini, telah diusulkan penghapusan objek tanah yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dikuasai dan bersertifikat an. Instansi Vertical sejumlah 13 objek tanah dengan luas 129.071 m² yang terdiri dari Tanah Polsek Plampang, Polsek Empang, Polsek Lape/Lopok, Polsek Alas, Polsek Utan, Polsek Moyo Hilir, Polsek Moyo Hulu, Polsek Lenangguar, Polsek Lunyuk, Polsek Batu Lanteh, Rumah Dinas Dandim, Asrama Kodim Lama dan Eks. Mako Brimob.

Selain itu, telah dilakukan pengamanan terhadap objek tanah yang belum termanfaatkan (masih kosong) dengan memasang informasi kepemilikan, sebagai langkah antisipasi terjadinya penyalahgunaan lahan. Sedangkan tanah-tanah yang belum tersentuh penanganannya akan terus diupayakan proses hukumnya lebih lanjut.



4.1.2.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Secara kumulatif *urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri* tahun anggaran 2013 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **81,14 %** dari pagu total anggaran belanja pada tahun 2013, baik dari sisi belanja langsung maupun dari sisi belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 diantaranya :

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :
 - Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragam.
 - Rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat.
 - Revitalisasi dan aktualisasi Pancasila.
 - Sosialisasi undang-undang politik ormas dan LSM.
2. Pengukuhan pengurus FKDM diseluruh Kecamatan Kabupaten Sumbawa.
3. Telah dilakukan penyusunan data base Parpol peserta Pemilu 2014.
4. Telah dilakukan pendaftaran ormas/LSM sesuai Permendagri nomor 33 Tahun 2012 sebanyak 9 Ormas/LSM.
5. Pengamanan Logistik dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Melakukan pendataan jumlah pos ronda /jaga disetiap desa di Kabupaten Sumbawa.
7. Melakukan koordinasi melalui kegiatan MUSPIDA dan KOMINDA dalam rangka pengendalian, memelihara ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari gangguan keamanan, memegang peranan penting terciptanya stabilisasi daerah. Kabupaten Sumbawa relatif terkendali dalam hal situasi keamanan, ini terlihat dari intensitas dan kualitas kejahatan yang tidak begitu menonjol. Adapun kegiatan yang diharapkan dapat berimplikasi pada partisipasi masyarakat, diantaranya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan praktik perjudian. Disamping itu, keberadaan petugas perlindungan masyarakat



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

(Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun jumlah Linmas pada tahun 2013 sebanyak 2.432 linmas dengan rasio sebesar 57,49, sehingga tergambar bahwa dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 57 petugas Linmas, hal ini menggambarkan peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah Linmas pada tahun 2012 sebanyak 2.256 dengan rasio dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 54 petugas Linmas. Demikian juga dengan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan, dimana pada tahun 2013 terdapat 1.775 pos siskamling, sehingga pada setiap desa/kelurahan memiliki rasio pos siskamling sebanyak 11 unit. Keberadaan Pos siskamling ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2011 terdapat sebanyak 1.706 pos siskamling, meningkat pada tahun 2012 menjadi 1.740 pos siskamling dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 35 unit pos siskamling, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio pos siskamling, maka semakin besar pula kapasitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu telah dilaksanakan pertemuan dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang akan terjadi guna menjaga kondusifitas keamanan daerah.

Keragaman umat beragama di Kabupaten Sumbawa membawa berbagai macam konsekuensi baik positif maupun negatif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang negatif perlu ditingkatkan sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, selain itu pemerintah juga melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keagamaan. Selain keragaman umat beragama di lingkungan masyarakat juga terjadi keragaman sosial, hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sehingga dapat terwujud percepatan proses asimilasi di kalangan masyarakat.

Guna meningkatnya kesadaran politik masyarakat, yang ditandai oleh peningkatan kesadaran politik masyarakat diharapkan akan mampu menciptakan suasana politik yang kondusif di kalangan masyarakat. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut berupa :



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

1. Penyusunan data kepengurusan partai politik peserta pemilu legislatif dan data jumlah TPS serta jumlah pemilih tetap pemilu 2014;
2. Koordinasi forum-forum diskusi politik, dengan fokus kegiatan adalah membentuk forum – forum yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang Undang – Undang bidang politik terutama menjelang pelaksanaan pemilu legislatif;
3. Rapat koordinasi pembina wilayah;
4. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol.

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Secara kumulatif, pelaksanaan kegiatan pada *urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri* yang dilaksanakan melalui Satpol PP Kabupaten Sumbawa tahun 2013, dengan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **91,89%**.

Berbagai upaya peningkatan terhadap kapasitas Satpol Pamong Praja sebagai institusi pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah terus dilaksanakan, hal ini dipandang penting sebagai jaminan tegaknya implementasi peraturan daerah. Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati dan aturan lainnya adalah berupa konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Pada tahun 2013 terdapat sejumlah 101 kasus pelanggaran terhadap Perda dan telah terselaikan penanganannya sebanyak 84 kasus, sementara untuk 17 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Untuk personil Satuan Polisi Pamong Praja terdapat sejumlah 159 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 36 orang dan Banpol PP sebanyak 123 orang. Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, tidak mengurangi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, diantaranya : 1). Bersama dengan TNI, telah melaksanakan tugas pengamanan eksekusi 24 bangunan kafe yang terletak di wilayah Kecamatan Labuhan Badas; 2). Melaksanakan tugas Tim terpadu di bidang perizinan dalam memberikan pertimbangan teknis yang digunakan sebagai standar pokok penertiban perizinan; 3). Menjamin keamanan terhadap Pejabat Daerah/Negara dan tempat-



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

tempat vital diwilayah Kabupaten Sumbawa dengan menempatkan personil/petugas piket serta melakukan mobilisasi personil dalam rangka pengamanan pada kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta menjaga kelangsungan terselenggaranya kegiatan terkendali; 4). Melakukan upaya deteksi dini dan pemetaan daerah-daerah rawan terhadap kemungkinan timbulnya upaya/gerakan kelompok-kelompok tertentu yang terindikasi melakukan tindakan anarkis ataupun pressure dan gejala-gejala lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri disajikan pada lampiran.

4.1.2.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

a. Sekretariat Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **80,48%** dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan terlaksananya proses pemerintahan yang efektif, maka perlu penataan perundang-undangan sebagai kelengkapan perangkat aturan, baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak **50 (lima puluh) Peraturan Bupati dan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah**, seperti :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Jalan Kabupaten.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Sertifikasi Laik Sehat.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samalewa.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarakan Pendidikan.
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Organisasidana Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak.
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015.
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, tanggal 10 Oktober 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan juga dilaksanakan penyuluhan hukum terpadu, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban.

Untuk terlaksananya urusan pemerintah daerah ditempuh melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dalam rangka membentuk organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan dapat menjawab tuntutan pelayanan pada masyarakat. Beberapa regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan penataan organisasi ini adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Kabupaten Sumbawa. Selain itu, juga dilaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2013 survey IKM dilakukan terhadap pelayanan kesehatan di 15 UPT. Puskesmas yaitu UPT Puskesmas Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Lopok, Lape, Maronge, Tarano, Labangka, Moyo Hulu, Batu Lanteh, Ropang, Lunyuk, Lantung dan Lenangguar. Berdasarkan hasil survey dan pengukuran IKM atas pelayanan kesehatan tersebut, memperoleh nilai rata-rata 2,51-3,25 dengan mutu pelayanan **Baik (B)**.

Pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), telah difasilitasi 13 SKPD dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada aparatur SKPD dalam memberikan pelayanan publik dengan tujuan untuk terwujudnya standar pelayanan minimal di Instansi Pemerintah. SKPD yang telah menyelesaikan penyusunan SOP pada tahun 2013 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Inspektorat,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kantor Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kecamatan Empang dan Sekretariat DPRD. Sampai dengan saat ini SKPD yang telah memiliki SOP sebanyak 32 SKPD, hal ini menunjukkan masih terdapat 23 SKPD yang belum memiliki SOP dan menjadi target kinerja kegiatan pada tahun anggaran 2014 dan 2015.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten sebagai pilot project reformasi birokrasi di daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyusun *Road Map* reformasi birokrasi yang dilanjutkan pada tahun 2013 dengan menyelesaikan naskah *Road Map* reformasi birokrasi, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2013 tentang *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan fungsi manajemen pemerintahan, maka kebijakan pembangunan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagaimana dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum, maka fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud tetap dipandang penting. Untuk itu, pada tahun 2013 dilaksanakan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pembangunan dengan melakukan pemantauan terhadap capaian program/kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh SKPD. Prinsip pengendalian ini, adalah bahwa pelaksanaan Kegiatan di SKPD baik fisik maupun non fisik harus sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Hasil pemantauan dan pengendalian dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun - tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan kebijakan pelayanan kesejahteraan rakyat, pemahaman agama dan kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, secara berkala dilakukan pembinaan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

terhadap pengelolaan sarana ibadah umat Islam 493 buah masjid, 5 buah gereja, 37 buah pura dan 1 buah Wihara, sedangkan organisasi keagamaan umat beragama sebagai pilar penting konstruksi kerukunan umat beragama, secara kuantitatif terdapat 44 organisasi yang terdiri dari organisasi Muhammadiyah sebanyak 13 buah, NU sebanyak 14 buah, NW sebanyak 16 buah dan Al Irsyad sebanyak 1 buah.

Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas lembaga keuangan, kebijakan harga serta kebijakan lainnya terkait dengan perekonomian daerah, maka dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah harus melalui perumusan kebijakan. Kebijakan ekonomi daerah meliputi arahan untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam hal kebijakan anggaran untuk mendorong stimulus ekonomi daerah. Berhubungan dengan sasaran ini ketercapaian sasaran diterapkan dengan penyusunan harga satuan upah dan bahan pekerjaan, koordinasi pelaksanaan pembangunan, Koordinasi sektor pengembangan perekonomian daerah serta pembinaan dan pengembangan BUMD.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, telah dilakukan pelayanan fasilitasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan kehumasan, yang ditujukan dalam rangka berfungsinya arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjaminnya responsibiliti antara kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk menjaga *gap* ini adalah dilakukan melalui implementasi kegiatan-kegiatan: (i) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat; (ii) Rubrik "masyarakat bertanya pemerintah menjawab (MBPM)"; (iv) peliputan dan pemberitaan; (v) Penerbitan khusus pemerintah daerah; (vi) Kerjasama publikasi dengan media massa; (vii) Iklan layanan masyarakat dan interaktif melalui media elektronik; (viii) Pemberitaan dan penyebaran informasi.

Secara lebih rinci target dan realisasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, dan pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.



b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dalam menjalankan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **83,25%** dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Tingginya dinamika aktifitas DPRD dalam mengimplementasikan Tri Fungsi DPRD baik dalam kegiatan persidangan DPRD, konsultasi dan kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, diperlukan sistem pendampingan sekretariat DPRD yang berkualitas, yakni mampu memfasilitasi secara administratif dan operasional seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut di antaranya adalah pelayanan dalam kegiatan rapat pembahasan Perda APBD sebanyak 100 kali, melakukan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama sebanyak 50 kali, rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 245 kali, pelaksanaan rapat - rapat paripurna sebanyak 49 kali, serta reses sebanyak 3 kali dalam tahun 2013. Adapun permasalah yang sering dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, diantaranya sering berubahnya jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD pada setiap masa sidang. Disamping itu keterbatasan waktu yang tersedia dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan insedentil Dewan yang tidak terjadwal, akibat semakin banyaknya tuntutan penyampaian aspirasi masyarakat untuk melakukan hearing/dengar pendapat terhadap permasalahan yang ada, baik dalam dinamika pelanggaran tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

c. Inspektorat

Pada penetapan kinerja SKPD tahun 2013, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, secara simultan, tingkat keterserapan anggaran hingga akhir tahun 2013 mencapai **91,81%** dari total anggaran belanja yang ditargetkan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan fungsi pengawasan di daerah adalah :

- 1). Menurunnya tingkat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD, yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, yakni dengan melaksanakan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan, tindaklanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan melakukan evaluasi berkala terhadap temuan hasil pengawasan. Berdasarkan capaian kinerja, terjadi penurunan kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di seluruh SKPD dengan penurunan kasus rata-rata pertahun yakni dari tahun 2011-2013 sebesar 11,62%, dimana kasus pada tahun 2011 sebanyak 114 kasus, meningkat menjadi 116 kasus pada tahun 2012 dan menurun menjadi 87 kasus pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu dari tahun ke tahun dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Terhadap keberhasilan pelaksanaan tindaklanjut kerugian daerah, kerugian Negara periode tahun 1990 sampai dengan Oktober 2013 telah berhasil dikembalikan ke kas daerah/Negara sebesar 65,33% dari total nilai temuan sebesar Rp.18.309.945.338,80,-
- 2). Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan yang terlatih sebagai APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) yang dilaksanakan melalui program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Hal ini ditindaklanjuti melalui kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian. Untuk itu terus diupayakan peningkatan terhadap jumlah aparatur pengawas terlatih guna menghasilkan aparatur pemeriksa yang profesional, handal dan mempunyai integritas moral yang tinggi.

Pelaksanaan beberapa kegiatan Inspektorat Kabupaten Sumbawa tidak hanya dilaksanakan oleh Inspektorat, akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan Lembaga Pengawasan lain seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang didasarkan pada penandatanganan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan BPKP



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Perwakilan Provinsi Bali Denpasar pada tahun 2002.

Selain itu untuk mendukung ketercapaian sasaran pengawasan dan pengendalian kebijakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan evaluasi kebijakan, pendataan ketersediaan objek IPPT, koordinasi evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan, fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Untuk menjamin berjalannya sistem kepemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan pengawasan yang intensif, meliputi: (a) Masalah Struktur yaitu kelembagaan pengawasan, hubungan antar lembaga pengawasan pada saat ini, apakah telah sesuai dengan perubahan lingkungan strategik terutama adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, keuangan negara dan otonomi daerah; (b) Masalah Substansi, yaitu masalah integritas, independensi, profesionalisme, koordinasi pengawasan, standar, sumber daya manusia dan akuntabilitas serta transparansi pengawasan; (c) Masalah Kultur, masalah kode etik, penghargaan atas prestasi pengawasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan pengawasan. Secara rinci mengenai target dan realisasinya disajikan pada lampiran.

d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Realisasi anggaran pada tahun 2013 sebesar 91,50% dari total belanja langsung dan tak langsung. Sebagai gambaran kondisi PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah sebagai berikut .

**Tabel 4.11
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Rincian Golongan dan Eselon
Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013**

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah PNS	%
1.	I	115	5	120	1,49
2.	II	1.361	888	2.249	27,97
3.	III	1.883	1.719	3.602	44,79
4.	IV	1.228	843	2.071	25,75
Jumlah		4.587	3.455	8.042	100,00
No	Eselon	Pria	Wanita	Jumlah PNS	%
1.	I	0	0	0	0
2.	II	30	1	31	3,41
3.	III	159	20	179	19,69



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

4.	IV	479	220	699	76,90
Jumlah Pejabat Struktural		668	241	909	11,30
Jumlah Pejabat Fungsional		3.919	3.214	7.133	88,70
Jumlah		4.587	3.455	8.042	100,00

Sumber : BKPP Kab. Sumbawa.

Berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 lebih didominasi oleh golongan III dengan proporsi sebesar 44,79%, diikuti golongan II sebesar 27,97%, kemudian golongan IV sebesar 25,75% dan yang terakhir adalah golongan I sebesar 1,49%. Besarnya proporsi golongan III ini antara lain terjadi karena adanya peningkatan beberapa PNS golongan II menjadi golongan III, hal ini mengindikasikan bahwa strata PNS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan eselon PNS, lebih didominasi oleh Eselon IV sebesar 76,90% dari jumlah pejabat struktural yang ada dengan proporsi sebesar 11,30% dari jumlah PNS di Kabupaten Sumbawa, sementara untuk pejabat fungsional proporsinya sebesar 88,70% dari jumlah keseluruhan PNS yang berada di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan tingkat pendidikannya PNS di kabupaten Sumbawa didominasi oleh Diploma-IV/Srata 1 sebesar 37,45%, seperti disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut.

**Tabel 4.12
PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013**

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Total	%
1.	SD / Sederajat	77	1	78	0,97
2.	SMP / Sederajat	159	19	178	2,21
3.	SMA / Sederajat	1.555	829	2.384	29,64
4.	D – 1	35	111	146	1,82
5.	D – II	610	630	1.240	15,42
6.	D – III	318	554	872	10,84
7.	D - IV / S-1	1.742	1.270	3.012	37,45
8.	S – 2	89	41	130	1,62
9.	S – 3	2	0	2	0,02
Jumlah		4.587	3.455	8.042	100,00

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur, pada tahun 2013, ditangani adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.13
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2013**

No.	Uraian Penanganan Kasus	Jumlah
1.	Kasus yang telah diselesaikan (terbit SK. Bupati)	51
2.	Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian	53
3.	Kasus yang masih dalam proses pembinaan	0
Jumlah		104

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

Terhadap Realisasi Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu, Satya Lencana, Taspen dan Taperum Pensiun, sebagaimana table berikut.

**Tabel 4.14
Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian
dan Tanda - tanda Jasa lainnya, Tahun 2013**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Kartu Pegawai (KARPEG)	315	318	100,95
2.	Kartu Istri (KARIS) Pegawai	264	249	94,32
3.	Kartu Suami (KARSU) Pegawai	424	319	75,24
4.	Satya Lencana (Tanda Jasa Pengabdian PNS)	40	40	100,00
5.	TASPEN	50	86	172,00
6.	TAPERUM PNS Pensiun	145	138	95,17
7.	Lain-lain	43	78	181,40
Jumlah		1.281	1.228	95,86

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

KPPT sebagai bagian dari SKPD pelaksana Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, berdasarkan tingkat realisasi anggaran sebagai deskripsi performance keterserapan anggaran mencapai **90,07%**.

Pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak dibentuknya KPPT dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008, yang mengelola 99 jenis ijin, antara lain mencakup kelompok ijin pertanian, ijin perdagangan, ijin kehutanan, ijin usaha perikanan, ijin usaha sarana pariwisata, ijin usaha pertambangan umum, ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, ijin usaha peternakan dan pemotongan hewan, ijin pelayanan medik dasar, ijin



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

pelayanan medik spesialis, ijin pelayanan medik penunjang, ijin bagi sarana pengobatan tradisional dan pengobatan tradisional, dll. Berdasarkan data pada KPPT Kabupaten Sumbawa, sampai dengan akhir tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 4.107 izin yang disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.15
Pemberian Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2013**

No.	Jenis Izin	Jumlah Izin yg Terbit	
		2012	2013
1.	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	7	7
2.	Izin Pertanian	5	16
3.	Izin Gangguan (HO/Izin Tempat Usaha)	81	146
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	197	378
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	301	240
6.	Izin Reklame	40	28
7.	Izin Penyimpanan / Penimbunan BBM	341	459
8.	Izin Perdagangan	2.645	2.523
9.	Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUPJL)	1	0
10.	Izin Kehutanan	69	111
11.	Izin Usaha Perikanan	27	25
12.	Izin Usaha Sarana Pariwisata	54	60
13.	Izin Usaha Pertambangan Umum	144	9
14.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	5	10
15.	Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan	74	82
16.	Izin Pelayanan Medik Dasar	1	0
17.	Izin Pelayanan Medik Spesialis	2	0
18.	Izin Pelayanan Medik Penunjang	9	12
19.	Izin Bagi Saran Pengob. Tradisional & Pengob. Tradisional	2	1
Jumlah		4.005	4.107

Sumber Data : KPPT Kab. Sumbawa.

Pada tabel 4.15, terlihat bahwa izin tertinggi yang dikeluarkan pada tahun 2013 berupa Izin Perdagangan sebanyak 2.523 izin, diikuti oleh izin penyimpanan/penimbunan BBM sebanyak 459 izin, izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 378 izin, izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 240 izin, dan izin Gangguan (HO/Izin Tempat Usaha) sebanyak 146 izin serta izin lainnya dengan total izin yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak 4.107 izin, sehingga terjadi peningkatan jumlah perizinan yang dikeluarkan sebesar 2,55% dibandingkan izin yang dikeluarkan pada tahun 2012 dengan jumlah izin sebanyak 4.005 izin.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Adapun keberhasilan pelayanan izin yang dicapai pada tahun 2013 adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan izin sebagai bentuk ketiaatan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban hukum sebagai warga negara, hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari target sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 426.869.543,- (131,34%). Demikian juga dengan Izin Gangguan dari target sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 151.207.960,- (274,92%).

Secara rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2013 disajikan dalam lampiran.

f. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2013 sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **86,10%**. Sesuai dengan fungsinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka beberapa pelaksanaan program dan kegiatan melalui DPPK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan professional, telah dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan SP2D;



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Pengelolaan Administrasi dan Perkartuan Gaji PNS Daerah Otonom;
- Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penerbitan SPD;
- Penyaluran Dana Bantuan;
- Penyusunan Akuntansi Pendapatan Daerah;
- Penyusunan Akuntansi Belanja Daerah;
- Pengelolaan Administrasi Kegiatan TPTGR;
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Rencana Penerimaan Daerah;
- Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah;
- Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD;
- Sosialisasi PBB dan PAD kepada Wajib Pajak;
- Perhitungan, Penerbitan dan Penyampaian SKPD;
- Pelayanan keberatan Atas Materi Pajak;
- Penagihan PAD dan PBB;
- Penyusunan Tahapan Penerimaan Daerah;
- Koordinasi Penyelesaian Dana Perimbangan;
- Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB;

Pada tahun 2013 dilaksanakan beberapa kegiatan mulai dari pendataan kembali potensi penerimaan, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penyusunan rencana penerimaan, sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi, perhitungan dan penyampaian SKPD, pelayanan keberatan atas materi ketetapan pajak, penagihan PAD dan PBB dan rekonsiliasi penerimaannya, koordinasi penyelesaian dana perimbangan. Mengenai hasil-hasil yang dicapai, secara khusus disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban APBD.

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan, disajikan pada lampiran.

g. Kantor Kecamatan

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan tahun 2013 relatif seragam meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pengembangan sistem



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

pelaporan, program penyusunan rencana kerja SKPD, program pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, program koordinasi pembangunan kecamatan, program pembangunan partisipatif kecamatan. Pelaksanaan kegiatan oleh kantor kecamatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan *urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiuan dan Persandian*.

Capaian kegiatan input dan output yang dilaksanakan pada tahun 2013 pada kantor kecamatan menurut rincian kecamatan di Kabupaten Sumbawa dijelaskan sebagai berikut.

(a) Kantor Kecamatan Alas Barat

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas Barat tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **89,37%**.

(b) Kantor Kecamatan Alas

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,06%**.

(c) Kantor Kecamatan Buer

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Buer tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,16%**.

(d) Kantor Kecamatan Utan

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Utan tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan



tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,96%**.

(e) Kantor Kecamatan Rhee

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Rhee tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,41%**.

(f) Kantor Kecamatan Labuhan Badas

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labuhan Badas tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,53%**.

(g) Kantor Kecamatan Sumbawa

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumbawa tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,57%**.

(h) Kantor Kecamatan Unter Iwes

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Unter Iwes tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,95%**.

(i) Kantor Kecamatan Batulanter

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Batulanter tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,95%**.



(j) Kantor Kecamatan Moyo Utara

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Utara tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,95%**.

(k) Kantor Kecamatan Moyo Hilir

Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hilir tahun 2013 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,43%**.

(l) Kantor Kecamatan Moyo Hulu

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hulu tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,40%**.

(m) Kantor Kecamatan Lenangguar

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lenangguar tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **96,45%**.

(n) Kantor Kecamatan Ropang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ropang tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,93%**.

(o) Kantor Kecamatan Lantung

Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kecamatan Lantung tahun 2013 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,79%**.

(p) Kantor Kecamatan Orong Telu

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Orong Telu tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **92,61%**.

(q) Kantor Kecamatan Lunyuk

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lunyuk tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **98,64%**.

(r) Kantor Kecamatan Lopok

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lopok tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **90,09%**.

(s) Kantor Kecamatan Lape

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lape tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **97,31%**.

(t) Kantor Kecamatan Maronge

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Maronge tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,41%**.



(u) Kantor Kecamatan Plampang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Plampang tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **94,62%**.

(v) Kantor Kecamatan Labangka

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labangka tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,68%**.

(w) Kantor Kecamatan Empang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Empang tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,85%**.

(x) Kantor Kecamatan Tarano

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tarano tahun 2013 menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **99,30%**.

4.1.2.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa tahun 2013 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **93,66%** dari pagu total anggaran belanja baik dari sisi belanja langsung maupun dari sisi belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, diarahkan pada beberapa sasaran di antaranya adalah pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

perencanaan dan pembangunan desa. Menyadari bahwa keberdayaan masyarakat desa yang dihajatkan dalam pembangunan daerah ini bukan hanya sekedar agar masyarakat di desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan saja, melainkan juga secara kelembagaan. Masalah aktual pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari persoalan ekonomi baik nasional maupun daerah serta kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian, maka penanganan kelembagaan ekonomi dan pembinaan aparatur dipandang perlu untuk menjadi perhatian. Untuk hal tersebut, pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan.

Dalam rangka terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dan kecamatan secara partisipatif, maka pada awal tahun 2013 dilaksanakan Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Maka pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013 di Kabupaten Sumbawa telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan perencanaan seperti : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top Down, dan Bottom Up. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten sepanjang tahun 2013 sudah dipandang cukup baik, ditandai dengan kelancaran pelaksanaan musrenbang pada 165 desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan dari hasil Musrenbang adalah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun berikutnya, Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD ataupun gabungan SKPD, Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan. Prioritas Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2014 sebagai gambaran hasil musrenbang desa dan kecamatan adalah isu tentang reformasi birokrasi, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, dan peningkatan ekonomi lokal dan iklim investasi. Adapun pelaksanaan Musrembang Kecamatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 13 s.d 20 Pebruari 2013 di seluruh Kecamatan.

Selain pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, kegiatan – kegiatan lainnya yang dilaksanakan diantaranya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Kegiatan ini dilatarbelakangi tingginya angka mortalitas balita serta masih rendahnya penyelesaian pendidikan dasar menengah pertama anak-anak dalam rumah tangga miskin. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh ibu-ibu hail, ibu menyusui dan bayinya, anak-anak balita serta anak-anak usia sekoah dasar dan menengah pertama yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin-rumah tangga sangat miskin.

Disamping itu implementasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM-MPd masih dilaksanakan pada 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Utan, Lape, Plampang, Labuhan Badas, Lunyuk, Alas Barat, Empang, Labangka, Orong Telu, Lenangguar, Lantung dan Kecamatan Lopok. Besaran alokasi anggaran dari APBD adalah Rp. 721.495.000,- sebagai dana pendamping yang dipersyaratkan sebesar 5% dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri perdesaan. Disamping itu pemerintah daerah telah melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung keberdayaan masyarakat diantaranya yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia yang bersifat partisipatif dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, sehingga masyarakat termotivasi menjadi kreatif, inovatif dan memiliki kecerdasan like skill. Pemberdayaan tersebut berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan prinsip teknis dapat dipertanggungjawabkan, secara ekonomis memberikan keuntungan dan secara sosiologis tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta dapat diterima oleh masyarakat luas. Berdasarkan penilaian Tim Terpadu



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Teknologi Tepat Guna terjaring penemuan baru Teknologi Tepat Guna tahun 2013, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.16
Teknologi Tepat Guna di Kab. Sumbawa Tahun 2013**

No	Nama Teknologi Tepat Guna	Penemu	Kecamatan
1	Alat Pembuat Pupuk Cair Organik	Slamet Raharjo, S.Pd	Unter Iwes
2	Double Sprayer Elektrik	Tommy Oktavariyanto	Moyo Utara
3	Kompor Bio Etanol	Jon Taufan, S.Pt	Alas
4	Kompor Arang Sekam	Samsuddin, S.Pd	Sumbawa
5	Marker Tanam Padi Sawah	Erwan Saripuddin,S.P.	Utan
6	Botol infus Tanaman Teron (INBATRON)	I Ketut Teron	Rhee
7	Alat Listrik Statis	Nanang Ansari	Labuhan Badas

diantaranya penemuan-penemuan ini, ditindaklanjuti dengan keikutsertaan dalam ajang kontes Gelar Anugerah Teknologi Tepat Guna NTB seperti Infus Botol Tanaman Teron yang berhasil menjadi juara I dan Double Sprayer Elektrik sebagai juara III serta diajukan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas temuan TTG nya. Keberhasilan ini dapat menjadi motivasi masyarakat dalam melahirkan teknologi kreatif selanjutnya.

Kegiatan lainnya adalah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, yang sasarannya adalah fasilitasi Tim Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, BKBPP, TP-PKK, Dinas Sosial, Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan. Terhadap upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu bukan merupakan tanggungjawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada dimasyarakat, termasuk kader. Kondisi ini setidaknya akan berimbas pada capaian yang berhasil diraih oleh posyandu Mawar Merah I Desa Pamanto Kecamatan Empang sebagai juara II pada Lomba Posyandu Tingkat Provinsi.

4.1.2.22. Urusan Wajib Sosial

Urusan Sosial Kabupaten Sumbawa tahun 2013 sebagai pelaksanaan *urusan sosial* dengan tingkat keterserapan input (dana), mencapai **97,13%** dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, rentan dan miskin, maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti :

1. Pengembangan Kesejahteraan Sosial, diantaranya :

- Pelatihan keterampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di Desa Brang Rea Kecamatan Moyo Hulu, Desa Dete Kecamatan Lape, Desa Langam Kecamatan Lopok, Desa Simu Kecamatan Maronge dan Desa Sebedo Kecamatan Utan.
- Dilaksanakan bimbingan sosial bagi masyarakat yang berada dilokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu di Dusun Suka Maju Desa Tangkampulit Kecamatan Batu Lanteh dan Dusun Karya Baru Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu sebanyak 139 KK dari dana APBD. Selain itu telah terlaksananya pemberdayaan tahun I bagi masyarakat KAT di Dusun Sukamaju Desa Tangkampulit Kecamatan Batu Lanteh sebanyak 91 KK dan Dusun Karya Baru Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu sebanyak 43 KK melalui dana Tugas Pembantuan dan 5 KK di Dusun Suka Maju Desa Tangkampulit Kecamatan Batu berupa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja bagi warga, bantuan bibit tanaman bagi warga, peralatan rumah tangga bagi warga. Terlaksananya pemberdayaan tahun ke II bagi masyarakat KAT di Dusun Kopo Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu sebanyak 105 KK dan Dusun Nanga Lidam Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 30 KK dengan pemberdayaan berupa pemberian bantuan jaminan hidup dan pembangunan sarana ibadah melalui dana Tugas Pembantuan serta terlaksananya perencanaan lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu di Dusun Lepak Loang dan Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

2. Pembinaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, diantaranya :

- Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja perbengkelan bagi 20 orang dan pemberian peralatan perbengkelan bagi 4 kelompok anak terlantar dari Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara, Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, Desa Jorok Kecamatan Utan dan Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes.
- Pemberian bantuan uang tunai (asistensi lanjut usia) bagi lansia yang tidak mampu menghidupi dirinya sebanyak 40 orang dari Desa Labuhan Sumbawa, Desa Labuhan Badas, dan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Desa Selante Kecamatan Plampang, Desa Maronge Kecamatan Maronge, Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Sumbawa. Pada tahun 2013 juga telah dikirim kelayan ke Solo sebanyak 1 orang penyandang cacat yang masih produktif, berasal dari Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh.
- Terlaksananya bimbingan mental sosial 20 orang penyandang cacat yang masih produktif yang akan dikirim ke Balai Besar Rehabilitasi, berasal dari Kecamatan Maronge, Moyo Hilir, Moyo Utara, dan Moyo Hulu.
- Terlaksananya praktik belajar kerja bagi eks Napza sebanyak 20 orang dari Kecamatan Maronge, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Rhee, dan Kecamatan Lopok.
- Terlaksananya praktik belajar kerja bagi eks Napi sebanyak 20 orang dari Kecamatan Unter Iwes, Lape, Alas dan Maronge.
- Pengiriman WTS ke Panti Sosial Budhi Rini Mataram sebanyak 9 orang.

3. Bantuan dan Jaminan Sosial, diantaranya :

- Penyaluran bantuan tanggap cepat darurat bagi 5.555 jiwa korban bencana.
- Pemberian bantuan uang tunai untuk 5 Forum Keserasian Sosial, yaitu Forum Keserasian Sosial "Banjar Suka Duka" Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, "Banjar Tegal Sari" Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas, "Banjar Hindu Darma" Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee, "Banjar Wonogiri" Desa Sebedo Kecamatan utan dan Forum Keserasian Sosial "Dusun Batu Alang" Desa Ieseng Kecamatan moyo Hulu.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Penyaluran bantuan bagi sasaran Program Keluarga Harapan Sumbawa kepada 9.119 RTSM yang tersebar di 19 Kecamatan.
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi 32 orang keluarga miskin dari Kecamatan Orong Telu, Empang dan Alas Barat.

Adapun penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2013 adalah :

Tabel 4.17

Jumlah PMKS dan yang sudah Tertangani di Kab. Sumbawa Tahun 2013

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah PMKS s.d Th. 2013	Yang Tertangani Th. 2013
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	0	0
2	Anak Terlantar	Jiwa	8.977	91
3	Anak Nakal	Jiwa	451	0
4	Anak Jalanan	Jiwa	0	0
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	0	50
6	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	178	10
7	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	4.364	40
8	Penyandang Cacat	Jiwa	2.300	219
9	Tuna Susila	Jiwa	114	9
10	Pengemis	Jiwa	0	0
11	Gelandangan	Jiwa	0	0
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	Jiwa	1.254	31
13	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	15	20
14	Keluarga Fakir Miskin	KK	36.921	9.132
15	Keluarga Yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni	KK	15.737	0
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	212	0
17	Komunitas Adat Terpencil	KK	820	564
18	Korban Bencana Alam	Jiwa	5.555	5.555
19	Korban Bencana Sosial	Jiwa	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	304	30
21	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	7	0
22	Keluarga Rentan	KK	1.830	0
Jumlah			79.039	15.751

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sumbawa.

4.1.2.23. Urusan Wajib Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk pemantapkan identitas bangsa dan daerah, serta meningkatkan penghayatan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ditujukan untuk memperkuat kepribadian, memperkokoh rasa persatuan, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memupuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Implementasi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah yang diarahkan pada pembinaan terhadap sanggar seni yang hingga saat ini tercatat sebanyak 80 sanggar seni. Adapun event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa yang dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan festival samawa malanti budaya di Kecamatan Plampang serta Festival Moyo yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah.

Untuk menunjang pelestarian kepurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai *leading sektor*, sasaran program ini yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal.

Keberadaan cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2013, berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Nama	Alamat
1	Makam Sampar	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
2	Istana Dalam Loka	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
3	Istana Baru/Wisma Praja	Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa
4	Bala Kuning	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
5	Batu Bertulis	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
6	Bala Datu Ranga	Kel. Pekat Kec. Sumbawa
7	Makam Karongkeng	Desa Karongkeng Kec. Tarano



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Nama	Alamat
8	Ai Renung	Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu
9	Lutuk Batu Peti	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
10	Tarakin	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
11	Raboran	Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu
12	Makam Ponan	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
13	Makam Lala Bunte	Desa Pemasar Kec. Maronge
14	Temang Dongan	Desa Pungkit Kec. Lopok
15	Batu Tata	Desa Punik Kec. Batu Lanteh
16	Batu Bergores	Desa Tepal Kec. Batu Lanteh
17	Patung Batu	Kec. Ropang
18	Kuber Tana Belo	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
19	Batu Masjid	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
20	Lakemudi	Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir
21	Makam Lala Bulan	Desa Batu Bulan Kec. Moyo Hulu
22	Kuber Peti	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
23	Batu Tempayan	Desa Mata Kec. Tarano
24	Keramat Endagu	Desa Lab. Jambu Kec. Tarano
25	Bala Dea Imam	Desa Empang Atas Kec. Empang
26	Batu Gong	Desa Pukat Kec. Utan
27	Makam Orong Bawa	Desa Orong Bawa Kec. Utan
28	Makam Faqih Ismail	Desa Motong Kec. Utan
29	Keramat Mampis	Desa Luar Kec. Alas
30	Lesung Batu	Desa Brangkolong Kec. Plampang
31	Batu Tapak Kaki	Desa Tangkan Pulit Kec. Moyo Hulu
32	Sampar Rhee	Dusun Kalimango Kec. Moyo Hulu
33	Makam Pua Bongan	Desa Labuhan Burung Kec. Buer
34	Liang Nemunri	Desa Dalam Kec. Alas
35	Makam Dea Busing	Kec. Lape
36	Batu Pemanto	Mate Mega Kec. Alas
37	Makam Datu Puti Geti	Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa
38	Patung Kebo	Desa Jamu Kec. Lunyuk
39	Buin Ai Awak	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
40	Batu Nong	Desa Lekong Kec. Alas Barat
41	Makam Keramat	Labu Bua Kec. Utan
42	Bala Datu Alas	Desa Dalam Kec. Alas

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program ini diantaranya: fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuknaskah kuno, pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta. Uraian lebih rinci dari target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kebudayaan disajikan pada lampiran.



4.1.2.24. Urusan Wajib Statistik

Secara umum penyelenggaraan urusan wajib statistik yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan data, informasi dan statistik daerah. Data/informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2013, publikasi data/informasi adalah terdiri dari statistik dasar seperti Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan PDRB, Profil daerah, Statistik Ekonomi dan data spasial daerah ditunjang dengan dikembangkannya Pusat informasi spasial kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan.

4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan

Kinerja urusan Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan SKPD yang melaksanakan *urusan perpustakaan* dan *urusan kearsipan* pada tahun 2013 tingkat realisasi input (dana) mencapai **94,41%** dari total anggaran belanja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah tahun 2013 yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Arsip merupakan data terekam yang seakan-akan tidak mempunyai arti ketika ia disimpan ditempatnya, karena arsip tidak lebih dari sekumpulan kata, rekaman suara atau gambar yang ditata sedemikian rupa. Ia akan mempunyai kekuatan ketika orang mulai mencari dan memakainya untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pentingnya penyelenggaraan urusan wajib kearsipan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa secara bertahap terus melakukan pemberian terhadap pengelolaan arsip, hal ini ditandai dengan penerapan arsip secara baku pada 3 SKPD yang pada tahun sebelumnya hanya terdapat di 2 SKPD. Demikian pula dengan pengelola arsip terpadu dengan target RPJMD



sebesar 90% dengan capaian target pada tahun 2013 mencapai 98,2%.

Untuk menentukan keperluan jangka waktu penyimpanan suatu arsip, terdapat 7 nilai dari arsip tersebut, yaitu : nilai-nilai kegunaan administrasi, nilai-nilai kegunaan hukum, nilai-nilai kegunaan keuangan, nilai-nilai untuk pembuatan kebijaksanaan, nilai-nilai untuk pelaksanaan kegiatan, nilai-nilai untuk kegunaan sejarah dan nilai-nilai untuk penelitian.

Secara rinci target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan kearsipan disajikan pada lampiran.

4.1.2.26. Urusan Wajib Perpustakaan.

Urusan wajib perpustakapan diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah ditempuh melalui peningkatan jumlah koleksi buku dan melakukan pembinaan kepada perpustakaan di kecamatan. Untuk mencapai sasaran ini, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu pemasarkan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang rajin belajar, yang diimplementasikan melalui pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, dengan menyediakan buku bacaan bagi pengunjung perpustakaan.

Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah perpustakaan sebanyak 4 buah atau meningkat sebesar 0,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 terdapat sebanyak 411 buah dan pada tahun 2012 sebanyak 407 buah perpustakaan. Peningkatan budaya baca masyarakat dari tahun ke tahun ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung sebesar 6,64% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 terdapat 41.002 pengunjung dan pada tahun 2012 sebanyak 38.449 pengunjung. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tersebut menunjukkan ekspektasi positif bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat, sehingga pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan tersebut, hal ini ditandai dengan penambahan jumlah koleksi buku dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2011 sebanyak 82.785 eksemplar, pada tahun 2012 sebanyak 86.104 eksemplar



dan pada tahun 2013 bertambah sebanyak 32.686 eksemplar.

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, maka pengembangan minat dan budaya baca terus dilaksanakan antara lain melalui kegiatan lomba pidato dan lomba bercerita yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

4.1.3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk masa mendatang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib, sebagai berikut.

1. Pada urusan wajib pendidikan terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
 - a). Masih melekatnya imej para orang tua siswa terhadap sekolah- sekolah favorit, khususnya sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sumbawa, sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada satu sekolah yang berakibat tidak merataanya sebaran murid.

Solusinya :

Perlu upaya selektif terhadap penerapan manajemen penerimaan siswa baru, dengan keterdugungan sarana dan prasarana yang memadai bagi sekolah-sekolah lainnya, sehingga nilai-nilai diskriminatif yang tertanam sebelumnya pada siswa dapat berubah menjadi nilai kompetitif.

- b). Masih adanya Kecamatan yang belum memiliki Sekolah Menengah seperti di Kecamatan Lantung, sehingga akses layanan pendidikan belum merata sebarannya di Kabupaten Sumbawa. Selain itu ketersediaan tenaga pendidik yang masih terbatas

Solusinya :

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK dan Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional.

- c). Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum ideal bagi kelangsungan proses belajar mengajar

Solusinya :

Peningkatan sarana dan prasarana pada semua jenjang antara lain berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan merehabilitasi ruang kelas / ruang belajar lainnya yang dalam kondisi rusak.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

2. Pada Urusan Wajib Kesehatan, masih terkendala pada masalah ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Demikian pula dengan alokasi PTT yang pengangkatannya masih melalui Kementerian Kesehatan, sehingga jatah untuk Kabupaten Sumbawa relatif masih minim dibandingkan dengan tenaga PTT yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sumbawa. Selain itu masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Solusinya :

Perlu upaya tindak lanjut dengan Kementerian Kesehatan mengenai penambahan tenaga melalui upaya-upaya penambahan Quota tenaga kesehatan dari pusat untuk Kabupaten Sumbawa. Terhadap jumlah kematian ibu yang meningkat terus diupayakan melalui penambahan pemberian Fe 3 untuk ibu hamil.

3. Terbatasnya kewenangan Kabupaten Sumbawa dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Luar Negeri, menyebabkan lambatnya penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. Disamping itu lamanya proses hukum di negara penempatan serta lambatnya tanggapan umpan balik dari Kementerian Luar Negeri, sehingga pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, BNP2TKI dan Perusahaan Pengirim Tenaga Kerja (PPTKIS), agar kasus-kasus yang terjadi dapat segera terselesaikan. Sementara terhadap permasalahan tenaga kerja yang berada di dalam negeri, banyak masalah pengaduan hubungan industrial di perusahaan-perusahaan, akan tetapi perusahaan tersebut tidak diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dilibatkan dalam Tim HO, sehingga tidak dapat melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan dimaksud.

Solusinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupa meningkatkan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang terjadi, antara lain melalui pembinaan-pembinaan dan teguran disertai pengawasan yang intensif terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menangani urusan



ketenagakerjaan.

4. Belum maksimalnya pengelolaan potensi dan kekayaan desa guna menunjang peningkatan pendapatan desa. Selain itu belum lengkapnya kerangka regulasi yang dirumuskan sebagai pedoman dalam rangka proses fasilitasi pemberdayaan masyarakat ditingkat desa.

Solusinya :

Perlu fasilitasi dan advokasi bagi desa dalam pengelolaan potensi dan kekayaan yang dimiliki guna terwujudnya otonomi yang konkret di desa. Terhadap regulasi, perlunya disusun instrument/kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

4.2. Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan.

4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan. Secara rinci ke delapan urusan pilihan dimaksud beserta program yang dilaksanakan disajikan sebagai berikut.



**Tabel 4.19
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kab. Sumbawa Pada Urusan Pilihan, Tahun 2013**

No	Urusan Pilihan	Program
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan3 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Penggunaan Sumberdaya Laut4 Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap7 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan8 Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan9 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Payau & Air Tawar10 Program Pengembangan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan dan Data Statistik Perikanan11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pesisir,Laut, Pulau-pulau Kecil
2	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kebun5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan10 Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Peternakan11 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan
3	Urusan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan4 Program Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan



No	Urusan Pilihan	Program
		5 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
4	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2 Program Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Yang berpotensi Merusak Lingkungan 3 Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 4 Program pengembangan energy 5 Program Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral dan Air Bawah Tanah
5	Urusan Pariwisata	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengemb. Kemitraan Pariwisata
6	Urusan Industri	1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4 Program Peningkatan Kelembagaan
7	Urusan Perdagangan	1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8	Urusan Ketransmigrasian	1 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 2 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Uraian kegiatan masing-masing program disajikan pada lampiran.

4.2.2. Realisasi Program pada Urusan Pilihan

Pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan disajikan sebagai berikut.

4.2.2.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana *urusan pilihan kelautan dan perikanan*, pada tahun 2013 capaian sasaran pada kisaran 88,30% dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan kepada penataan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, antara lain ditempuh melalui pembinaan masyarakat nelayan dan pembudidaya dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi usaha, serta peningkatan sistem dan upaya pengamanan wilayah



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

perairan melalui aktivasi dan penumbuhan kelompok pengawas. Sedangkan dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terpencil yang menghuni pulau-pulau kecil ataupun wilayah-wilayah pulau kecil yang belum berpenghuni, maka pemerintah daerah berupaya melaksanakan penataan wilayah melalui pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil tersebut, serta meningkatkan pengamanan wilayah melalui penetapan zona Konservasi Kawasan Laut (KKL). Selain itu pembangunan perikanan juga diarahkan pada penumbuhan industri kelautan dan perikanan, yakni dengan ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai Kabupaten percontohan industrialisasi rumput laut di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung persiapan kawasan industrialisasi perikanan tersebut, khususnya komoditas rumput laut.

Perkembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa, terlihat dari aktivitas penangkapan ikan yang masih didominasi oleh penangkapan ikan di laut, meski terdapat juga aktivitas penangkapan ikan di perairan umum yang terdapat di bendungan-bendungan atau dam di Kabupaten Sumbawa. Pemanfaatan sumber daya lahan perikanan pada tahun 2013 sebesar 1.210.000,00 ha, dengan penambahan areal sebesar 23,29% dibandingkan dengan pemanfaatan areal pada tahun 2012 seluas 981.446,80 Ha. Penambahan pemanfaatan areal ini terjadi pada perairan laut lepas pantai. Dari luasan pemanfaatan areal tersebut, dihasilkan produksi perikanan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dari produksi perikanan pada tahun 2013 dari target 338.326,74 ton dengan realisasi sebesar 360.825,65 ton (106,65%). Jumlah produksi perikanan ini, bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2012 sebesar 241.779,20 ton, maka terjadi peningkatan sebesar 49,24%. Produksi perikanan ini dihasilkan dari meningkatnya produksi perikanan tangkap dari target 48.291,00 ton dengan realisasi sebesar 48.649,00 ton (100,74%), sementara untuk produksi perikanan budidaya dari target 290.035,74 ton dengan realisasi sebesar 312.176,65 ton (107,63%).



**Tabel 4.20
Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kab. Sumbawa 2013**

No	Sumber Daya	Potensi		Dimanfaatkan			
		Luas (Ha)	Prod (ton)	Luas (Ha)	%	Prod (ton)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Perikanan Laut						
	a. Perikanan Tangkap						
	1. P. Pantai	677.600,00	24.864,00	677.600,00	100,00	37.377,20	150,33
	2. P. Lepas Pantai	900.000,00	30.789,00	480.789,09	53,42	8.280,00	26,89
	3. Z E E	7.400.000,00	203.390,00	34.780,00	0,47	960,00	0,47
	Jumlah	8.977.600,00	259.043,00	1.193.169,09	13,29	46.617,20	18,00
	b. Budidaya Laut						
	1. Budidaya Rumput Laut	14.950,00	897.000,00	9.609,41	64,28	250.200,00	27,89
	2. Budidaya Kerapu	1.200,00	15.080,00	285,54	23,80	270,00	
	Budidaya Baronang						2,15
	3. Budidaya Mutiara	5.700,00	13,40	2.131,00	37,39	0,36	2,67
	Jumlah	21.850,00	912.093,40	12.025,95	55,04	250.523,87	27,47
II	Perairan Umum						
	1. Waduk Dam	1.074,31	1.611,47	742,67	69,13	1.640,30	101,79
	2. Sungai	900,00	900,00	812,86	90,32	370,00	41,11
	3. Laguna	50,00	50,00	23,50	47,00	21,50	43,00
	Jumlah	2.024,31	2.561,47	1.579,03	78,00	2.031,80	79,32
III	Perairan Air Tawar						
	1. Kolam	1.464,00	5.856,00	191,60	13,09	949,02	16,21
	2. Sawah/mina Padi	398,20	398,20	5,83	1,46	8,54	2,14
	3. Kerambah/KJA	406,00	812,00	12,00	2,96	86,81	10,69
	Jumlah	2.268,20	7.066,20	209,43	9,23	1.044,37	14,78
IV	Perairan Air Payau						
	1. Tambak	10.375,00	140.000,00	3.016,50	29,07	60.608,40	43,29
	Jumlah	10.375,00	140.000,00	3.016,50	29,07	60.608,40	43,29
	TOTAL	9.014.117,51	1.320.764,07	1.210.000,00	13,42	360.825,65	27,32

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

Salah satu sumberdaya kelautan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jumlah kecamatan pesisir di Kabupaten Sumbawa sebanyak 18 kecamatan yang berada di pesisir utara dan sisir selatan, dan dari 18 kecamatan pesisir terdapat 63 desa yang tergolong desa pesisir atau 38,18% dari 165 total desa di Kabupaten Sumbawa. Untuk pulau-pulau kecil terdapat sebanyak 62 pulau, dengan 6 pulau telah berpenghuni yaitu: Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Medang, Pulau Moyo, Pulau Ngali, dan Pulau Tapang (Gili Tapang). Adapun sarana dan prasarana yang terbangun di pulau-pulau kecil meliputi jalan antar kampung, sarana air bersih, PLTS, dermaga/tambatan perahu dan tempat pendaratan ikan.

Kabupaten Sumbawa selain memiliki potensi hayati yang berlimpah dari sektor kelautan dan perikanan, terdapat juga potensi non hayati yaitu pengembangan garam rakyat di wilayah pesisir dengan potensi lahan \pm 3.500 Ha yang tersebar dari Kecamatan Alas sampai dengan Tarano. Adapun rencana aksi



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) pada tahun 2013 berupa penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) guna penyediaan/perbaikan prasarana gudang pengelolaan garam beryodium, pemasangan sumber listrik dan penyediaan sarana seperti mesin loidisasi, mesin pengemasan, bahan aditif dan bahan yodisasi garam. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan teknis pergaraman bagi KUGAR (kelompok Usaha Garam Rakyat) dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat, pelatihan peningkatan SDM dan pendampingan kelembagaan KUGAR. Dalam rangka meningkatkan penghasilan petambak garam, maka dilakukan fasilitasi pertemuan antara KUGAR dengan mitra di Desa Labuhan Bontong dengan narasumber dari Perbankan, Koperasi atau perusahaan lain yang terkait. Selain itu memetakan potensi pasar dan mitra usaha garam rakyat dan memfasilitasi kemitraan petambak garam dengan dunia usaha, dalam dalam penyerapan garam rakyat maupun pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan pemberdayaan usaha garam pada tahun 2013 yang bersumber dari APBD berupa pembangunan /rehab jaringan irigasi tambak Rp. 200.000.000,- dan pembangunan jalan produksi sebesar Rp. 400.000.000,-, sedangkan yang bersumber dari APBN berupa Perbaikan jembatan produksi sebesar Rp. 200.000.000, penyaluran BLM sebesar Rp. 1.000.000.000,-, manajemen pemasaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan fasilitasi kemitraan usaha garam rakyat sebesar Rp. 100.000.000,-

Untuk zona-zona konservasi dan reservasi sebagai kawasan penyangga dan kawasan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, terdiri dari :

1. Kawasan wisata alam laut Taman Nasional Pulau Moyo
2. Kawasan Konservasi Penyu di Kecamatan Lunyuk
3. Kawasan Konservasi terumbu karang Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Sejangan , Pulau Moyo, Pulau Medang, dll.
4. Kawasan konservasi mangrove Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, Pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, Pesisir Utara Sumbawa dan Pesisir Selatan Pulau Sumbawa.
5. Kawasan konservasi perairan Pulau Keramat, Temudong dan Pulau Bedil.

Kawasan-kawasan konservasi yang ada saat ini yaitu kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang masih belum ditetapkan dalam Perda ataupun Keputusan Bupati. Hal ini tentunya akan berakibat pada banyaknya kegiatan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan mangrove ke lahan lain, alih fungsi sepanjang pantai, dan perusakan terhadap terumbu karang yang ada. Disamping itu perlu dikembangkan kawasan reservasi baru selain Pulau Moyo, sehingga terdapat kawasan perlindungan laut di bagian barat, tengah dan Teluk Saleh.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penunjang, antara lain : pemasangan rambu-rambu Lanf kawasan konservasi perairan, pengadaan kapal operasional kawasan konservasi perairan. pembangunan pondok wisata pulat keramat yang dilaksanakan pada tahun 2013. Sementara kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 berupa pengadaan speed boat (pembangunan kapal wisata), penambahan panjang/rehab tambatan perahu Pulau Keramat, pembangunan Selter, Pembangunan Pos Jaga dan pembangunan gerbang kawasan konservasi perairan pulau keramat serta kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun=tahun sebelumnya.

4.2.2.2. Urusan Pilihan Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Penyelenggaraan urusan pilihan pertanian pada tahun 2013 realisasi keterserapan input (dana) mencapai **97,61%** dari total belanja yang dianggarkan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Untuk capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan (Padi, jagung dan kedelai) pada tahun 2013 telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini ditandai dari produksi padi yang surplus sebesar 40.916 ton (110%) dari target 419.933 ton dengan produksi sebesar 460.849 ton. Demikian pula dengan produksi jagung terealisasi sebesar 195.024 ton dari target sebesar 172.706 ton, sehingga surplus sebesar 22.318 ton (113%). Untuk produksi kedelai terealisasi sebesar 7.304 ton dari target 5.776 ton, sehingga surplus sebesar 1.528 ton (126%). Selain fokus pada prioritas peningkatan produksi tanaman pangan (padi-palawija), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa juga telah melakukan pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura terutama pada komoditi



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

sayuran dan buah-buahan. Terhadap beberapa komoditas hortikultura yang sudah berkembang baik dan menjadi unggulan Kabupaten Sumbawa antara lain bawang merah dan mangga. Selain komoditas tersebut masih dapat dikembangkan komoditas lain mengingat potensi agrolimat yang sangat mendukung untuk pengembangan komoditas hortikultura seperti pisang, jeruk, cabe, dll. Kegiatan hortikultura yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain melalui pengadaan bibit untuk wilayah khusus seperti bibit sayuran, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman buah-buahan, yang diperuntukkan bagi penghijauan sarana/prasarana umum seperti pekarangan kantor, sekolah, masjid, lapangan desa, pondok pesantren, kebun gizi PKK desa, Posyandu, percontohan rumah sehat, dll.

Untuk mendukung pembangunan dibidang pertanian tersebut, maka pada tahun 2013 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Alsintan berupa Hand Traktor sebanyak 354 unit, mesin pompa air sebanyak 110 unit yang terdiri dari mesin 5,5 PK sebanyak 108 unit, mesin 8,5 PK sebanyak 1 unit, mesin 23 PK sebanyak 1 unit. Selain itu pengadaan Mist Blower 339 unit, hand Sprayer 52 unit, Genset 2 unit dan Mesin Sabit Rumput sebanyak 4 unit. Selain itu, pupuk bersubsidi telah disalurkan sejumlah 37.810,35 Ton yang terdiri dari Urea 22.952,85 ton, NPK 10.878,50 ton, ZA 2.861,85 ton, SP-36 sebanyak 578,55 ton dan Pupuk Organik sebanyak 538,60 ton. Terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan melekat pada tugas dan fungsi Komisi dan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumbawa yang beranggotan unsur-unsur DPRD, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian Resort Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kantor Ketahanan Pangan dan KUPT-PIA. Pengawasan lebih difokuskan pada aktifitas penyaluran dan harga eceran tertinggi untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilapangan terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain : 1). Harga pupuk subsidi yang beragam pada masing-masing wilayah dan melampaui harga HET di Kios Pengecer yang ditetapkan Pemerintah Pusat; 2). Droping pupuk dan produsen ke Distributor sering terlambat menyebabkan pengecer tidak bias melayani petani; 3). Distributor dan pengecer masih melakukan praktek yang mengharuskan petani



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

menebus urea dan NPK secara paket. Terhadap kondisi tersebut telah ditempuh langkah-langkah strategis melalui :

- Penyelenggaraan pertemuan koordinasi Tim Pengawas tingkat Kabupaten yang melibatkan produsen, distributor, perwakilan pengecer, perwakilan kelompok tani pemerhati pertanian dan LSM.
- Pertemuan tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh distributor diwilayah masing-masing.
- Memberikan peringatan kepada distributor dan pengecer untuk disiplin menjalankan tugasnya dan tidak membenarkan penebusan secara paket.
- Memberikan peringatan kepada distributor agar mengevaluasi pengecer dalam wilayahnya yang terindikasi menyimpang terutama dalam pemberlakuan harga HET yang diluar batas kewajaran.

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pencetakan sawah baru seluas 3.300 ha yang berlokasi di 221 kelompok tani, Jalan Usaha Tani sebanyak 86 unit yang tersebar di semua kecamatan, dan penyaluran benih bersertifikat berupa beras padi sebanyak 920,34 ton, benih jagung sebanyak 38.625 ton, benih kedelai sebanyak 225 ton dan benih kacang hijau sebanyak 50,40 ton.

Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya disajikan pada lampiran.

b. Peternakan

Penyelenggaraan pembangunan peternakan sebagai bagian dari urusan pilihan pertanian, pada tahun 2013 realisasi keterserapan input (dana) mencapai **86,78%** dari total belanja yang dianggarkan pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pengembangan bidang peternakan Kabupaten Sumbawa sangat didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial meliputi populasi ternak dengan jumlah Sapi Bali sebanyak 206.110 ekor, Sapi Sumbawa sebanyak 4.046 ekor, Kerbau Sumbawa sebanyak 50.857 ekor, Kuda Sumbawa sebanyak 38.282 ekor, Kambing sebanyak 34.973 ekor, Domba sebanyak 1.840 ekor, Babi sebanyak 7.972 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 328.450 ekor, Ayam Buras sebanyak 691.578 ekor, Itik sebanyak 10.805 ekor, dan Entog sebanyak 6.392 ekor.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten sebagai sumber bibit di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu dengan ditetapkannya Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian sapi bali, maka pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan di bidang pembibitan terutama sapi berasal yang diatur dan diawasi secara ketat dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Inseminasi Buatan (IB), sehingga tercapai peningkatan populasi ternak dan mutu genetik ternak, karena melalui inseminasi buatan penyebaran sapi berasal unggul dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat. Adapun paket teknologi inseminasi buatan bertujuan untuk : 1). Penggunaan Pejantan Unggul (Proven Sire) secara maksimal; 2). Penghematan dana dan Tenaga; 3). Peningkatan potensi seleksi terhadap pejantan (bibit); 4). Mencegah atau mengurangi penyakit reproduksi yang dapat terjadi melalui perkawinan alam; 5). Mempertinggi breeding efisiensi karena hanya semen yang fertilitas tinggi yang digunakan; 6). Memanfaatkan pejantan unggul secara maksimal dengan tujuan peningkatan jumlah dan mutu genetik. Pada tahun 2013 dilaksanakan inseminasi buatan di beberapa Kecamatan seperti tabel berikut.

**Tabel 4.21
Inseminasi Buatan di beberapa Kecamatan Pada Tahun 2013**

No	Kecamatan	Straw (ekor)	Ternak yg di IB (ekor)	Kebuntingan (ekor)	Kelahiran (ekor)
1.	Alas	312	262	213	162
2.	Utan	192	128	32	12
3.	Badas dan Sumbawa	397	284	161	48
4.	Unter Iwes	217	173	161	4
5.	Moyo Hulu	147	102	46	23
6.	Moyo Hilir	159	107	42	5
7.	Lape/Lopok	98	31	-	-
8.	Plampang	24	12	-	-

Dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular terutama penyakit-penyakit strategis di seluruh wilayah kecamatan seperti penyakit SE, Anthrax, dan ND. Mengingat penyakit hewan menular tidak pernah mengenal batas-batas wilayah tertentu,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

maka untuk mengintensifkan usaha-usaha penanggulangannya perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi dalam melaksanakan program kegiatan, khususnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H). Adapun alokasi vaksin pada 2013 tahun sebanyak 40.000 dosis, dan realisasi vaksinasi massal SE sebanyak 51.400 ekor yang tersebar di 24 kecamatan. Kelebihan vaksinasi ini diperoleh dari sisa vaksin tahun sebelumnya ditambah dari vaksin APBN sebanyak 11.400 dosis. Untuk Vaksinasi massal SE setiap tahun diprioritaskan pada ternak sapi dan kerbau yang ada di wilayah kantong-kantong penyakit dengan cara pendekatan desa yang tertular, dimana pola pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan registrasi ternak. Untuk kegiatan vaksinasi Anthrax yang dilakukan setiap tahun di 15 kecamatan endemis (Buer, Sumbawa, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Lape, Lopok, Plampang, Empang, Tarano, Unter Iwes dan Labangka) yang dilakukan bersamaan dengan vaksinasi SE. Adapun tujuannya untuk mengendalikan penyakit Anthrax di wilayah kecamatan Kabupaten Sumbawa yang sasarannya terhadap ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi yang berumur diatas 3 bulan. Pada tahun 2013 Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 10.000 dosis dari APBD dengan realisasi vaksinasi massal AT sebanyak 28.600 ekor. Untuk dosis lainnya berasal dari droping APBN sebanyak 18.600 dosis. Demikian pula untuk Vaksin New Castle Disease (ND) juga dialokasikan vaksin sebanyak 20.000 dosis dengan rincian 10.000 dosis ND Komarov dan 10.000 dosis vaksin ND Lentovet. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan didaerah kantong penyakit yang bekerja sama dengan kelompok peternak unggas.

Terhadap upaya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak telah dilaksanakan pelatihan bedah Caesar bagi 22 orang petugas. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pengambilan darah ternak pemerintah dengan target 2.402 ekor, dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan brucellosis sebanyak 1.214 ekor. Selain itu dilakukan pengamatan dini penyakit hewan menular oleh dokter hewan dan paramedic, yang dilanjutkan dengan vaksinasi. Untuk pemberantasan dan pemeriksaan sampel scabies sebanyak 1.000 ekor, di beberapa kecamatan ditemukan ternak yang positif terkena scabies, seperti di Kecamatan Lunyuk sebanyak 30 ekor berupa sapi 12



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

ekor, kambing 6 ekor, babi 10 ekor dan anjing 2 ekor, Kecamatan Utan sebanyak 50 ekor kambing, Kecamatan Lopok sebanyak 7 ekor berupa kambing 4 ekor, kuda 2 ekor dan sapi 1 ekor, Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 100 ekor kambing, Kecamatan Lenangguar sebanyak 54 ekor kambing, Kecamatan Labuhan Badas sebanyak 78 ekor kambing, Kecamatan Unter Iwes sebanyak 60 ekor kambing, Kecamatan Empang sebanyak 149 ekor kambing, Kecamatan Tarano sebanyak 51 ekor kambing, Kecamatan Moyo Hulu sebanyak 50 ekor kambing dan Kecamatan Alas sebanyak 100 ekor kambing. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Tipe C Dinas Peternakan untuk pengusaha ternak ditemukan dari 171 ekor yang menjadi sampel, yang positif scabies sebanyak 80 ekor dan untuk pengusaha perorangan dari sampel 100 ekor kambing yang positif scabies sebanyak 54 ekor.

Untuk menghindari agar tidak terjadi penularan kepada manusia atau ternak yang lain, maka ternak yang terjangkit penyakit hewan menular khususnya Antrak, telah dilakukan pembakaran, penguburan dan desinfektansi kandang dan peralatan. Pada tahun 2013 terdapat 4 kasus yang terjadi di Kecamatan Moyo Hulu sebanyak 3 kasus dan 1 kasus di Kecamatan Moyo Utara.

Kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah melalui pelayanan kesmavet di 11 RPH terhadap 8.500 ekor ternak, baik terhadap ternak besar maupun ternak kecil. Pada kegiatan ini dilaksanakan pemeriksaan *ante mortem* pada ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) sebanyak 6.000 ekor dan 2.500 ekor ternak kecil (kambing) yang merupakan target yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pada ternak yang akan dipotong sehat, sehingga asupan gizi khususnya protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman dan sehat. Kesmavet singkatan dari Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut hewan dan produk asal hewan seperti daging, susu dan telur dalam hubungannya secara langsung dan tidak langsung dengan kesehatan manusia. Cakupan dari kegiatan kesmavet ini meliputi pengawasan serta pembinaan terhadap RPH/TPH serta pengusaha pejagal sehingga dihasilkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Kegiatan lainnya berupa peningkatan penerapan teknologi tepat guna bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil produksi ternak melalui



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

pengembangan produk olahan. Pada kegiatan ini dilakukan pelatihan manajemen pengembangan sapi potong yang dilaksanakan di 8 kelompok tani ternak dengan materi berupa metode pengawetan pakan (fermentase jerami), metode pembuatan kompos, manajemen padang pengembalaan dan budidaya kebun HMT. Disamping itu telah dilaksanakan pembuatan kebun STS (Sistem Tiga Strata) yaitu suatu sistem yang diterapkan dalam satu lokasi dengan perlakuan penanaman aneka jenis tanaman pakan ternak dengan tujuan sebagai sumber pakan berkualitas serta dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, juga sebagai sumber bibit yang dapat dikembangkan di kelompok tani ternak. Tanaman yang digunakan adalah rumput raja 3000 stek, Gamal 2 Kg, turi 2 Kg, rumput benggala 1.500 stek, rumput paragres 1.500 stek, rumput ruzzi 1.500 pol, Siratro 3 Kg, Centro 3 Kg, dan Stylo 3 Kg. Kegiatan ini dilaksanakan di kelompok Reban Udang Desa moyo Hilir dengan luas 1 Ha.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap usaha peternakan, maka sarana dan prasarana pendukung mutlak diperlukan. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan :

- 1). Pembangunan Lumbung pakan sebanyak 2 unit yang ditempatkan di Houlding Ground dan Kelompok Ai Asin Kenorong Desa Muer. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan mempermudah petani ternak menyimpan kelebihan pakan terutama pakan dari hasil limbah pertanian yang bias dimanfaatkan sebagai pakan alternatif dimusim kering, sehingga peternak tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi ternaknya.
- 2). Pengadaan pakansia dan lumbung pakan yang dialokasikan di klp. Mitra Abadi Desa Leseng, klp. Riam Remo kelurahan Pekat, klp. Bini Laki Desa Berora, Klp. Kuang Bira Desa Motong, Klp. Saling Pendi Desa Lape, Klp. Lenang Rea Desa Samri, dan Klp. Olat Monte Desa Pernek. Pengadaan pakansia dimaksudkan untuk efisiensi dan mempermudah dalam hal pemberian pakan dilokasi padang pengembalaan;

Penghargaan yang dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah :

1. Anugerah Adi Satwa Sewaka/Indolivestock Service Award 2013 dari



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

KPUPI (Komunikasi Pengembangan Usaha Peternakan Indonesia).

2. Ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu wilayah sumber bibit kerbau di Indonesia pada tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan MOU Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4.2.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan

Dalam tahun anggaran 2013 urusan kehutanan Kabupaten Sumbawa hingga akhir tahun 2012, tingkat keterserapan anggaran (dana) realisasinya mencapai **89,23%** dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan pembangunan pada urusan pilihan kehutanan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, terus melakukan upaya reboisasi dan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah terdagradiasi, sehingga pemerintah daerah menerapkan pola rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 diantaranya melalui :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tata Batas Kawasan Hutan yang berlokasi di 3 UPT KPH (Batu Lanteh, Dodo Jaran Pusang dan Brang Beh). Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek Pal yang banyak mengalami kerusakan dan hilang sebagai batas antara kawasan hutan dan tanah kebun masyarakat (APL), sehingga areal tersebut perlu mendapat status kepemilikan yang jelas agar tidak dikuasai oleh masyarakat secara ilegal, seperti :
 - Pengecekan Batas Kawasan Hutan dan Orientasi APL di wilayah Lanak Desa Lenangguar dengan kondisi sebagian Pal dalam kondisi baik, sebagian rusak dan terdapat beberapa Pal yang hilang. Sementara pada wilayah Desa Lantung Air Mual Desa Lantung, di wilayah Desa Labuhan Ala Kecamatan Plampang, di wilayah Dusun Pemangong Desa Lenangguar Kecamatan Lenagguar, dengan kondisi tidak ditemukannya Pal batas dilokasi, sehingga telah dilakukan rekonstruksi Pal batas yang hilang/rusak untuk menghindari terjadinya konflik batas tanah masyarakat (APL) dengan kawasan hutan.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Orientasi Batas Kawasan Hutan yang dilaksanakan di lokasi kawasan hutan Dodo Jaran Pusang Kecamatan Labangka, ditemukan pal batas Kawasan Hutan dengan nomor B.696 di lokasi pengecekan dengan koordinat $08^{\circ} 51' 44,0''$ LS $117^{\circ} 46' 09,0''$ BT, Kawasan Hutan Selalu Legini wilayah Sampar Rawu Kecamatan Lunyuk, ditemukan Jatikon/Pal tidak bernomor, dengan koordinat $08^{\circ} 53' 32,5''$ LS $117^{\circ} 13' 58,1''$ BT. Pada kawasan hutan Santong Labubaron Tidak ditemukan pal batas kawasan hutan dengan kondisi yang masih utuh, tetapi ditemukan pal batas Kawasan Hutan dalam kondisi yang telah rusak di lokasi orientasi yang diperkirakan adalah pal batas kawasan hutan dengan nomor B.344 dan B.399 dengan kordinat : Pal B. 344 : $08^{\circ} 38' 55,8''$ LS $117^{\circ} 44' 33,1''$ BT, Pal B. 399 : $08^{\circ} 36' 20,4''$ LS $117^{\circ} 44' 26,9''$ BT.
- 2. Dilaksanakannya pembibitan melalui bakti sosial dengan penanaman benih jati sebanyak 200 kg, benih mahoni sebanyak 100 kg dan benih Gmelina sebanyak 100 kg, dari penaburan benih terebut dihasilkan bibit siap tanam sebanyak 170.000 batang. Demikian pula dengan refabilitasi daerah tangkapan air dan sumber air yang berlokasi di Uma Bangkat Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar dan mata air Ai Komak Kemangeng Dusun Serange Desa Berora kecamatan Lopok, dengan penanaman 16.000 batang beringin, sukun dan Ara.
- 3. Untuk pengembangan hutan mangrove dilaksanakan pada Desa Pulau kaung Kecamatan Buer dan Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape seluas 20 Ha dengan jumlah tanaman masing-masing sebanyak 17.500 batang.
- 4. Pada Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Luar dan Dalam Kawasan yang dilaksanakan di 6 lokasi yakni :
 - Rehabilitasi dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan pengadaan bibit sejumlah 55.000 batang yang terdiri dari 25.000 batang bibit Mahoni, 20.000 batang bibit Gmelina dan 10.000 batang bibit Kemiri, dengan luas areal penanaman 50 Ha.
 - Rehabilitasi dalam kawasan hutan di Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara dengan pengadaan bibit sejumlah 27.500 batang yang terdiri dari 15.000



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

batang bibit jati, 10.000 batang bibit Mahoni, dan 2.500 batang bibit Kemiri, dengan luas areal penanaman 25 Ha.

- Rehabilitasi dalam kawasan hutan di Desa Banda Kecamatan Tarano dengan pengadaan bibit sebanyak 55.000 batang yang terdiri dari 25.000 batang bibit jati, 25.000 batang bibit Mahoni dan 5.000 batang bibit Kemiri, dengan luas areal penanaman 50 Ha.
- Rehabilitasi luar kawasan hutan (Hutan Rakyat) di Desa Pungkit Kecamatan Lopok sejumlah 20.835 batang yang terdiri dari 10.000 batang bibit Jati, 7.500 batang bibit Gmelina dan 3.335 batang bibit Nangka, dengan luas areal penanaman 25 Ha.
- Terhadap rehabilitasi bantaran sungai yang berlokasi di Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok dengan bibit sejumlah 11.500 batang berupa 5.750 batang bibit Mahoni dan 5.750 batang bibit Gmelina, dengan luas penanaman 10 Ha.
- Untuk pemeliharaan tahun I rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan berlokasi di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat sejumlah 16.500 batang yang terdiri dari 7.500 batang bibit jati, 7.500 batang bibit Mahoni dan 1.500 batang bibit Kemiri, dengan luas penanaman 25 Ha.

Pelaksanaan penanaman pada kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Luar dan Dalam Kawasan dilakukan dengan metode swakelola dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani.

5. Pada Kegiatan KPH Batu Lanteh telah dilaksanakan persemaian Kayu putih sebanyak 141.570 batang yang berlokasi di Pandan Sari Desa Maman dan Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu seluas 100 Ha. Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi lahan kawasan hutan. Demikian pula dengan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya berupa persemaian stek pucuk kayu putih sebanyak 25.000 batang yang merupakan kegiatan pemeliharaan tahun pertama kayu putih di lokasi Periuk Bara Batu Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir seluas 50 Ha. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan di KPH Batu Lanteh diantaranya adalah penanaman tanaman Ketak sebagai uji coba penanaman hasil hutan bukan kayu seluas 1 Ha dengan melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu telah dilakukan pengukuran karbon stok, guna mengetahui potensi karbon stok yang berada diwilayah KPH Batu Lanteh,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

yang bekerjasama dengan Puspjak Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengukur karbon stok pada 5 tutupan lahan yang berada di KPH Batulanteh. Terhadap keberlanjutan kegiatan ini akan ditindaklanjuti oleh Puspjak Litbang Bogor melalui program Carbon Facility Bank Dunia. Selain pendanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada KPH Batu Lanteh bersumber dari APBD, juga berasal dari APBN dan APBD Provinsi diantaranya :

- Kegiatan rehabilitasi lahan seluas 750 Ha yang terdiri dari hutan produksi 250 Ha dengan tanaman pokok Kayu Putih dan Hutan Lindung 500 Ha dengan tanaman Tengkawang, Kemiri dan Beringin.
- Kegiatan Pengembangan Madu Hutan yang berasal dari BP. DAS Dodokan Moyo Sari NTB. Kegiatan ini untuk mendukung kebijakan penetapan klaster madu hutan di Kabupaten Sumbawa oleh Kementerian Kehutanan. Adapun kegiatannya meliputi : pelatihan panen lestari dan higienis madu hutan, seminar pembuatan sabun madu padat dan sabun madu cair, pembuatan film dokumenter madu hutan, studi banding petani madu dan pengadaan peralatan madu hutan.

Dalam rangka memperoleh manfaat dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi, Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk luas hutan di Kabupaten Sumbawa terinci pada tabel berikut.

**Tabel 4.22
Luas Hutan di Kabupaten Sumbawa**

Jenis Hutan	Luas (Ha)
Hutan Lindung	171.853,6
Hutan Produksi Terbatas	135.491,5
Hutan Produksi Tetap	53.691,9
Hutan Wisata Alam	6.100,5
Hutan Tanaman Buru	22.537,9

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa



Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit. Selain itu dalam melaksanakan pengamanan hutan, Polisi Kehutanan telah melakukan penindakan tehadap pelanggaran di Bidang Kehutanan sebanyak 6 Kasus yang menebang kayu dalam kawasan hutan eks. Perum Perhutani dan 5 kasusnya sudah di P21 , sementara 1 kasus lainnya dalam proses penyidikan. Selain pembinaan dan penertiban peredaran hasil hutan, pencegahan terjadinya illegal logging dilakukan melalui menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan dengan kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan, pengendalian dan pengaman hasil hutan, dukungan operasional penyuluhan kehutanan.

4.2.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyelenggaraan urusan pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 realisasi tingkat keterserapan input (dana) mencapai **98,39%** dari total belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

Pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 antara lain diimplementasikan melalui kegiatan peningkatan sarana listrik daerah terpencil dengan pemasangan PLTS pada rumah sebanyak 160 rumah/unit yang dilaksanakan di Kecamatan Tarano (Dusun Mata Timur/Lokasi Panco dan Panumbu Desa Mata) sebanyak 27 unit, Kecamatan Lunyuk (Dusun Jamu Desa Jamu sebanyak 51 unit, Dusun Karya Makmur Desa Padasuka sebanyak 32 unit, Dusun Liang Bage Desa Emang Lestari sebanyak 27 unit) dan Kecamatan Plampang (Dusun Pangudi Makmur Desa Brang Kolong sebanyak 23 unit). Untuk pembangunan PLTS komunal 15 KW melayani 100 rumah yang berlokasi di Dusun Sili Desa Mata kecamatan Tarano. Sementara untuk peningkatan jaringan distribusi, rehabilitasi, perluasan kualitas dan kuantitas jaringan sambungan rumah PLTMH serta instalasi rumah sejumlah 227 rumah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang dilaksanakan di Desa Tepal dan Desa Batu rotok. Untuk pembangunan Biogas yang dilaksanakan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

sebanyak 176 unit yakni di Kecamatan Moyo Utara sebanyak 18 unit, Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 22 unit, Kecamatan Lape sebanyak 12 unit, Kecamatan Lopok sebanyak 18 unit, Kecamatan Maronge sebanyak 19 unit, Kecamatan Plampang sebanyak 21 unit, Kecamatan Empang sebanyak 36 unit, Kecamatan Utan sebanyak 22 unit dan Kecamatan Buer sebanyak 8 unit.

Terhadap peningkatan cakupan listrik untuk daerah terpencil yang dibiayai melalui dana alokasi umum (DAU) berupa peningkatan kapasitas pembangkit listrik, penambahan jaringan transmisi, peningkatan kapasitas gardu induk, perluasan jaringan dan gadu distribusi di perdesaan, serta program penyediaan listrik hemat dan murah.

Untuk potensi mineral dan sumberdaya mineral di Kabupaten Sumbawa sangat potensial untuk dikembangkan, karena Kabupaten Sumbawa merupakan daerah atau kawasan yang dilewati jalur-jalur yang prospek akan cebakan bahan-bahan logam yang dikarenakan letaknya di busur gunung api (daerah tunjaman), Ini terbukti dengan adanya beberapa indikasi maupun prospek cebakan logam yang telah dieksplorasi berupa mineral tembaga dan emas oleh PT, Newmont Nusa Tenggara di daerah Dodo Rinti. PT.Selatan Arc. Minerals di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang dan PT. Indo Energi Alam Raya di daerah Kecamatan Lopok dalam tahap kegiatan penyelidikan umum untuk mencari cebakan emas dan biji besi. Potensi lain adalah bahan Galian Galian Golongan C (BGG-C) dimana penyebarannya hampir disemua wilayah Sumbawa dan mempunyai cadangan yang sangat besar. Biasanya terdapat sebagai endapan gosong sungai atau bukit-bukit kecil yang merupakan endapan piroklastik seperti batu kali, kerikil, pasir dan sirtu. Bahkan bahan lain seperti batu gamping, rijang, marmer, lempung, batu lempung, andesit, granodiorit juga terdapat sebagai bukit-bukit kecil.

Pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan eksploitasi terhadap potensi pertambangan prinsipnya akan selalu dilakukan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Gambaran pembangunan urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2013, diantaranya kegiatan eksplorasi/penyelidikan umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan cadangan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

sumberdaya mineral di wilayah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

Tabel 4.23
Daftar Perusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam
di Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2013

NO	Nama Perusahaan	Jenis KP	Nomor dan Tanggal SK	Luas/Lokasi (Ha)
1	PT. Maliki Resources	Zircon	SKIUP No. 319/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	2.980 Ha
2	PT. Syabas Sumbawa Mineral	zirkon	SKIUP No. 320/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	8.565 Ha
3	PT. Fattah Minerals	Zircon	SKIUP No. 545/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	5.046 Ha
4	PT. Taruna Perkasa	Mineral Kuarsa	SKIUP No. 232/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	7.660 Ha
5	PT. Sumbawa Batu Mulia	Batu Kuarsa	SKIUP No. 132/IUP/KPPT/2011 tgl 03 Maret 2011	19.730 Ha
6	PT. Dua Rajawali Proenergi	Kaolin	SKIUP No. 135/IUP/KPPT/2011 tgl 04 Maret 2011	18.650 Ha
7	PT. Sumbawa Prima Mineralindo	Pasir Kuarsa	SKIUP No. 1025/IUP/KPPT/2011 tgl 29 November 2011	1.126 Ha

Hasil-hasil kegiatan eksplorasi dan penyelidikan umum yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa pada saatnya diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang potensi yang terkandung di dalam perut bumi Kabupaten Sumbawa.

Aspek lain yang penting menjadi perhatian dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah menyangkut cakupan layanan listrik perdesaan terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan potensi energi setempat. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu (a) koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; (b) Pengawasan dan penertiban pengusahaan ketenagalistrikan; (c) Peningkatan sarana listrik daerah terpencil; (d) Pemutakhiran data kelistrikan.

Pasokan listrik masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagian besarnya sangat tergantung pada pasokan listrik PT. PLN (Persero), Kendala utama pengembangan listrik PLN ini adalah sangat terbatasnya kapasitas daya,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

sehingga pertumbuhan pemasangan baru listrik PLN progres pertumbuhannya sangat kecil, Dimana pertumbuhan *supply* tidak sebanding dengan pertumbuhan *demand*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Institut Teknologi Malang pada tahun 2003 terdapat beberapa potensi energi alternatif yang layak dikembangkan diuntuk pembangkit tenaga listrik di pedesaan.

**Tabel 4.24
Potensi Sumberdaya Energi Angin**

No	Kecamatan	Kecepatan Angin (knots)	Daya (watt)
1	Alas Barat	17	376,177
2	Labuhan Alas	20	612,541
3	Lape	15	258,415
4	Plampang	16	313,621
5	Labangka	19	525,177
6	Empang	17	376,177

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa

**Tabel 4.25
Potensi Sumberdaya Energi Air**

No	Kecamatan	Sungai/ Bendungan	Volume (m3)	Debit (m3/dtk)	Head (m)	Energi (MWh/Thn)
1	Lunyuk	Brang Beh	-	70,3	2	7,249,527
2	Alas	Brang Ode (marente)	-	3,27	2	337,211
3	Moyo Hulu	Bendungan Batu Bulan	46,5 Juta	1,635	38,5	8,377,170
4	Lape Lopok	Bendungan Mamak	32,5 juta	1,490	41,5	4,600,560
5	Plampang	Bendungan Tiu Kulit	10,8 juta	408	31,7	2,451,740
6	Empang	Bendungan Gapit	10,3 juta	380	29	1,001,840

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

**Tabel 4.26
Potensi Sumberdaya Energi Surya**

No	Kecamatan	Desa	KK	Energi (MWh/Th.)
1	Batulantereh	Baturotok, Tepal, Baodesa	900	3.125,20
2	Moyo Hilir	Penyaring	70	2.212,56
3	Moyo Hulu	Mokong	150	5.254,20

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa

Terhadap potensi tersebut yang telah banyak digunakan adalah energi surya, dimana pembangkit tenaga surya yang diperuntukkan kepada masyarakat

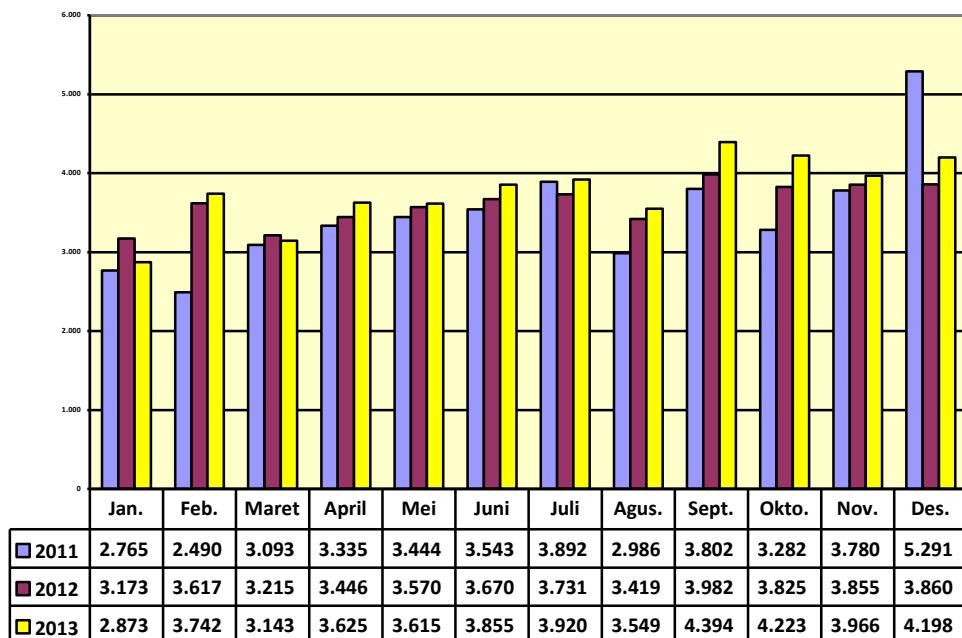


Pemerintah Kabupaten Sumbawa

pedesaan yang tidak terjangkau jaringan PLN selama 5-10 tahun kedepan, sedangkan energi air masih dalam tahap penelitian dan studi kelayakan di Kecamatan Batulanteh. Untuk energi angin layak dikembangkan di daerah pesisir dan kepulauan dan sampai saat ini belum dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.2.2.5. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata yang diselenggarakan pada tahun 2013 diarahkan pada beberapa sasaran, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, baik berupa wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2013 terdapat kunjungan sebanyak 45.103 wisatawan yang terdiri dari WNI : 41.763 wisatawan dan WNA : 3.340 wisatawan) hal ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pariwisata Kabupaten Sumbawa bila dibandingkan dengan tahun 2012 dengan kunjungan wisatawan sebanyak 43.363 wisatawan, sehingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.760 atau 4,01% atau terjadi peningkatan rata-rata kunjungan pertahun dari tahun 2011-2013 sebesar 4,00%. Hal ini tergambar sebagai berikut.



**Gambar 4.12
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013**



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Pengembangan sarana informasi untuk promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana informasi, promosi dan pemasaran produk wisata dengan menitik beratkan pada: *a*) Pembuatan media informasi pariwisata; *b*) Pengadaan sarana pendukung promosi wisata; *c*) pengiriman duta wisata, seni dan budaya keluar daerah; *d*) Kerjasama dan pemberian bantuan untuk promosi pariwisata. Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran di bidang pariwisata dan pada tahun 2013 diselenggarakan event promosi wisata, festival dan pekan Budaya, dan pergelaran apresiasi seni serta event wisata budaya seperti permainan rakyat rutin dilaksanakan setiap tahun.

4.2.2.6. Urusan Pilihan Industri

Pengembangan industri dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat yang mendukung sektor perdagangan serta memperlancar distribusi produk. Sebagai gambaran, jumlah industri kecil dan menengah (IKM) dari tahun 2011-2013 di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

**Tabel 4.27
Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)
di Kabupaten Sumbawa**

No	Uraian	Tahun			Perkembangan	
		2011	2012	2013	Jumlah	%
1.	IKM Formal					
	1. Unit Usaha (unit)	736	750	765	29	3,94
	2. Tenaga Kerja (org)	3.904	3.945	3.915	11	0,28
	3. Nilai Investasi (Rp.000)	36.557.401	35.921.653	38.807.556	2.250.155	6,16
	4. Nilai Produksi (Rp.000)	83.441.975	89.841.875	93.528.538	10.086.563	12,09
2.	IKM non Formal					
	1. Unit Usaha (unit)	2.810	2.818	2.818	8	0,28
	2. Sentra (unit)	146	148	148	2	1,37
	3. Tenaga Kerja (org)	5.986	6.016	6.016	30	0,50
	4. Nilai Investasi (Rp.000)	4.268.956	4.343.956	4.343.956	75.000	1,76
	5. Nilai Produksi (Rp.000)	36.689.959	38.729.936	40.018.064	3.328.105	9,07

Sumber Data : Dinas Koperindag Kab. Sumbawa

Penyelenggaraan urusan pilihan industri diarahkan pada meningkatnya jumlah pelaku dan usaha industri kecil dan menengah yang memperoleh akses terhadap pasar dan lembaga permodalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan: *a*) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

menengah; b) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah; c) perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; d) Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah; e) Peningkatan dan pengembangan usaha KUKM agribisnis dan agroindustri; f) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; g) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi; h) Koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah; i) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil; j) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil; k) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah; l) Sertifikasi tanah UMKM.

1. Urusan Pilihan Perdagangan

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan, diantaranya peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan usaha besar sektor perdagangan. Pada tahun 2013 terdapat 16.042 unit UKM dan Usaha Besar, dengan peningkatan sebesar 1.794 unit (12,59%), dibandingkan dari tahun 2011 dengan jumlah 14.248 unit, hal ini terlihat pada table berikut.

Tabel 4.28
Perkembangan jumlah pelaku usaha perdagangan
menurut besaran usahanya di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Klasifikasi Usaha				Jumlah
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar	
1.	2011	8.383	5.539	307	19	14.248
2.	2012	8.498	5.899	325	19	14.741
3.	2013	9.706	5.988	329	19	16.042
Perkembangan		1.323	449	22	-	1.794
%		15,78	8,11	7,17	-	12,59

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Aktifitas perdagangan sangat ditentukan oleh ketersediaan pasar, hal ini ditandai dari peningkatan jumlah pasar tradisional dari 12 pasar trasional pada tahun 2012 menjadi 13 pasar pada tahun 2013 dengan fasilitas prasarana pasar yang juga mengalami penambahan, diantaranya ketersediaan kios sebanyak 835 unit, petak los pasar sebanyak 760 unit, jumlah pelataran sebanyak 3.675 unit,



dan ketersediaan MCK pasar sebanyak 10 unit.

Untuk upaya perlindungan terhadap konsumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, secara berkala melakukan uji sampel di Laboratorium terhadap barang/makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dihajatkan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang layak dan sehat. Demikian juga untuk Tera alat ukur telah dilakukan sebesar 69,99% dari jumlah alat kmetrologian sebanyak 2.183 unit, dari 1.114 unit pada tahun 2011, maka terjadi peningkatan terhadap tera alat ukur sebesar 1.069 unit atau 95,96%.

Pembangunan pada urusan perdagangan, kondisinya sangat didominasi oleh faktor harga, di samping faktor-faktor produksi yang mempengaruhi tingkat suplai, terutama untuk bahan-bahan kebutuhan pokok. Pemerintah pada tahun 2013 telah meningkatkan intensitas koordinasi dengan para pelaku pasar bahan pokok dan bahan strategis serta peningkatan sistem dan jaringan informasi termasuk penyediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa.

2. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Penyelenggaraan urusan ketransmigrasian di Kabupaten Sumbawa diimplementasikan antara lain melalui :

- a). Penataan Sarana Prasarana dan Bangunan Fasilitas Umum di Lokasi Transmigrasi.

Kegiatan ini merupakan penunjang terhadap program pembangunan dan pengembangan daerah transmigrasi yang pendanaannya melalui APBN seperti pengembangan jalan 4 km, yang terdiri dari pemeliharaan jalan dan jembatan di Kimtrans Brang Lamar, rehab jalan simpang jalan provinsi ke KTM Labangka dan supervise 2,5 km, pembangunan jalan local primer di pusat KTM dan supervise 1 km, pemeliharaan bangunan fasilitas umum di Kimtrans Brang Lamar 2 unit, Pembangunan pagar keliling gedung pengeloa KTM dan supervise 192 m.

- b). Pengerahan transmigrasi

Pada tahun 2013 dilaksanakan lanjutan pembangunan pemukiman dan infrastruktur di kawasan transmigrasi baru di desa Brang Lamar Kecamatan Lunuk, serta terfasilitasinya penempatan keluarga transmigrasi sejumlah 100 KK yang peresmiannya dilakukan pada bulan November 2013.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

c). Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi

Peningkatan taraf hidup masyarakat transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dibidang kesehatan, pendidikan, koperasi dan pemasaran, kelembagaan desa, karang taruna, remaja masjid serta pemberdayaan terhadap perempuan. Pada tahun 2013 dilaksanakan usaha produktif di kawasan transmigrasi seluas 92 ha, dengan dukungan pengadaan sarana produksi pertanian di UPT Brang Lamar sejumlah 100 KK, pengadaan peralatan usaha mandiri di KTM 12 unit, kebun Poktan seluas 1,25 Ha (kebun percontohan) bagi 5 kelompok.

d). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigasi.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi adalah dengan disalurkannya bantuan pendidikan, pelayanan social budaya dan mental spiritual kepada 1.051 orang warga transmigrasi.

4.2.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan pilihan penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2013 masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dengan pencetakan sawah baru, sehingga program tersebut belum terintegrasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum sebagai pendukung kegiatan teknis lainnya.

Solusinya :

Perlu peningkatan sistem koordinasi yang terpadu lintas instansi, sehingga program-program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri guna tercipta pola kegiatan yang terintegrasi, sehingga pelaksanaannya dapat berdaya dan berhasil guna.

2. Keberadaan populasi kerbau yang menurun dari tahun ke tahun, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah memformulasikan strategi melalui pembentukan Tim Pengkajian Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau, sehingga permasalahan-permasalahan sebagai penyebab menurunnya populasi kerbau tersebut dapat teridentifikasi secara jelas



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

dengan pola penanganan yang tepat. Selain itu masalah lainnya yang dihadapi ditingkat lapangan adalah masih rendahnya kualitas serum atau darah yang dikirim dari lapangan untuk mendeteksi penyakit ternak, karena sebagian serum atau darah yang dikirim tersebut rusak (lisis), sehingga mengurangi nilai keakuratan dalam pendektesiannya. Untuk itu Pemerintah Daerah terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas di lapangan tentang tata cara pengambilan darah sampai dengan penanganan menggunakan termos dengan es batu, sehingga darah tersebut tidak lisis, guna mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula dengan masih adanya pemotongan betina produktif, sehingga telah diambil langkah-langkah antisipatif melalui pembinaan terhadap penjagal hewan guna meminimalisir terhadap pemotongan betina produktif.

3. Masih banyaknya tindak pidana kehutanan diwilayah hutan Kabupaten Sumbawa seperti perladangan liar, perambahan hutan, illegal logging/pencurian kayu, sementara kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan masih terbatas dibandingkan dengan luas hutan yang harus diawasi. Untuk itu Pemerintah Daerah terus melaksanakan berbagai langkah, antara lain dengan meningkatkan intensitas penyuluhan kepada masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan, sehingga masyarakat ikut terlibat langsung melalui kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial dalam rangka merehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air.



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang diterima

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan utama penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5.1.1. Dasar Hukum

Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan telah diatur dalam Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Selain itu, masing-masing jenis tugas pembantuan yang diterima tersebut memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar operasional pelaksanaannya oleh SKPD yang menerimanya, meliputi:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan :
 - a. DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2013
 - b. DIPA Nomor : 018.08.4.239053/2013
2. Dinas Kesehatan :
 - a. DIPA Nomor : 024.03.4.239269/2013
 - b. DIPA Nomor : 024.05.4.230575/2013
3. Dinas Sosial :
 - a. DIPA Nomor : 027.03.4.230574/ 2013
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - a. DIPA Nomor : 026.04.4.239092/ 2013
 - b. DIPA Nomor : 026.07.4.239270/ 2013
 - c. DIPA Nomor : 026.06.4.239052/ 2013
5. Dinas Kelautan dan Perikanan :
 - a. DIPA Nomor : 032-04.4.239095./2013
 - b. DIPA Nomor : 032-07.4.239095/2013
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :
 - a. DIPA Nomor : 010.05.5239273/2013
7. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - a. DIPA Nomor : 024-04.4.230539/2013
8. Dinas Pekerjaan Umum :
 - a. DIPA Nomor : 033.05.5.503758/2013

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah :

1. Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian);
2. Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Ditjen Bina Upaya Kesehatan)



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

3. Kementerian Sosial (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan);
4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi).
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ KP3K, Ditjen Perikanan budidaya).
6. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa).
7. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Cipta Karya).

5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Tugas Pembantuan tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD)
7. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
8. Dinas Pekerjaan Umum

5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang di terima di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah :

- 1). **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelaanjutan**, yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
 - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
 - b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia;
 - c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- d) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan;
- e) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	6.489.500	- SLPTT komoditas aneka kacang dan umbi.	7.000 Ha	95,00
			- Laporan pelaksanaan SLPTT kacang dan umbi.	1 Laporan	100,00
2.	Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	5.343.200	- SLPTT komoditas serelia.	40.000 Ha	98,00
			- Laporan Pengelolaan Serelia	3 Laporan	100,00
3.	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	47.955	- Laporan Kegiatan pembenihan	1 unit	100,00
4.	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	645.000	- Laporan penanganan pasca panen tanaman pangan.	1 Laporan	100,00



No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
			- Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan sarana pasca panen tanaman pangan.	3 kelompok	100,00
5.	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	105.000	- Rancangan program, kegiatan dan renja tanaman pangan	1 ranc.	76,00
			- Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen	12 bulan	100,00
			- Laporan Pelaksanaan manajemen tanaman pangan	3 lap	100,00
			- Perangkat pengolah data komunikasi	1 unit	100,00
	Total	12.631.162			96,03

2). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian, yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :

- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian;
- b) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- d) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Dan Sarana Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	4.960.000	- Rehabilitasi JITUT dan JIDES	4.800 Ha	100,00
			- Pemberdayaan Kelembagaan	2 unit	100,00
2.	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	36.670.000	- Pengembangan Optimasi Lahan	700 Ha	100,00
			- Pengembangan SRI	1.000 Ha	100,00
			- Pra/Pasca sertifikasi lahan pertanian	10 paket	100,00
			- Perluasan Sawah	3.300 Ha	100,00
3.	Dukungan manajemen dan dukungan teknis	75.000	- Adanya administrasi kegiatan mendukung tanaman pangan	12 bulan	100,00
4.	Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)	25.000	- Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan	1 paket	100,00
	Total	41.730.000			100,00



- 3). **Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak**, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - Pelaporan dan Pencatatan;
 - Perencanaan BOK;
 - Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK;
 - Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Anggaran Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK)				
	- Bantuan Operasioanal Kesehatan	6.523.000	Tersalurnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Terlaksanya Monitoring, evaluasi dan adanya laporan tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25 Puskesmas	99,73
	- Pelaporan dan pencatatan	1.915		1 Laporan	100,00
	- Perenc. BOK	44.720		1 Laporan	62,24
	- Dokumen monev BOK	54.400		1 Laporan	53,25
	- Laporan/ keg. / pembinaan)	174.465		1 Laporan	82,43
	Total	6.789.500			98,67



- 4). **Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa,dengan kegiatan berupa :
- Konstruksi Sarana Air Minum;
 - Dokum Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum;
 - Laporan Keuangan dan BMN;
 - Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan;
 - Pemicuan Desa STBM;
 - Dokumen Pelaksanaan STBM.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Penyehatan Lingkungan				
	- Konstruksi Sarana Air Minum	325.000	- Terehabilitasinya Sarana Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	100 unit	91,88
	- Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum	10.850	- Terdatanya Laporan dan terdokumentasi Peningkatan Akses Air Minum.	3 Dokumen	45,14
	- Laporan Keuangan dan BMN	9.300	- Tersusunnya Laporan Keuangan	10 Laporan	
	- Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan	38.280	- Adanya Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan	12 Dokumen	



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Pemicuan Desa STBM	28.000	- Pemicuan Desa STBM	30 Desa	
	- Dokumen Pelaksanaan STBM	22.860	- Dokumen Pelaksanaan STBM	2 Dok.	
	Total	506.630			74,48

- 5). **Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)**, yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
- Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan;
 - Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup;
 - Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan;
 - Infrastruktur di Lingkungan warga KAT;
 - Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan	1.608.000	Terehabilitasinya rumah warga KAT	134 unit	87,79
2.	Warga KAT yang mendapat bantuan Jaminan hidup	302.250	Tersalurnya bantuan jaminan Hidup bagi warga	269 KK	100,00



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
3.	Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah	201.000	Tersalunya bantuan peralatan bagi warga	134 KK	100,00
4.	Infrastruktur di Lingkungan warga KAT	118.480	Terbangunnya infrastruktur dilingkungan warga KAT	4 unit	49,15
5.	Laporan Keuangan kinerja/ monitoring /evaluasi / Publikasi / sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT	63.500	Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT	1 Laporan	98,11
	TOTAL	2.293.230			88,76

- 6). **Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**, yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
- Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.



Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.6

Realisasi Anggaran Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.		Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Terlaksananya kegiatan padat karya		
	- Padat Karya Insrastruktur	757.950		264 org	99,80
	- Layanan Perkantoran	41.805		12 bln	98,94
TOTAL		799.755			97,76

- 7). **Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi**, yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
- Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
 - Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
 - Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Anggaran Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi:	1.270.600	Terlaksananya program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di KTM Labangka.		94,82
	- Pengembangan Jalan	1.116.560	Pengembangan Jalan	4 KM	95,20
	- Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	154.040	Penduduk yang tertata, terintegrasi dalam kawasan transmigrasi	2 KM	92,08
2.	Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi:	181.975			93,36
	- Luasan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi	0,00	Luasan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi	92 Ha	0,00
	- Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi di Kimtrans.	2.400	Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi di Kimtrans/KTM	750 klr	100,00
	- Jenis Usaha Pengolahan Hasil	165.075	Jenis Usaha Pengolahan Hasil	1 jenis	92,68



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Jumlah/Jenis Kelembagaan Ekonomi Kimtrans/KTM	14.500	Jumlah/Jenis Kelembagaan Ekonomi Kimtrans/KTM	1 lgb	100,00
3.	Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi:	1.169.270			47,22
	- Bantuan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan mental spiritual	89.400	Bantuan pendidikan, pelayanan sosial Budaya dan mental spiritual	1.051 orang	10,96
	- Kelembagaan Kimtrans/KTM dan masyarakat yang mandiri	220.070	Kelembagaan Kimtrans/KTM dan masyarakat yang mandiri	4 Lbg	68,84
	- Bantuan pangan	799.650	Bantuan pangan	100 kk	49,11
	- Bantuan kesehatan	60.350	Bantuan kesehatan	300 orang	21,46
4.	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT:	349.086			93,56
	- Layanan perkantoran	226.330	Layanan perkantoran	12 Bulan	90,45



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Dok. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	37.140	Dok. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	2 dok	98,24
	- Laporan Kegiatan dan Pembinaan	65.616	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	2 Lap.	99,67
	- Kendaraan Roda 2	20.000	Kendaraan Roda 2	1 unit	100,00
	TOTAL	2.191.131			86,04

8). **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**, yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :

- a) Fasilitasi penempatan transmigrasi;
- b) Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi;
- c) Penyediaan tanah transmigrasi;
- d) Partisipasi masyarakat;
- e) Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P2K Transmigrasi.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Realisasi Anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Fasilitasi penempatan transmigrasi:	138.300			98,95



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Keluarga yang difasilitasi perpindahannya di wilayah strategis	128.300	Keluarga yang difasilitasi perpindahannya di wilayah strategis	100 kk	100,00
	- Penduduk yang tertata dan terintegrasi dalam kawasan transmigrasi	10.000	Penduduk yang tertata dan terintegrasi dalam kawasan transmigrasi	300 kk	85,50
2.	Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi:	5.371.935			93,69
	- Sarana yang dibangun	4.319.075	Sarana yang dibangun	107 unit	96,10
	- Prasarana yang dibangun	1.052.860	Prasarana yang dibangun	1 km	83,83
3.	Penyediaan tanah transmigrasi:	97.500			38,41
	- Lahan yang tersedia di wilayah tertinggal/perbatasan	97.500	Lahan yang tersedia di wilayah tertinggal/perbatasan	200 ha	38,41
4.	Partisipasi masyarakat:	88.350			95,96



No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan	88.350	Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi diwilayah tertingal/perbatasan	2 lbg	95,96
5.	Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P2K Transmigrasi:	388.050			83,73
	- Pelayanan teknis administratif	388.050	Pelayanan teknis administratif	1 satker	83,73
	TOTAL	6.084.135			92,33

- 9). **Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
- Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
 - Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan;
 - Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan;
 - Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;
 - Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan:	245.780			99,52
	- Pembangunan Pos Pelayanan Kesehatan Ikan	245.780	Terbangunnya pos pelayanan ikan.	1 unit	99,52
2.	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan:	260.445			99,68
	- Pembuatan kebun bibit rumput laut	256.845	Tersedianya kebun bibit rumput laut	6 OP	99,68
	- Pengembangan unit pemberian skala kecil	3.600	Terbayarnya honor petugas statistik	12 OB	100,00
3.	Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan:	116.260			95,48
	- Pengadaan sarana kawasan minapolitan	50.615	Terbangunnya para-para	10 Unit	96,05



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Operasional Tim Pokja Minapolitan	62.395			100,00
	- Rapat Pokja	3.250	Terlaksananya rapat tim	2 kali	100,00
4.	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan:	98.915			99,62
	- Model pengembangan budidaya	85.615	Percontohan Budidaya Laut Teknologi Rumput dengan Anjuran dan CBIB	1 pkt	99,57
	- Temu Lapang	13.300			100,00
5.	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan:	158.410			98,71
	- Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)	64.460	Terlaksananya kegiatan pembudidayaan yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya	20 klp	95,63



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang memenuhi standar kelembagaan	23.700	Optimalisasi pemanfaatan kredit	10 klp	100,00
	- Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan	70.250	Terlaksananya sosialisasi PUMP perikanan budidaya dan kredit program	10 klp	96,58
6.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen perikanan budidaya:	120.190			93,48
	- Pengelolaan Satker	44.685	Operasional satker	12 bulan	100,00
	- Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data terkini dan akurat	40.135	Pelaksanaan program (perencanaan, monitoring dan evaluasi)	3 dok	88,58
	- Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBP) dan	35.370	Pengelolaan keuangan (SAI dan SABMN)	2 dok	90,82



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	administrasi persuratan				
	TOTAL	1.000.000			97,93

10). **Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :

- a) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha:				
	- Administrasi kegiatan	116.200		12 bulan	100,00
	- Pengembangan usaha ekonomi:	634.200			100,00
	- Pengembangan usaha ekonomi	517.600	Publikasi Pugar dan terbangunnya UPG		99,94



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Sosialisasi program	25.500	Tersosialisasinya program di masyarakat	30 OK	80,00
	- Pendampingan masyarakat	75.000	Tersedianya Tenaga Pendamping		100,00
	- Lokakarya program	7.500	Terlaksananya Lokakarya		100,00
	- Monitoring dan evaluasi	8.700	Terlaksananya Monev.		100,00
	Total	750.400			99,53

- 11). **Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**, yang dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
- Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM);
 - Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.11
Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM):	20.039.845			93,56



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan	20.039.845	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis.	12 Kec. (80 desa)	93,56
2.	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat:	11.077.630			99,61
	- Cakupan Penerapan PNPM Generasi	11.077.630	Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui KAT, pelestarian adat dan budaya nusantara dengan pemberian stimulan kepada pemerhati adat dan budaya	12 Kec. (80 desa)	99,61
Total		31.117.525			96,59

12).**Program Pembinaan Upaya Kesehatan**, yang dialokasikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Realisasi Anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :	9.000.000			89,77
	- Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB	8.931.340	Tersedianya alat kedokteran, kesehatan dan KB	54 unit	89,75
	- Layanan Perkantoran	68.660	Tersedianya layanan perkantoran	6 bulan	92,63
	TOTAL	9.000.000			89,77

13). **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman**, yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :

- a) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk Pelaksanaannya terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)	Output		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1.	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan pengelolaan gedung dan rumah Negara:	3.292.500			100,00
	-Bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial/keswadayaan masyarakat	3.292.500	Terlaksananya penyaluran bansos keswadayaan masyarakat	16 kel/desa	100,00
	TOTAL	3.292.500			100,00

5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran Tugas Pembantuan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 pada kementerian/lembaga pemberi tugas pembantuan yang tertera dalam DIPA masing-masing kementerian/lembaga. Berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan kementerian/lembaga yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, secara kumulatif anggaran/pagu DIPA Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 sebesar Rp 118.194.968.000,- yang terdiri dari Tugas Pembantuan sebesar Rp. 83.784.943.000,- dan Urusan Bersama sebesar Rp. 34.410.025.000,-.

Adapun alokasi anggaran pada masing-masing SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten Sumbawa tahun 2013 berasal dari :



1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 018.03.4.239093/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.631.162.000,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 018.08.4.239053/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.730.000.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

3. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 024.03.4.239269/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.798.500.000,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

4. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 024.05.4.230575/2013, Tanggal 9 Juli 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 506.630.000,- (*Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

5. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Tugas Pembantuan pada RSUD Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 024.04.4.230539/2013, Tanggal 15 Mei 2013, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*Sembilan Milyar Rupiah*).

6. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 027.03.4.230574/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.293.230.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

7. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 026.04.4.239092/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 799.755.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

8. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 026.07.4.239270/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.191.131.000,- (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

9. Direktrot Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 026.06.4.239052/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.084.135.000,- (*Enam Milyar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

10. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 032.04.4.239095/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

11. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/KP3K

Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 032.07.4.239095/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 750.400.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

12. Diraktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Bersama pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 010.05.5239273/2013, Tanggal 5 Desember 2012 dan DIPA lanjutan Nomor : 010.05.5.239273/2013, Tanggal 10 April 2013, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.117.525.000,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).



13. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Urusan Bersama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor : 033.05.5.503758/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.292.500.000,- (*Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah*).

5.1.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu :

1. Permasalahan :

- a) Pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk mencapai Swasembada Berkelaanjutan, mengalami keterlambatan dalam proses pelaksanaannya. Kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan dalam pola pelaksanaan SLPTT 2013, yakni dengan terbitnya Pedoman Umum Subsidi Benih tanggal 14 Juni 2013, dimana subsidi benih kepada petani melalui pembayaran benih sebesar 25% dari harga pasaran, sementara sebelumnya menggunakan sistem pola Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) secara gratis, sehingga kabupaten membutuhkan waktu dalam mensosialisasikan kembali aturan tersebut kepada petani.
- b) DIPA yang turun dipertengahan tahun, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Program Pembinaan Upaya Kesehatan, sehingga berdampak terhadap keterlambatan penunjukan PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran, yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- c) Adanya revisi DIPA dan POK yang dilaksanakan oleh SKPD pengelola Tugas Pembantuan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada tertundanya realisasi serapan anggaran seperti yang ditargetkan, sehingga terjadi penumpukan realisasi diakhir tahun.

2. Solusi

- a) Segera menginventarisir Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB), sehingga kegiatan yang semula dihajatkan pada Musim Kemarau



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

I dan Musim Kemarau II dapat terealisasi pada Musim Hujan (Oktober-Desember).

- b) Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan SKPD pengelola Tugas Pembantuan tersebut, untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- c) Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai langkah percepatan serapan anggaran sesuai dengan yang telah ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun.

5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan

5.2.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Bab VII tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

Secara operasional, Tugas Pembantuan yang diberikan ke desa oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa didasarkan pada:



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.

5.2.2 Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan Kepada Desa

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.



5.2.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kumulatif anggaran yang dialokasikan untuk diberikan ke desa sebagai pelimpahan kewenangan/penugasan pemerintah daerah yang terdiri dari:

- a. Bantuan Keuangan Ke Pemdes :Rp. 26.451.658.504,-
- b. Pajak/Retribusi :Rp. 329.700.000,-
- c. Hibah kepada Desa :Rp. 1.775.500.000,-



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan telah diuraikan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan umum pemerintah meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolahan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

6.1. Kerjasama Antardaerah

6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antardaerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah pasal 1, disebutkan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam rangka kerjasama antardaerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempuh kebijakan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pemerintah daerah lainnya, baik dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa dalam skala regional, pengembangan kapasitas SDM, penanggulangan kemiskinan maupun dalam pembinaan dan penertiban wilayah perbatasan, serta tetap melanjutkan kerjasama yang telah disepakati pada tahun-tahun sebelumnya.



Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Mengimplementasikan hal tersebut, pada tahun 2013 telah terjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah daerah lain/pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk secara bersama-sama berupaya menekan/menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kemandirian daerah khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal.

6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2013, kerjasama antardaerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah didasarkan atas :

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor: 895/201/Diknas/2013 Tanggal 3 Januari 2013;
2. Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentang pelatihan kegawatdaruratan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga perawat dalam penanganan kasus kegawatdaruratan di puskesmas Nomor :473/072/2013 tanggal 4 Februari 2013.
3. Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan Badan kerjasama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pemberian dana hibah kepada peserta BKSPJK Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :13 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013.
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Lombok Timur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor: 595/807/2013 Tanggal 1 Oktober 2013.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor: 12 Tahun2013 Tanggal 1 Oktober 2013.



6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor: 045.2/5882/stkt/2013 Tanggal 1 Oktober 2013.
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Tanggal 1 Oktober 2013.
8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Tanggal 1 Oktober 2013.
9. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur NTB tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Khusus Pengembangan Kerbau di Indonesia Nomor : 524.1/3838/Disnak Keswan/2013.

Sebagai gambaran terhadap hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut adalah :

1. Telah tersalurnya Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada 352 SD Negeri/Swasta dan 92 SMP Negeri/Swasta;
2. Telah dilaksanakan pelatihan kegawatdaruratan terhadap perawat yang bertugas di puskesmas se-Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam penanganan penderita gawat darurat.
3. Telah terbayarnya klaim peserta Jamkesmas Nusa Tenggara Barat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilayani pada PPK tingkat 1 (puskesmas).
4. Terlaksananya kegiatan penempatan transmigran di UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk sebanyak 4 KK dari setiap kabupaten/kota.
5. Terakomodirnya pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah kerbau Sumbawa Bersinergi Tahun Anggaran 2014.

6.1.3 Permasalahan dan Solusi

Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang mengemuka antara lain :

1. Masih ada klaim puskesmas yang belum terbayar bulan Desember sebesar Rp 4.916.500,-



2. Masih ada 2 (dua) kepala keluarga yang usianya di atas 50 tahun yang akan menempati UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk.
3. Lokasi kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah kerbau Sumbawa Bersinergi belum dapat dibebaskan pada tahun 2013.

Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya:

1. Telah diusulkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2014 melalui Badan kerjasama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat untuk menggantikan calon transmigran yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pembebasan lahan dapat teralisasi di tahun 2014.

6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Selain melaksanakan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, Yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ini adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh daerah. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 yaitu pada misi ke-2,3 dan 4 maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lebih



difokuskan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah baik dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, pengembangan daya dukung infrastruktur daerah/wilayah, pengembangan investasi serta sumber daya lokal.

Pola kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki. Bidang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sarana prasarana publik, pendidikan, informasi, aparatur, aset daerah, pelayanan pada masyarakat, tata kota, agama.

6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditempuh maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Politeknik Kesehatan Mataram tentang Penyelenggaraan Program Khusus D III Kebidanan yang tertuang pada Nomor: 4 Tahun 2013 dan Nomor :05.01/75/1/2013 tanggal 12 Februari 2013.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Politeknik Kesehatan Mataram tentang Penyelenggaraan Program Khusus D III Keperawatan yang tertuang pada Nomor: 5 Tahun 2013 dan Nomor :05.01/76/1/2013 tanggal 12 Februari 2013.
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Sekolah Tinggi Administrasi Negara tentang Penyelenggraan Pendidikan program D-I Kebendaharaan Negara Konsentrasi Keuangan Daerah bagi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013.
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan OXFAM GB SECURE PROJECT Nomor : 367/415/BAPPEDA/2013 dan Nomor: 005/OXEI-MoU/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.



5. Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Institut Pertanian Bogor tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Khusus Pembibitan Ternak Nomor : 1607/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
6. Perjanjian Kerjasama Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Mataram tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Khusus Pengembangan Kerbau Sumbawa yang tertuang pada Nomor : 1608/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
7. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT. Bio Greenland tentang Pengembangan jarak kepyar yang tertuang pada Nomor : 150/BP4K/2013 dan Nomor :70/OL-A/II/2013.

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Implementasi dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Politeknik Kesehatan Mataram adalah terselenggaranya Program Khusus D III Kebidanan dan D III Keperawatan dengan menghasilkan 68 bidan dan 38 perawat se-Kabupaten Sumbawa;
2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Sekolah Tinggi Administrasi Negara telah dilaksanakan dan sampai dengan saat ini masih dalam proses perkuliahan;
3. Implementasi dari kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan *OXFAM GB SECURE PROJECT* dengan terlaksananya kegiatan: (1) fasilitasi penyusunan instrument pengurangan resiko bencana, (2) fasilitasi pembuatan dan penguatan organisasi pengurangan resiko bencana, (3) Implementasi Rencana Aksi Masyarakat yaitu tersusunya dokumen analisis resiko bencana di 6 (enam) desa, tersusunya dokumen sistem peringatan dini (*early warning system*) dan terpasangnya alat pengukur ketingian air dan alat pengukur intensitas hujan di 6 (enam) desa dan DAS Moyo.
4. Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Institut Pertanian Bogor telah dilaksanakan dengan terbentuknya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Moyo Utara.



5. Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Universitas Mataram telah dilaksanakan hasil kajian tentang penetapan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah pengembangan kerbau di Indonesia.
6. Implementasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Bio Greenland adalah petani telah menanam jarak kepyar dan memasok biji jarak kepyar kepada PT Bio Greenland.

6.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga khususnya :

1. Masih terbatasnya kemampuan kelompok untuk menjalankan kegiatan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang telah terbentuk.
2. Masih adanya opini dimasyarakat yang menganggap bahwa budidaya kerbau tidak menguntungkan;
3. kegiatan pengembangan jarak kepyar pada lahan seluas 1.081 Ha, dimana harga jual biji jarak kepyar sangat murah, yakni sekitar Rp. 3.500/kg dan penanganan pasca panen jarak kepyar yang rumit yang mengindikasikan kurangnya minat petani dalam menanam jarak kepyar.

Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya:

1. Menunjuk tenaga ahli guna mendampingi kelompok Sekolah Peternakan Rakyat dalam menjalankan usahanya.
2. Diperlukan sosialisasi guna mendukung usaha pengembangan kerbau di Kabupaten Sumbawa.
3. Koordinasi dengan pihak PT. Bio Greenland untuk menaikkan harga beli oleh PT. Bio Greenland dan perlu ada teknologi baru untuk penanganan panen agar lebih mudah pelepasan biji.

6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 27 huruf (j) tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat



daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga disebutkan terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Dalam penyelenggaraan keenam urusan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat di daerah adalah dengan pembentukan instansi vertikal di daerah, yang berfungsi baik untuk melaksanakan program dan kegiatan dari instansi induk juga sebagai jembatan pelaksanaan program yang dapat dilaksanakan secara bersamaan di daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengurusi kewenangan yang belum dapat ditangani oleh daerah dan juga kewenangan yang merupakan pengaturan hal-hal khusus antara lain dibidang keuangan, agama, militer, hukum dan pertanahan.

Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal didaerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintah dan instansi vertikal didaerah.

6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan instansi vertikal sebagai berikut.

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Nomor: NPUB-17-04/PNPM MANDIRI PERDESAAN/I/2013 dan Nomor 8 Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Peternakan Kesehatan Hewan Khusus Pengembangan Kerbau di Indonesia Nomor: 20059/HK.130/F/06/2013 tanggal 20 Juni 2013.

3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa tentang penyusunan Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, dan PDRB Nomor :050.13/199.A Tahun 2012 dan Nomor : 5204.1.268 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013.
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK Kementerian Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin pada satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Anggaran 2013 Nomor: 1294/C2/DN/2013 tanggal 15 Juli 2013.
5. Perjanjian kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa tentang pengawasan keamanan pangan untuk pemeriksaan sampel obat, kosmetik dan makanan Nomor: 870/5873/dinkes/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI, telah terbangun 1 unit gedung pelatihan masyarakat di 1 (satu) kecamatan, terbangunnya 17.292 meter jalan lingkungan di 6 (kecamatan) kecamatan, terbangunnya 2 buah jembatan limpas di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 13.330 meter jalan usaha tani di 5 (lima) kecamatan, terbangunnya 5.820,50 meter jaringan drainase di 5 (lima) kecamatan, terbangunnya 2 check dam di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya pasar umum di 1(satu) kecamatan , terbangunnya bronjong sepanjang 522 meter di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 981,50 meter talud pada 3 (tiga) kecamatan dan tersalurnya bantuan simpan pinjam ke 201 kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 11 (sebelas) kecamatan;



2. Realisasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah dengan terakomodirnya pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah kerbau Sumbawa Bersinergi Tahun Anggaran 2013;
3. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa berupa dokumen Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan PDRB;
4. Implementasi dari kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa adalah tercapainya peningkatan peredaran produk makanan, obat dan kosmetik yang memenuhi syarat kesehatan.

Kegiatan-kegiatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti Kepolisian Resort Sumbawa, Kodim 1607 Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa serta koordinasi dengan instansi vertikal lainnya yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumbawa, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sumbawa, Kantor Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Sumbawa, Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi.

6.3.3. Permasalahan dan Solusi

Sampai dengan tahun 2013 kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh beberapa kendala antara lain:

1. Terjadinya perubahan juklak/juknis dari instansi vertikal yang ada di pusat, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan di daerah.
2. Adanya keterbatasan daerah dalam penyiapan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dalam waktu yang cukup mendesak.
3. Masih ada makanan, obat dan kosmetik dipasaran yang masih mengandung bahan kimia berbahaya.

Terhadap permasalahan tersebut solusi yang akan dilakukan adalah:

1. Lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi serta melakukan



tindakan-tindakan antisipatif terhadap penyiapan dokumen-dokumen perencanaan serta dokumen pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat.

2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terpadu bersama Tim SKPT Kabupaten Sumbawa di pasar tradisional, toko sembako, toko kosmetika, apotik dan toko swalayan serta melakukan pemeriksaan rutin terhadap makanan, obat dan kosmetika sebanyak 2 kali dalam setahun.

6.4. Pembinaan Batas Wilayah

6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antardaerah maupun antarwilayah kecamatan dan desa/kelurahan serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan batas wilayah dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan fasilitasi persoalan-persoalan batas antarkecamatan, antardesa/kelurahan.

6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan, sampai dengan saat ini sudah dalam tahap mediasi oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan penyelesaian oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Menyangkut batas desa pada tahun 2013 telah dilakukan koordinasi penetapan wilayah perbatasan dan telah dihasilkan dokumen peta desa.

6.4.3. Permasalahan dan Solusi

Batas wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Sumbawa masih belum terselesaikan secara keseluruhan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah antara lain penegasan batas teknis dengan instrument yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan patok pilar/pal (tidak lagi menggunakan batas-batas alam), pemetaan wilayah desa dan kecamatan secara sistematis dengan bersandar pada peta dasar Bakosurtanal, serta



mengakumulasi data dan informasi kewilayahan yang berbasis *Geografis Information System* (GIS) melalui Pusat Informasi Spasial Kabupaten (PISK) dan peningkatan kualitas SDM bidang *GIS-Remote Sensing*.

6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penggulangannya

Bencana yang terjadi pada tahun 2013, diantaranya Kebakaran sebanyak 18 kasus, Banjir sebanyak 13 kasus, tanah longsor sebanyak 1 kasus. Bencana Kebakaran yang melanda beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Sumbawa mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda. Selain kebakaran, tanah longsor juga terjadi di Tangkampulit Kecamatan Batulanteh.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung oleh perbuatan manusia. Penanganan dan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah dengan pemetaan kawasan rawan bencana, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara, rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana.

Kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

- a. Rawan bencana banjir : Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muer di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok.
- b. Rawan Bencana Tsunami : Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbwa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.
- c. Rawan Bencana Angin topan : Kecamatan Alas dan sekitarnya, Uter Iwes, dsk, Empang-Tarano dsk.
- d. Rawan bencana gelombang pasang : Pantai utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbwa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.



6.5.2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2013 digolongkan sebagai status bencana regional yang lingkup dampaknya pada tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten.

6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah APBD Kabupaten Sumbawa. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2013 sebesar Rp. 2.997.745.114,30,- (*dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat belas Rupiah tiga sen*).

6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah antisipasi dan kesiapsiagaan aparat pemerintah, masyarakat terhadap bencana perlu selalu disiapkan. Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak BPBD Kabupaten Sumbawa.
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana.
- c. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan.
- e. Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi.
- f. Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/ Gladi Posko / Lapang Bencana.
- g. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.
- h. Memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa.
- i. Realiasi kerjasama dengan OXFAM khusus butir-butir tentang pengurangan resiko bencana misalnya rencana pemasangan sistem peringatan dini yang realisasinya pada tahun 2014.



6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan kawasan khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumberdaya buatan, kawasan pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya didalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan tentang kawasan khusus, melainkan kawasan strategis.

Di Kabupaten Sumbawa sudah terbangun beberapa kawasan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang merupakan simpul pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keunggulan kawasan, diantaranya kawasan Agropolitan Alas-Utan, Kawasan Agropolitan Emparano, Kawasan KTM Labangka, serta Kawasan Agropolitan Brang Pelat.

Pengelolaan terhadap kawasan-kawasan strategis tersebut belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan kemampuan daerah baik didalam menyiapkan *blue print* perencanaan dan pengelolaan kawasan maupun kemampuan anggaran yang relatif sangat terbatas, sementara kontribusi atau peran serta pihak swasta didalam menanamkan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut juga sangat terbatas.

6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.7.1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2013, gangguan yang disebabkan oleh Konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Terhadap peristiwa yang bertepatan dengan Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, bukan disebabkan oleh konflik SARA sebagai sumber pemicunya, akan tetapi murni penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah kerukunan yang telah terjalin selama ini di Kabupaten Sumbawa,



karena masyarakat Sumbawa merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama. Selain itu, terdapat beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus pembebasan tanah warga yang terkena proyek jalan, jembatan dan lain-lain, serta kasus pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral yang meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol.

6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

SKPD yang menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesbangpol Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok SKPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri.

6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.1

**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SKPD Yang Menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013**

No	SKPD/UNIT	Kualifikasi Pendidikan										Pangkat/Gol			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jlh	I	II	III	IV
1	Satpol PP	-	2	29	-	-	1	5	-	-	37	2	26	8	1
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	1	6	-	-	1	16	-	-	24	-	4	15	5
	Jumlah	-	3	35	-	-	2	21	-	-	61	2	30	23	6

6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
**Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kantibmas
Kabupaten Sumbawa Tahun 2013**

No.	SKPD	Anggaran (Rp)
1	Badan Kesbangpol Linmas	3.761.907.675,16
2	Sat Pol PP	4.643.671.138,00
	Jumlah	8.405.578.813,16



6.7.5. Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi Pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota forum koordinasi pimpinan umat beragama.
- b. Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- c. Membangun forum-forum diskusi
- d. Melakukan tindakan sesuai aturan / regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten.
- e. Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- f. Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi.
- h. Melaksanakan aktifitas patroli wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

6.7.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama tersebut dapat diciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Sumbawa, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif dari aparat keamanan selaku mitra Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kabupaten Sumbawa yang kondusif.